

# PROSPEK PERDAMAIAN ISRAEL - PALESTINA ERA PM ISRAEL ARIEL SHARON

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional  
pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

**Sigit Wibisono**

NIM. 960910101112

Pembimbing

Drs. Sjoekron Sjah, SU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

2001

Terima  
No. 10236044

3 JUL 2001  
10236044

S  
327.156.94  
WIB  
p

**MOTTO**

“Keadilan dan Perdamaian adalah asuransi hidup dan milik kita”,  
(William Penn)<sup>1</sup>

“JINARKO = Jiwo Iku Namung Anyawang Rogo Kang Olah”<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Kamarudin Base. 1977. 2000 *Kata-Kata Mutiara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

<sup>2</sup> Falsafah Jawa.

## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahnda dan Ibunda tercinta, Mas Wiwid, Kunto dan Didik.
2. K. Asihku tercinta.
3. Keluarga Bapak Indro Agung, SH beserta putra-putrinya, Arik, Dony dan Putri.
4. Keluarga Bapak Soehardjo beserta putra-putrinya, mbak Yanti, mbak Ila dan Boy.

## PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Pada hari : Sabtu

Tanggal : 16


Bulan : Juni

Tahun : 2001

Jam : 8.00-10.00 WIB

Panitia Penguji

**Ketua**



Prof. DR. A. Khusyairi, MA.

**Sekretaris**



Drs. Sjoekron Sjah, SU.

### Susunan Anggota Panitia Penguji:

1. Prof. DR. A.Khusyairi, MA.
2. Drs. Sjoekron Sjah, SU.
3. Drs. A. Habibullah, MSi.
4. Drs. Umaldi Radi, MA.




Mengetahui

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

Dekan



  
Drs. H. M. Toerki  
NIP. 130 524 832

## KATA PENGANTAR

**Assalamuailaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Tiada kata yang paling indah yang sanggup terucapkan selain pujian rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dalam setiap tarikan nafasku, serta limpahan nikmat berupa kekuatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Penulisan skripsi ini berawal dari ketertarikan penulis pada masalah perdamaian Timur Tengah khususnya konflik antara Israel dengan Palestina yang tiada kunjung selesai.

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini penulis memang mengalami berbagai hambatan, baik itu kesulitan dalam mendapatkan data yang mutakhir mengingat penulis membahas persoalan yang masih sedang berlangsung, maupun rasa jenuh yang seringkali hadir apabila menemui kendala dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun syukur alhamdulillah atas kemurahan Ilahi dan dukungan keluarga serta sahabat-sahabat yang tulus, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Tidak ada manusia yang sempurna adalah ungkapan yang tepat sehubungan dengan karya tulis ini. Namun sebagai manusia yang rasional, kesempurnaan tetap menjadi cita-cita penulis. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menambah nilai "kesempurnaan" yang kita harapkan, yang terakhir penulis berharap karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sosial politik pada khususnya.

Penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku dosen wali, dosen pembimbing dan Kajur Ilmu Hubungan Internasional yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini;

2. Bapak Drs. H. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang banyak membantu kelancaran studi penulis;
3. Segenap Civitas Akademika di Fisip Universitas Jember.
4. Bapak Wiyono, selaku Kepala Perpustakaan Fisip UGM Yogyakarta;
5. Ayahanda Ridwan dan Ibunda Siti Halimah yang dengan tulus ikhlas telah memberikan cinta, doa, bimbingan, segenap perjuangan yang tiada henti-hentinya.
6. Mas Wiwid, yang telah sangat baik, perhatian dan sabar serta selalu berbesar hati untuk mengalah demi kepentingan-kepentingan penulis dan juga adikku Kunto dan Didik.
7. Keluarga Bapak Soeharjo, terutama Ibu Sari, mbak Yanti, mbak Ila, Boy, serta Sasa, yang telah menganggap penulis sebagai bagian dari keluarga;
8. Arik "my little brother", atas dukungan selama penulis "ngangsu kaweruh" di tanah Jember;
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku di HI '06 : Yuke"bondet", Kimpul, Imron, Tommy, Antok"pentol", Asna"muni", Uyab, Huda, Hendri, Agus, Dion, Irman, Rudy, Rizal, Dodit"ogah", Dodik, Ali"iyek", Sauqi, Arif, Ridho, Alib, Aris, Krisna, Heksa, serta yang lainnya, thank's atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini, semoga Allah membalas segala kebaikan yang mereka berikan;
10. "Kakak" angkatan '95 terutama : Harald, Teguh, Wahid, Muhammad, Exiandi, Pungky, Yanto, Victor, terima kasih atas sumbangan pemikirannya yang ikut mendewasakan penulis selama studi di perguruan tinggi ini;
11. Sahabatku di kost-an : Beki"mamad", alm. Isap (semoga damai di sisiNya), Ari"cak ri", Fikri, Rondhi, U'ud & Feri, mas Roni, mas Jatmiko, mas Suko"cethul", mas Andri, mas Tarman, terima kasih atas kelucuan yang selalu hadir dalam kebersamaan, serta mas Arip atas kemudahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
12. Sahabatku Dandung, Bobby, Inki, Edi, Agung"tintung", si kembar Wasis-Tri, Rofik, Eko"mince", Teteng, terima kasih semuanya;

13. Sahabatku Erfan dan Febri, yang telah sangat membantu penulis waktu pertama kali tiba di Jember yang sangat asing bagi penulis;
14. Vanya, thank's atas data-datanya dan segalanya;
15. Crew Bamboole: Gepeng, Edi beserta crew lainnya.
16. Spesial terima kasihku buat Blessing Indisguise; "Pak Dhe" dan sejawatnya, Lazuardi, Wibi, Double "S", Anjas, Isal, Nisa, Feri"endut", Rani, Triple "R", atas kebahagiaan yang tak terkira.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Jember, Juni 2001**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

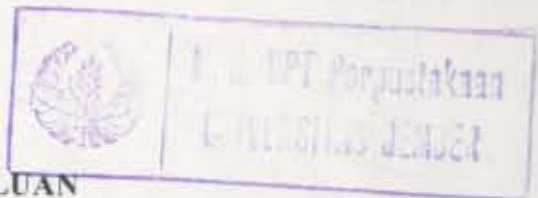
	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Alasan Pemilihan Judul .....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	6
1.3 Problematika.....	8
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	12
1.5 Hipotesa .....	20
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Tahap Pengumpulan Data.....	23
1.6.2 Metode Analisa Data.....	24
1.7 Metode Pendekatan.....	25
<b>II. GAMBARAN UMUM NEGARA ISRAEL DAN PALESTINA</b>	
2.1 Israel .....	27
2.1.1 Kondisi Umum Israel.....	27
2.1.2 Sekilas Tentang Sejarah Israel.....	28
2.1.3 Kondisi Geografis, Sosial Dan Ekonomi.....	31
2.1.4 Sistem Politik Dalam Negeri .....	34
2.1.5 Politik Luar Negeri .....	39
2.2 Palestina.....	41
2.2.1 Sejarah Singkat Palestina.....	41
2.2.2 Wilayah.....	42



2.2.3 Penduduk .....	43
<b>III. PERKEMBANGAN PROSES PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA</b>	
3.1 Latar Belakang Konflik Israel-Palestina.....	45
3.2 Masalah Perbatasan Dan Perebutan Wilayah .....	47
3.3 Proses Perdamaian Israel-Palestina .....	51
1.3.1 Peran Amerika Serikat Dalam Masalah Perdamaian Israel-Palestina.....	52
3.3.2 Perkembangan Proses Perdamaian Israel-Palestina .....	56
<b>IV. MASA DEPAN PERDAMAIAN ISRAEL - PALESTINA DIBAWAH KEPEMIMPINAN ARIEL SHARON</b>	
4.1 Kebijakan Politik Perdana Menteri Ariel Sharon Terhadap Masalah Palestina.....	62
4.1.1 Latar Belakang Politik Ariel Sharon .....	62
4.1.2 Fisi Partai Likud Terhadap Pemukiman Yahudi Di Daerah Pendudukan .....	65
4.1.3 Fisi Partai Likud Terhadap Status Kota Yerusalem .....	68
4.2 Intervensi Amerika Serikat Dalam Perdamaian Israel-Palestina.....	71
4.2.1 Kebijakan Politik Amerika Terhadap Masalah Israel-Palestina .....	71
4.2.2 Standar Ganda Amerika Serikat .....	74
4.3 Sikap Dan Pandangan Negara Arab Radikal Dan Kelompok Garis Keras Terhadap Masalah Israel-Palestina.....	77
4.3.1 Sikap Dan Pandangan Negara-Negara Arab Radikal .....	77
4.3.2 Sikap Kelompok Garis Keras .....	80
<b>V. KESIMPULAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peta Palestina dan Syiria Tahun 1915.  
Lampiran II : Peta Rencana PBB Tahun 1947.  
Lampiran III : Peta Garis Gencatan Senjata Tahun 1949.  
Lampiran IV : Peta Wilayah yang direbut Israel sejak Juni 1967.  
Lampiran V : Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 Tahun 1967.  
Lampiran VI : Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 338 Tahun 1973.  
Lampiran VII : Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 681 Tahun 1990.  
Lampiran VIII : Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 (II) Tahun 1947.  
Lampiran IX : Resolusi Majelis Umum PBB No. 194 (III) Tahun 1948.  
Lampiran X : Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/177 Tahun 1988.  
Lampiran XI : Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/68 Tahun 1990.  
Lampiran XII : Kronologi sekitar Perjanjian Oslo.  
Lampiran XIII : Deklarasi Amman.  
Lampiran XIV : Cuplikan Biografi Perdana Menteri Ariel Sharon.  
Lampiran XV : Platform Partai Buruh Israel.  
Lampiran XVI : Platform Partai Likud Israel.  
Lampiran XVII : Partai-Partai Politik dan Organisasi di Israel.  
Lampiran XVIII : Peta Perolehan Suara antara Barak dan Sharon pada Pemilu 2001.  
Lampiran XIX : Surat Pengantar Penelitian Dari Lembaga Penelitian UNEJ.  
Lampiran XX : Surat Keterangan Ijin Studi Literatur.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pergantian kepemimpinan nasional pada suatu negara adalah merupakan kebutuhan politik yang tidak mungkin dihindarkan. Suksesi kepemimpinan nasional mempunyai arti penyegaran atau pergantian unsur-unsur kepemimpinan nasional yang menyangkut jabatan Perdana Menteri dalam pemerintahan Parlemonter dan Presiden dalam pemerintahan Presidensil beserta wakil, para menteri dalam kabinet dan lembaga tinggi dan tertinggi negara lainnya. Demikian juga dengan perubahan kepemimpinan yang terjadi di Israel setelah terselenggaranya pemilihan umum pada tanggal 6 Februari 2001. Perubahan kepemimpinan yang terjadi akan mempengaruhi arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemegang tampuk kepemimpinan yang baru.

Sejak Israel merdeka pada tahun 1948, pemilihan umum yang memilih Perdana menteri secara langsung diawali pada tahun 1996. Demikian pula yang dilaksanakan pada 6 Februari 2001. Sistem baru ini mengatur pemilihan dimana secara serentak dilakukan dua pemungutan suara, yang *pertama* untuk memilih partai politik untuk mewakili para pemilih di Knesset atau parlemen dan yang *kedua* memilih perdana menteri. Sistem pemilu sebelumnya presiden Isreal menunjuk Knesset untuk tugas pembentukan pemerintahan dan pemilihan perdana menteri yang akan mengepalai pemerintahan.<sup>1</sup>

Pemilu 6 Februari 2001 yang dilaksanakan Israel dalam merebutkan kursi perdana menteri, diikuti oleh dua kandidat kuat yaitu Ehud Barak dari Partai Buruh dan Ariel Sharon dari Partai Likud (Unity)<sup>2</sup>. Pemilu ini dimenangkan oleh Ariel Sharon dari Partai Likud dengan skor 62,39 – 37,61, dengan suara yang sah untuk Sharon sejumlah 1.698.077 dan Ehud Barak sebanyak 1.023.944. (untuk peta perolehan suara lihat pada lampiran).

<sup>1</sup> Des. Riza Sihbudi dkk, *Profil Negara-Negara Timur Tengah, Buku Satu*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 108

<sup>2</sup> Encyclopedia Americana, International Edition, Grolier Incorporated, USA, 1998, hal 465

Kemenangan Sharon dari partai Likud sebagai Perdana Menteri Israel tentu saja mencemaskan banyak kalangan yang menginginkan tercapainya perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya Israel-Palestina. Pimpinan Palestina Yasser Arafat mengeluarkan pernyataan bahwa kemenangan Sharon akan menjadi "bencana yang betul-betul nyata."<sup>3</sup> Sementara para petinggi negosiator Palestina mengatakan itu sebagai jalan meyakinkan menuju perang. Kepemimpinan Sharon ini akan membuat perdamaian yang diinginkan oleh rakyat Palestina akan semakin jauh.

Dalam pentas politik di Israel, partai Likud yang memenangkan pemilu sejak pemilu 1996 dikenal sebagai partai konservatif yang bersikap konfrontatif terhadap Palestina. Partai ini memiliki dukungan kuat dari partai agama dan kaum Yahudi Ortodoks yang anti Palestina. Hal ini sangat berbeda dengan partai Buruh yang lebih bersikap lunak dan kompromistis dalam mencapai perdamaian dengan bangsa Palestina. Platform Likud pada pembukaannya membahas mengenai hak bangsa Yahudi terhadap tanah Israel sebagai hak abadi, tidak ada pihak yang boleh menyangsikan, termasuk juga hak keamanan dan perdamaian. Zionisme adalah Gerakan Kebebasan bangsa Yahudi, dan hal ini berada dalam prioritas tertinggi dari pemerintah Israel. Imigrasi akan ditingkatkan juga pembangunan pemukiman Yahudi terus dilakukan.

Ada beberapa perbedaan antara platform Partai Likud dengan Partai Buruh mengenai hal-hal berikut:

1. Perjanjian Oslo, menurut Buruh, masalah perjanjian Oslo diselesaikan selangkah demi selangkah. Sedangkan Likud mengabaikan perjanjian Oslo.
2. Pemukiman; Buruh menentang pembangunan dan perluasan wilayah pemukiman sebelum dicapainya persetujuan akhir. Likud tidak akan membangun pemukiman baru, namun Likud membenarkan perluasan pemukiman yang ada, termasuk menciptakan lingkungan baru yang seringkali melampaui batas pemukiman sekarang.

---

<sup>3</sup> Jawa Pos 20 Februari 2001

3. Wilayah dan Perbatasan; menurut Buruh status final perbatasan harus berdasarkan tiga prinsip:
  - a. Populasi dipisah antara dua juta lebih penduduk Tepi Barat dan Jalur Gaza serta negara Israel.
  - b. Penerimaan peraturan perbatasan sebelum tahun 1967 untuk mencapai keamanan Israel.
  - c. Tidak akan ada tentara asing di Tepi Barat sungai Yordan.Likud menyatakan untuk memperluas kedaulatan Israel terhadap seluruh wilayah Tepi Barat termasuk juga akan dibangun 120 lebih pemukiman Yahudi.
4. Lembah Yordan; Buruh akan membuat perbatasan keamanan Timur sungai Yordan. Sedangkan Likud menyerukan kedaulatan Israel terhadap seluruh wilayah Lembah Yordan dan membuat perbatasan politik Timur Lembah Yordan.
5. Yerusalem; Buruh dipercayakan untuk pemeliharaan Yerusalem sebagai ibukota Israel dibawah kedaulatan Israel. Penduduk Palestina di Yerusalem akan menikmati hak-haknya dan perjanjian khusus akan dibuat untuk tempat suci umat Kristen dan Islam. Likud, selain mempertahankan Yerusalem kedalam kedaulatan Israel, juga mendukung tempat tinggal Yahudi di daerah itu.
6. Ekonomi; Buruh menginginkan sistem ekonomi pasar bebas, swastanisasi secara gradual dan mengurangi keterlibatan pemerintah pada bidang ekonomi. Stabilitas sosial dan keadilan harus dijamin oleh pemerintah. Likud tetap berpendirian kepada kekuatan pasar, dan mendukung pemukiman Tepi Barat sebagai hasil pemotongan dalam anggaran pendidikan, pengurangan pelayanan sosial penting, dalam krisis sistem kesehatan dan peningkatan jumlah pengangguran serta ketidakpuasan masyarakat.

Kemenangan partai Likud atas Buruh dalam pemilihan 2001 membuat bangunan perdamaian yang telah dirintis sejak tahun 1993 akan semakin rapuh. Partai Likud sejak awal tidak setuju dengan perjanjian damai dengan Palestina. Partai Likud di bawah Netanyahu tahun 1996, menunjukkan ketidakkonsistennya terhadap kesepakatan damai yang telah ditandatangani oleh pemerintah Israel. Disamping itu

Netanyahu menunjukkan kebengalannya dengan melakukan pembangunan pemukiman Yahudi di Yerusalem.

Tampaknya Sharon akan meneruskan kebijakan-kebijakan partai Likud dalam menentang perjanjian dengan Palestina. Hal ini mengingat bahwa Sharon pada awal kepemimpinannya sudah mulai menunjukkan sikap kepala batu dengan menegaskan sikap menolak melanjutkan perundingan damai dengan Palestina yang telah dimulai lagi pada bulan Januari 2001 di wilayah Taba, Mesir. Melalui Zalman Shoval penasehat diplomatiknya, Sharon menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan terkungkung oleh persetujuan yang telah disepakati sebelumnya. Ternyata bukan hanya perundingan Taba (meskipun perundingan ini tidak menghasilkan keputusan penting seperti persetujuan-persetujuan lainnya), Shoval juga menunjuk pada perjanjian Oslo (1993), persetujuan sementara di Wye River, Amerika Serikat, serta hasil persetujuan yang ditandatangani di wilayah peristirahatan lain di Mesir, Sharm Al-Sheikh.<sup>4</sup>

Setelah melewati beberapa rintangan, antara lain dengan penolakan Barak terhadap tawaran untuk duduk sebagai Menhan dalam kabinet koalisi pimpinan Sharon, akhirnya koalisi partai Buruh dan Likud terbentuk. Menurut sejarah, koalisi kedua partai ini sudah terbentuk pada saat Perang Enam hari antara Israel dan koalisi Arab bulan Juni 1967. Buruh yang dominan sejak dideklarasikannya Israel bulan Juli 1948, berbagi kekuasaan dengan pimpinan oposisi sayap kanan, Menachem Begin. Namun Begin tidak mendapat posisi yang memberinya tanggung jawab. Pemerintahan ini berakhir pada tahun 1970, saat Israel membuat persetujuan gencatan senjata dengan Mesir. Koalisi terbentuk lagi 14 tahun kemudian, setelah partai kanan dan kiri tidak ada yang mendapatkan kursi mayoritas dan dalam pemilihan Juli 1984. Pemerintahan bersatu ini berlanjut setelah pemilihan parlemen tahun 1988, yang dimenangkan oleh partai Likud. Saat itu posisi Perdana Menteri secara fair diambilalih Yitzak Shamir, sedangkan pimpinan Buruh Yitzhak Rabin menjadi

<sup>4</sup> Sihbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*. Pustaka Hidayah, 1993, hal 79-88

Menhan. Dua tahun kemudian koalisi pecah, Buruh memilih menjadi oposisi, sebelum akhirnya kembali berkuasa tahun 1992. Koalisi partai Likud – Buruh kembali memimpin lagi setelah kemenangan Likud pada pemilu 2001.

Dalam pemerintahan koalisi persatuan pimpinan Sharon ini, Simon Perez dari Partai Buruh setuju untuk menduduki pos Menlu pada kabinet koalisi pimpinan Sharon. Pengalaman Perez masih dibutuhkan untuk meredam gejolak diplomasi Palestina dalam proses perdamaian yang berusaha untuk terus dihidupkan. Komite sentral Buruh merestui koalisi tersebut lewat voting, dengan hasil 67 persen dari 1.600 anggota komite setuju dan 33 persen menolak. Buruh dalam kabinet koalisi persatuan ini akan memperoleh posisi menteri utama seperti Menhan, Menlu, Menteri Ekonomi, Menteri Transportasi dan Iptek serta dua kedudukan menteri negara akan dipegang oleh orang-orang dari Partai Buruh.

Koalisi kali ini juga mencatat sejarah baru bagi Buruh. Sesuai hasil kesepakatan, untuk pertama kalinya, sejumlah 1.700 anggota kepengurusan Buruh akan memilih langsung menteri-menteri mereka. Sebelumnya, pos menteri itu dipilih oleh pimpinan partai.

Menurut Perez dalam posisinya sebagai Menlu, ia akan membantu mengarahkan perdamaian Perdana Menteri Sharon dengan Palestina. Bahkan menurutnya, Sharon menyetujui untuk tidak membuat permukiman Yahudi baru di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan menerima prinsip *land for peace* sebagai landasan kembali berunding dengan Palestina<sup>5</sup>. Namun masalahnya, bagi Sharon sendiri hal itu bukan janji mati yang harus ditepati.

Bagaimanapun juga, upaya perdamaian Israel – Palestina sangat tergantung pada sukses koalisi dengan partai berhaluan kiri ini. Sebab, apabila Likud berkoalisi dengan partai-partai berhaluan kanan (Yahudi Ekstrim) dan keagamaan, hampir bisa dipastikan langkah tersebut akan sangat menghambat upaya perdamaian. Hal ini juga akan terhambat oleh sikap kalangan garis keras Israel dan para pemukim Yahudi yang

---

<sup>5</sup> Jawa Pos, 28 Februari 2001

merasa keselamatan diri mereka tetap terancam oleh *intifada* Palestina bila Buruh tetap di pemerintahan.

Sementara itu Menlu Amerika Serikat Colin Powell mengadakan kunjungan ke Ramallah di Tepi Barat dan hal ini dimanfaatkan oleh pemimpin Palestina Yasser Arafat untuk meminta Amerika Serikat membantu menghentikan blokade Israel pada warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat dan Powell mendukungnya. Arafat juga menyerukan pemerintahan baru Israel di bawah Perdana Menteri Ariel Sharon untuk kembali ke meja perundingan dan Powell mengatakan sependapat, cuma dia menyerukan pula agar aksi-aksi kekerasan lawan kekerasan dihentikan. Presiden Amerika George W. Bush, akan tetap memegang peranan penting dalam proses perdamaian ini<sup>6</sup>. Dalam hal ini peranan Amerika Serikat masih tetap sangat penting dalam proses perdamaian di Timur Tengah.

Walaupun tampaknya perundingan antara Israel-Palestina mengalami hambatan dan berjalan sangat lambat, terlebih lagi Israel dibawah pimpinan Ariel Sharon dari partai Likud yang notabene sebagai kelompok garis keras dan ingin mengusir orang Arab. Namun proses perundingan damai antara Israel-Palestina masih tetap dibuka kendati masih banyak terjadi berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Melihat fenomena ini penulis ingin mengkaji mengenai prospek perdamaian Israel-Palestina, setelah Ariel Sharon berhasil duduk di kursi Perdana Menteri Israel, dengan judul :

**“Prospek Perdamaian Israel-Palestina Era PM Israel Ariel Sharon”**

## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup pembahasan merupakan hal yang sangat penting di dalam penulisan karya ilmiah yang dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah dalam menganalisa permasalahan secara seksama, terarah dan sistematis dalam kurun waktu tertentu. Selain itu pembatasan masalah dimaksudkan

---

<sup>6</sup> Jawa Pos 6 Februari 2001



untuk menghindari kekaburan arti dan pembahasan yang telalu meluas, mengambang dan melampaui batas sehingga mengakibatkan berkurangnya bobot ilmiah suatu penulisan.

Kartini Kartono memberikan penjelasan yang lain tentang pembatasan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

**“Pembatasan masalah sangat berkaitan dengan lima waktu, perongkosan, sempitnya waktu, terbatasnya tenaga dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interrelasi permasalahan”.**<sup>6</sup>

Berdasarkan pada tujuan diatas, maka dalam karya tulis ini pembatasan yang akan penulis berikan terdiri dari : (1) Pembatasan materi; (2) pembatasan waktu. Pada pembatasan materi dalam penulisan ini, adalah memfokuskan pada perjalanan perjanjian damai antara Israel-Palestina yang masih mengambang dan belum bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah terjadi setengah abad lebih, serta prospek perdamaian antara kedua negara dengan naiknya Areal Sharon sebagai Perdana Menteri Israel setelah partai Likud memenangkan pemilu 6 Februari 2001. Tampilnya Sharon dalam tampuk kekuasaan Israel menimbulkan kekhawatiran akan terhentinya proses perdamaian mengingat Ariel Sharon dalam perjalanan politiknya sering memilih jalan kekerasan dalam hal penyelesaian masalah Palestina. Pada masa kampanye, Sharon menyatakan akan menentang setiap upaya pembongkaran terhadap pemukiman Yahudi. Apalagi, hal ini akan membawa dampak ekonomi besar kedua sisi karena 120.000 pekerja Palestina bekerja di Israel. Hal ini dapat dimengerti karena Partai Likud secara ideologi berdiri atas dua pilar, yaitu keamanan kukuh dan penguasaan tanah bibikal. Ideologi Likud menganggap bahwa Tepi Barat – yang disebut Yudea dan Samaria – adalah sebagai tanah pemberian Tuhan bagi bangsa Israel. Tepi Barat adalah wilayah berbukit yang cukup strategis bagi Israel dari segi militer, sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada Palestina.

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, CV. Rajawali Pers, Jakarta hal 55

Peranan Amerika Serikat yang diharapkan bisa berlaku adil dalam menjembatani proses perdamaian Israel-Palestina belum bisa diharapkan sepenuhnya. Keberpihakan Amerika Serikat disebabkan oleh keterikatan nilai-nilai kultural dan keagamaan berdasarkan etika Yahudi-Kristiani dan sistem politik pluralistik Amerika Serikat yang memungkinkan lobby Yahudi menjadi sangat kuat sehingga mampu mendikte kebijakan Washington di Timur-Tengah. Disamping itu Amerika Serikat sebagai negara kapitalis masih mengidap penyakit imperialisme, sehingga politik Amerika Serikat secara intrinsik memusuhi pihak Arab dan menjagokan Israel sebagai ujung tombak imperialisme di kawasan Timur Tengah.

Sedangkan batasan waktu adalah waktu terjadinya sebuah peristiwa atau obyek yang akan dianalisis. Dalam tulisan ini penulis memberikan batasan waktu sejak terpilihnya Ariel Sharon pada Pemilu Februari 2001 ke puncak kekuasaan dalam struktur politik Israel sampai sekarang.

### 1.3 Problematika

Problematika atau permasalahan adalah hal yang mendasar yang harus diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah. Mengetahui permasalahan akan memberikan kepada kita arah di dalam setiap penelitian dan membuat kita mudah di dalam memfokuskan suatu topik permasalahan di dalam penulisan serta membuat kita mampu untuk mencari dan menyarankan suatu penyelesaian di dalam setiap permasalahan yang sedang kita hadapai dan berusaha kita pecahkan.

Sebelum penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan definisi dari masalah. Prof. DR. Winarno Surachmad mendefinisikan masalah sebagai berikut :

**“Problematika adalah pemisahan dari pada kompleksitas kesulitan-kesulitan dan kebutuhan yang dijumpai oleh pikiran yang bekerja di dalam suatu situasi”.**<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Metode Research*, PN Alumni, Bandung, 1976 hal 77

Sementara itu Suharsimi Arikunto di dalam buku *"Problematika Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik"* mendefinisikan problematika penelitian sebagai berikut :

**"Problematika penelitian adalah bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian. Di dalam problematika ini, peneliti mengajukan pertanyaan tentang persoalan terhadap dirinya berkaitan dengan hal-hal yang akan dicari jawaban melalui kegiatan penelitian".<sup>9</sup>**

Berdasarkan pada pendapat-pendapat diatas, maka diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masalah atau problematika adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapai dalam situasi tertentu dan selanjutnya menuntut kita untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar. Ketika kita hadapi menghadapi suatu masalah maka kita juga ingin mengetahui secara mendalam.

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Damai Israel-Palestina pada September 1993 di Washington telah terjadi perubahan secara gradual khususnya pada rentang waktu 1993 sampai 1995, dimana Partai Buruh berkuasa. Selama Partai Buruh Berkuasa (1992-1996) telah disepakati beberapa hal penting menyangkut proses damai dengan Palestina. Kesepakatan Oslo I dan II adalah merupakan output kebijakan Israel dibawah Partai Buruh. Kesepakatan Oslo I yang meliputi penarikan mundur pasukan dari Jalur Gaza dan Jericho, pembentukan pemerintahan otonomi Palestina yang dilanjutkan dengan pemilihan umum Palestina sudah dapat dilaksanakan. Sementara itu kesepakatan Oslo II yang telah disepakati di Tabah pada tahun 1995 sampai berakhirnya kepemimpinan Partai Buruh belum secara penuh dilaksanakan. Hal ini akibat aksi pemboman oleh kelompok radikal Hamas yang menewaskan warga sipil Israel sebanyak 150 jiwa pada bulan Maret 1996, sehingga menimbulkan reaksi negatif dari Israel yaitu penundaan pelaksanaan kesepakatan Oslo II.

Kesepakatan Oslo II yang meliputi penarikan mundur pasukan Israel dari kota Hebron dan membebaskan semua tawanan Palestina dari penjara Israel serta membuka jalan aman antara Jalur Gaza dan Tepi Barat baru direalisasikan pada bulan

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1977 hal. 47

Januari 1997 di bawah kepemimpinan partai Likud. Kesepakatan Oslo II yang pelaksanaannya terlambat selama 16 bulan membuktikan ketidaksiapan Israel dalam memegang komitmen damai dengan Palestina. Kebijakan Partai Likud dalam menarik pasukan dari Hebron adalah merupakan sikap mengalah karena dipaksa oleh keadaan. Kesepakatan Oslo adalah perjanjian internasional yang mempunyai kekuatan hukum. Pelecehannya hanya akan kontraproduktif bagi kepentingan Israel sendiri. Hal ini karena Israel akan menghadapi dua musuh sekaligus, musuh dari dalam beberapa tekanan pendukung perdamaian dari tekanan luar yang datang dari negara-negara Arab, Uni Eropa bahkan Amerika Serikat.

Sementara itu Amerika Serikat yang diharapkan menjadi moderator terpercaya dan mitra sejati dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina mulai diragukan. Amerika Serikat telah dua kali menggunakan hak vetonya untuk menggugurkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berasal dari masyarakat internasional. Pertama, ketika pemilihan Boutros-Boutros Ghali sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan kedua. Kedua, tatkala Uni Eropa mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengancam pembangunan 6.500 unit rumah untuk pemukiman Yahudi di Har Hona. Veto Amerika Serikat tersebut mengejutkan opini dunia karena dinilai kontroversial dan mencerminkan sikap tanpa kompromi. Veto Amerika Serikat juga pertanda bahaya serius karena merupakan kemunduran sikap tradisi Amerika Serikat berkaitan dengan proyek pemukiman Yahudi.

Dari kenyataan tersebut, bisa ditarik kesimpulan. Pertama, pemerintah Amerika Serikat semakin tidak mampu melepaskan diri dari kebijakan keperpihakannya kepada Israel. Kedua, pemerintah Amerika Serikat terperangkap oleh strategi Israel dalam proses perdamaian sejak Konferensi Madrid 1991. Akibatnya tidak sedikit tokoh-tokoh Arab, seperti Yasser Arafat, Wakil Presiden Suriah Abdul Khalim Khadam dan Hanan Ashrawi secara terbuka menuduh Amerika Serikat telah memihak dan tidak lagi murni sebagai mediator perdamaian.

Naiknya Sharon sebagai Perdana Menteri setelah memenangkan pemilu Februari 2001, yang kemudian segera membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Buruh, belum bisa menurunkan kekhawatiran banyak kalangan tentang perdamaian Timur Tengah. Macetnya perundingan sebagai reaksi protes atas koalisi itu plus aksi-aksi kekerasan masih saja berlangsung, mengancam pemerintahan Otorita Palestina (PA). Aksi blokade ekonomi Israel ke Gaza dan Tepi Barat, di wilayah Otorita Palestina akan memperpuruk PA. Tidak ada sumber pemasukan, baik keuangan maupun kebutuhan lain. Krisis keuangan dan fiskal di tubuh PA sudah semakin parah dan kemungkinan akan ambruk dalam waktu dekat.

Kini, mimpi melihat Palestina menjadi sebuah negara merdeka seperti yang dicita-citakan pun semakin jauh. Untuk dapat bertahan saja, setiap bulan PA butuh dana sekitar USD 50 juta, guna menghidupi institusi-institusi pemerintahannya<sup>10</sup>. Kelanjutan perdamaian sejauh ini yang menjadi satu-satunya rumus penolong Palestina. Namun dengan Likud dan Buruh bersatu dibawah pimpinan Ariel Sharon, kemungkinan Palestina bisa mendapatkan hak-haknya akan makin kecil dibandingkan perundingan-perundingan sebelumnya.

Sementara Yasser Ar. fat sekaligus pimpinan gerakan Fatah beserta kelompok perlawanan lainnya menyerukan intifada dan harus terus dilakukan disela-sela pembicaraan damai.

Dari uraian diatas, permasalahan yang terjadi pada konflik Israel-Palestina sangat kompleks. Untuk itu penulis menetapkan problematika yang lebih sederhana yaitu

**“Bagaimana prospek perdamaian Israel-Palestina dengan naiknya Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel?”**

---

<sup>10</sup> Jawa Pos 18 Februari 2001

#### 1.4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori sangat diperlukan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan tepat. Kerangka dasar teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum yang menginformasikan kepada kita untuk mengetahui bahwa suatu itu terjadi dan kapan dapat diprediksikan suatu hal itu akan terjadi. Disamping kerangka dasar teori merupakan alat eksplanasi terhadap permasalahan yang sering terjadi, kerangka dasar teori juga merupakan konsepsi abstrak yang ditempuh pada masalah-masalah khusus yang diperlukan sebagai pisau analisis terhadap masalah yang sedang dihadapi, sehingga kita mendapatkan solusi-solusi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Seperti halnya pada pengkajian masalah-masalah yang lain, pengkajian terhadap masalah ini juga memerlukan teori yang berperan sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh Charles A. Mc. Clelland berikut ini :

**“Bahwa teori memberikan pengarahannya, yang menentukan jenis-jenis tindakan yang harus dilakukan dalam hubungan internasional, kebiasaan teori yang demikian akan menghasilkan penentuan aturan permainan yang tepat. Teori lalu menjadi seperangkat jawaban.”<sup>11</sup>**

Dalam menghadapi suatu permasalahan, Charles A. Mc. Clelland juga memberikan pengertian teori sebagai berikut :

**“(1) Teori merupakan rangka dasar untuk mengatur fakta-fakta; (2) Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan; (3) Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan seperangkat pertanyaan mengenai seperangkat keadaan yang diharapkan; (4) teori merupakan pikiran-pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dunia nyata; (5) teori merupakan abstraksi.”<sup>12</sup>**

Secara spesifik Mc Cain dan Seagal memberikan definisi yang lebih bahwa teori adalah :

**“Serangkaian statemen yang saling berkaitan..... (yang terdiri dari) (1) Kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar itu; (2) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa konsep-konsep statemen teoritis itu dengan**

<sup>11</sup> Charles A. Mc. Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional : Sistem dan Teori*, CV Rajawali Pers, Jakarta, 1971 hal 5

<sup>12</sup> Ibid, hal 10

**sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa).<sup>13</sup>**

Suatu teori, menurut Hanson<sup>14</sup> seorang filosof ilmu alam, harus mampu memberikan suatu pola konseptual yang dapat dipahami dan sistematis, untuk data pengamatan, hasil nilai dan pola semacam ini terletak pada kemampuan menyatakan fenomena, yang tanpa suatu teori terasa ganjil, mengherankan atau sama sekali tidak diperhatikan. Jadi teori bukan hanya sekedar diskripsi, tetapi juga suatu analisis, seperangkat prinsip atau pola-pola yang paling tidak membantu dalam menjelaskan suatu fenomena.

Bahwa dalam memahami suatu fenomena diperlukan konseptualisasi dan teorisasi sebagai kerangka analisis, maka disamping teorisasi yang tepat, penulis akan melakukan konseptualisasi. Jadi dalam rangka memahami fenomena ini, kita perlu merumuskan konsep yang dapat dipakai untuk menuntun kita dalam melakukan generalisasi abstrak, sebagaimana dikatakan oleh Mokhtar Mas' oed :

**“Suatu konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu, jadi konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan”.**<sup>15</sup>

Berangkat dari pentingnya kerangka teori dan konsep, maka dalam penulisan skripsi ini untuk meneliti dan menganalisa kebijakan yang ditempuh Israel di bawah pimpinan Ariel Sharon dikaitkan dengan prospek perdamaian Israel-Palestina, penulis menggunakan teori *decision making*, dan konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Sehingga kemana arah perdamaian antara Israel-Palestina akan dapat diprediksikan. Sementara itu di dalam menganalisa campur tangan Amerika Serikat penulis lebih memfokuskan pada kepentingan nasional Amerika Serikat secara global di Timur Tengah. Begitu pula

<sup>13</sup> Garvin Mc Cain dan Erwin Seagal, *The Game of Science (Brokes'cole 1973)* hal 99 dalam Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 1990, hal 219

<sup>14</sup> Nowood Hanson, *The Concept of The Position*, dalam S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Rajawali Press, Jakarta 1982, hal 99

dalam menganalisa negara-negara Arab radikal yang menolak setiap kompromi dengan Israel, penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional yang didasarkan pada aspek ideologi sebagai bingkai kerangka analisisnya.

Untuk menjelaskan secara rinci dan spesifik kerangka teori penelitian yang penulis lakukan, maka pendefinisian *decision making* dan konsep kepentingan nasional akan diambilkan dari berbagai sumber guna mengokohkan dan memberikan analisis yang tajam terhadap permasalahan yang penulis ajukan.

Keputusan suatu negara untuk melakukan tindakan-tindakan -- apakah itu berhubungan dengan lingkungan internasional atau eksternal-- sangat dipengaruhi oleh *national interest* negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan negara adalah sebuah entitas politik terorganisasi yang mampu mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan, seperti, pertama mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan lingkungan internasional dan eksternalnya, kedua, kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber daya untuk menjalankan keputusan yang telah diambil, dan ketiga, aplikasi instrumen dan teknik untuk mendukung keputusan.

Menurut H.J. Morgenthau<sup>15</sup>, seorang ahli ilmu politik, syarat minimum suatu negara untuk melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara lain. Jika definisi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan yang lebih spesifik, maka membela atau melindungi identitas fisik sama dengan memelihara identitas wilayah suatu negara. Melindungi identitas politik sama dengan melindungi eksistensi rezim politik dan melindungi identitas kultural sama dengan melindungi etnis, agama, bangsa dan norma-norma sejarah.

Makna yang tersirat dan inheren dalam konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Morgenthau adalah kelangsungan hidup. Dengan demikian konsep kepentingan nasional sebagai alat tindakan politik dapat menjadi dasar pembenaar suatu tindakan, memperjelas atau mengajukan alternatif kebijakan yang ditempuh. Selain itu konsep kepentingan nasional juga dapat digunakan untuk menguraikan,

---

<sup>15</sup> Mokhtar Mas'oed, Op Cit, hal 93-94



menjelaskan atau menentukan sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Hal ini yang dikemukakan oleh James N. Rosnou;

**“The concept of National Interest is used in both political analysis and political action. As analitic tool, it is employed to describe, explain or evaluate the source of the adequacy of a Nations Foreign Policy, as an intrument of political action, it serves as a mean of justifying, denouncing of proposing policies”<sup>16</sup>**

Secara umum konsep kepentingan nasional yang meliputi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan dan militer serta kesejahteraan ekonomi mendominasi secara tunggal dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian kepentingan nasional negara tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuatan keputusan pada tingkat negara. Dan lebih lanjut mengenai pembuatan keputusan atau *decision making*, Richard C. Synder mendefinisikan sebagai berikut :

**“Sebuah proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara sosial, pemilihan sasaran-sasaran alternatif yang diterangkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh pembuat keputusan”<sup>17</sup>**

Sedangkan menurut Abdul Said dan Charles Larche adalah :

**“Merupakan teori tentang pengambilan keputusan dimana pengambilan keputusan ini dilatarbelakangi oleh faktor politik, sosial, ekonomi dan lain-lain”<sup>18</sup>**

Adapun maksud utama penelaahan proses *decision making* adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimana proses keputusan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. Dalam hal ini menyangkut pula apakah proses pembuatan keputusan yang berbeda akan membuahkan hasil keputusan yang berbeda pula.

<sup>16</sup> James N. Rosnou, *The Study of Foreign Policy*, The Free Press, New York, 1971, hal 233

<sup>17</sup> Richard C. Synder, *Foreign Policy Making : an Approach to Study International Politics*, New York, The Free Press, 1962

<sup>18</sup> Abdul Said and Charles Larche, *Concept of International Politics*, Englewood, Cliff Prentice, Hall New York, 1963, hal 90

Dan menurut James Dougherty dan Robert L. Pfalzgraf Jr. *decision making* meliputi :

**“The study of how decision supposedly are actually made and Technique and creteria for the taking of decision by makers executive as achieve prescribed goal”**<sup>19</sup>

Jadi teori pembuatan keputusan yang diajukan oleh Dougherty dan Pfalzgraf mencakup studi bagaimana suatu keputusan diduga benar-benar dibuat oleh para pembuat keputusan dan para eksekutif negara untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian esensi dari setiap pembuatan keputusan adalah pemilihan diantara berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan hidup suatu bangsa.<sup>20</sup>

Keterlibatan partai politik sebagai unit analisa utama dalam proses pembuatan keputusan harus ditinjau dari perspektif tingkat analisa. Dengan demikian dalam menentukan latar belakang suatu keputusan penulis harus menggunakan tingkat analisa yang relevan seperti diungkap oleh David Singer bahwa dalam setiap kegiatan keilmuan selalu terdapat berbagai cara memilah-milah dan mengatur fenomena yang dipelajari demi analisis yang sistematis.<sup>21</sup>

Karena pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan, maka penulis perlu memperjelas teori mengenai kebijaksan tersebut. Thomas Dye memberikan batasan kebijakan sebagai berikut “ ..... apa saja yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah.”<sup>22</sup> Sedangkan Richard Hoggerberg mendefinisikan kebijakan sebagai berikut “ ... Produk yang kelihatan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh yang mendekatkan diri dengan cita-cita masyarakat.”<sup>23</sup> James Anderson mengemukakan definisi yang sangat jelas maknanya yaitu : “suatu

<sup>19</sup> James E Dougherty and Robert L. Pfalzgraf, *Contending Theory of International Relations A Comprehensive Survey*, New York, Horper and Row Publisher, 1971.

<sup>20</sup> Abu Bakar Ebyhara, *Decision Making Theories, Dalam Studi Hubungan Internasional*, dalam Jurnal Ilmu Politik 9 Gramedia, Jakarta, 1991.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>22</sup> Thomas Dye R, *Understanding Public Policy*, Edisi III Engle Wood Cliffs, New Jersey, 1978, hal 3

<sup>23</sup> Richard Hoggerberg, *The Study of Public Policy*, Indiana Polis, 1979, hal 3

pola tingkah laku yang terarah pada tujuan dan diikuti oleh seorang atau beberapa orang dalam menangani suatu masalah.”<sup>24</sup>

Guna mendapatkan analisa yang tepat, penulis menggunakan analisa kelompok. Dalam hal ini tindakan seorang pembuat keputusan yang terafiliasi dalam suatu kelompok atau partai politik diletakkan dan diidentikkan dengan tindakan kelompok. Ide tentang identifikasi sejalan dengan ide tentang afiliasi terhadap kelompok. Individu akan mengidentifikasikan diri dengan kelompok, memberikan loyalitas kepada kelompok tersebut dan bertindak untuk memelihara sifat, ciri dan kelangsungan kelompok itu. Identifikasi terhadap kelompok ini mulai dari organisasi yang paling kecil sampai taraf negara bangsa. Menurut Risset dan Starr bentuk dari nasionalisme dapat dipandang sebagai kesadaran kelompok yang paling besar yang pernah terbentuk, dimana orang-orang dengan suka rela mengidentifikasikan diri dan bertindak sesuai dengan tujuan negara. Setiap pembuatan keputusan karena itu selalu mengikuti arah tertentu seperti keamanan nasional atau untuk mewujudkan kepentingan integritas negara, kesejahteraan dan kemajuan yang sering disebut konsep kepentingan nasional.<sup>25</sup> Selanjutnya Ebyhura mengatakan kebutuhan para pembuat keputusan merupakan kebutuhan untuk memenuhi peran yang diletakkan pada mereka atau kebutuhan yang sesuai dengan kepentingan organisasi. Kebutuhan untuk setiap ada peran diperlihatkan pula dalam proposisi bahwa, posisi organisasi menentukan pendirian atau tentang kebijakan, dan dikenal dengan istilah; dimana kan berdiri, bergantung pada dimana duduk.

Sedangkan dalam menganalisa kelompok-kelompok anti perdamaian, penulis menggunakan teori kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan oleh Gabriel Almond<sup>26</sup> didefinisikan sebagai organisasi yang berusaha mempengaruhi

<sup>24</sup> James Anderson, *Public Policy Making*, Holt, Rinehart dan Winston, New York, 1979 hal 4

<sup>25</sup> Ibid, hal 9

<sup>26</sup> Gabriel Almond, *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik* dalam Mochtar Mas'ood dan Collin Mac Anderson, Gajah Mada University Press, 1986, hal 53

kebijaksanaan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan muncul sebagai akibat dari keputusan politik pemerintah yang berkuasa yang mengecewakan segolongan orang. Ketidakpuasan tersebut menimbulkan tuntutan untuk merubah suatu tatanan formal -- bila dilakukan secara revolusioner -- dan kelompok kepentingan yang terorganisir dengan perencanaan yang teliti akan mengartikulasikan kepentingan dengan caranya sendiri guna memperoleh kompromi dengan kekuasaan.<sup>27</sup>

Graham T. Allison<sup>28</sup> mengajukan tiga model untuk mendiskripsikan pembuatan keputusan politik luar negeri:

*Model I: Aktor Rasional* : dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa. Dalam model ini para pembuat keputusan dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan luar negeri dibuat secara rasional.

*Model II : Proses Organisasi* : model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan luar negeri bukan semata-mata proses intelektual, tetapi lebih merupakan proses mekanis. Yaitu pembuatan keputusan dilakukan secara mekanik merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu.

*Model III: Politik Birokratik* : dalam model ini politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dari sasaran

<sup>27</sup> Loc Cit

<sup>28</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 234

secara rasional. Politik luar negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi. Ini melibatkan proses tawar-menawar (*bergaining games*) di antara pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri adalah proses sosial, bukan proses intelektual.

Dengan pijakan konsep dan teori diatas, penulis mencoba menganalisa proses perdamaian Israel-Palestina dengan berkuasanya Ariel Sharon dan proses pengambilan keputusan sesuai dengan model I, yaitu Aktor Rasional karena penulis akan membahas mengenai kebijakan yang diambil oleh Sharon dalam konflik Israel-Palestina. Kebijakan Israel yang mendasarkan pada kepentingan nasional secara kukuh, dengan tidak menghiraukan prinsip-prinsip moral universal adalah hal yang menghambat terciptanya perdamaian Israel-Palestina. Sudah menjadi kewajaran /rasional apabila suatu negara berusaha seoptimal mungkin dalam mempertahankan integritas wilayahnya. Begitu pula Israel yang mempertahankan teritorialnya demi ketahanan nasional Israel.

Sementara keterlibatan Amerika Serikat, kebijakan yang diambil oleh para pembuat keputusan yang didasari oleh kepentingan ekonomi membela suatu strateginya, selalu berusaha untuk mempertahankan titik kerawanan atau pusat konflik, kebijakan ini dimaksudkan agar pelaksanaan kepentingannya di Timur Tengah dapat berjalan dengan baik. Sebagai ilustrasi dalam Perang Teluk II, Amerika Serikat sangat diuntungkan, karena perang ini membuat peran Amerika Serikat di Timur Tengah semakin dominan dan ketergantungan negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat juga semakin tinggi. Disamping itu Amerika Serikat juga tidak mengeluarkan biaya perang karena seluruh biaya perang ditanggung oleh Kuwait, Arab Saudi, UEA, Jepang, Jerman dan Korea Selatan. Amerika Serikat juga mendapatkan pangkalan militer di Dharan yang dengan sendirinya akan mempermudah Amerika Serikat untuk membantu Israel di Timur Tengah. Dengan demikian keterlibatan Amerika Serikat dalam proses perundingan damai Timur

Tengah adalah sebatas pada pencapaian tujuan politik luar negerinya dan memperkokoh pengaruhnya di kawasan ini.

Disamping itu pihak Arab masih terdapat kantong-kantong tertentu yang menyulitkan tercapainya perdamaian. Terutama negara-negara Arab radikal dan kelompok-kelompok radikal seperti Hamas, Jihad Islam, Fatah-Intifada dan kelompok lain -- kelompok penentang formula Gaza-Jerico yang juga disebut "*The Damascus Ten*" karena sesudah ditandatangani Deklarasi Prinsip, mereka mengadakan pertemuan di Damaskus untuk mendongkel kepemimpinan Arafat -- yang menolak setiap kompromi dengan Israel. Bagi negara-negara Arab radikal, penolakan terhadap perdamaian Israel-PLO didasarkan pada kepentingan ideologis, yaitu religi disamping ketidakpercayaan terhadap Israel yang sudah seringkali mengkhianati kesepakatan yang telah dicapai. Sementara bagi kelompok kepentingan seperti Hamas, lebih didasarkan pada tuntutan untuk menenyapkan Israel dan mengembalikan tanah milik bangsa Palestina secara keseluruhan.

### 1.5 Hipotesa

Suatu keharusan yang harus dipegang oleh peneliti karya ilmiah adalah suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Seperti yang telah dikemukakan oleh Melly G. Tan bahwa hipotesa merupakan pernyataan tentang adanya variabel yang digunakan dan bersifat sementara.<sup>29</sup>

Selanjutnya WJS Poerwodarminto berpendapat bahwa hipotesa adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meski kebenarannya belum dibuktikan.<sup>30</sup> Sementara itu Sutrisno Hadi memberikan definisi yang lebih jelas yaitu :

**"Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah atau mungkin dapat dipegang sebagai kesimpulan yang bersifat sementara,**

<sup>29</sup> Melly G. Tan, *Metode dan Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, hal 41

<sup>30</sup> WJS Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 176, hal 76

**penolakan atau penerimaan hipotesis sangat bergantung kepada hasil penyelidikan terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan.”<sup>31</sup>**

Hipotesa dilakukan sebagai usaha untuk menentukan alternatif yang mendekati kebenaran dari berbagai dugaan yang ada. Dan kebenaran suatu hipotesa memerlukan pembuktian lagi.

Terpilihnya Ariel Sharon dari Partai Likud sebagai Perdana Menteri baru Israel sangat mencemaskan banyak pihak yang menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Likud dikenal sebagai partai konservatif yang bersifat konfrontatif terhadap Palestina. Partai ini memiliki dukungan dari partai agama dan kaum Yahudi Ortodoks yang sangat anti Palestina. Yang agak sedikit melegakan adalah Sharon membentuk pemerintahan koalisi dengan partai berhaluan kiri (Buruh), sebab bila Likud berkoalisi dengan partai-partai berhaluan kanan (Yahudi ekstrim dan keagamaan) hampir dapat dipastikan langkah tersebut dapat menghambat upaya perdamaian.

Sharon, selain berlatar belakang partai Likud, juga dikenal sebagai tokoh radikal yang berdarah dingin yang tidak segan-segan membantai warga Palestina demi tujuan zionisme. Catatan Sharon selama ini telah meninggalkan kenangan hitam bagi warga Palestina.

Pada tahun 1948, Sharon ikut membantai sekitar 360 warga Palestina di desa Deir Yasin. Lima tahun kemudian, dia memimpin unit 101 dan membantai 166 warga Palestina. Juga merusakkan puluhan rumah dan masjid. Dan paling parah tahun 1982, Sharon memimpin invasi ke Lebanon Selatan yang mengakibatkan tewasnya ribuan pengungsi Palestina di Sabra dan Satifa. Di akhir tahun 2000, dia memicu pertikaian warga Yahudi dengan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza karena kunjungannya ke kompleks Al-Aqsa yang menewaskan sekitar 400 warga Palestina, 13 warga Arab Israel.<sup>32</sup>

Dengan berbagai kejadian di atas serta latar belakang Sharon, maka sulit dipercaya bila dia bisa membawa arah baru bagi proses perdamaian antara Israel dan

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, hal 63

<sup>32</sup> Jawa Pos 4 Februari 2001

Palestina. Apalagi dalam program kampanyenya tentang perdamaian dengan Palestina, dia hanya menjanjikan hanya 42% tanah Tepi Barat dan Jalur Gaza bagi Palestina, padahal seperti yang telah diketahui oleh dunia internasional, wilayah tersebut milik Palestina yang dicaplok Israel pada tahun 1967. Hal ini tentu saja melukai perasaan bangsa Palestina dan jelas-jelas merupakan kemunduran dari kesepakatan damai yang telah dicapai kedua belah pihak di Oslo pada tahun 1993. Mengenai prinsip *Land for Peace*.

Untuk mengkaji permasalahan di atas, penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

“Dengan terpilihnya Sharon sebagai Perdana Menteri Israeli, prospek perdamaian antara Israel – Palestina dirasa akan semakin jauh. Setidaknya ada tiga hal yang membuat perdamaian kedua negara sulit terwujud. Pertama, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon berasal dari partai Likud yang bergaris politik keras dan lebih senang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi masalah dengan Palestina, juga sikap represif Israel dan keengganan Israel untuk mentaati hasil-hasil perundingan dengan Palestina. Kedua, standar ganda Amerika, disatu pihak Amerika memprakarsai perundingan damai antara Israel-Palestina, namun dipihak lain memilih diam ketika Israel membuat ulah. Ketiga, sikap kelompok-kelompok garis keras Palestina yang akan terus melawan Israel selama Israel tidak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati. Maka akan sulit tercapai perdamaian selama kedua pihak tetap pada pendiriannya.”

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian karya ilmiah, diperlukan adanya penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau menerangkan fenomena. Untuk memahami suatu fenomena, seorang peneliti juga harus menghubungkan fenomena



yang satu dengan yang lainnya, yang untuk itu diperlukan data-data yang selanjutnya akan dianalisis.

Agar penelitian dapat terarah dan mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan, diperlukan metode yang tepat. The Liang Gie menjelaskan sebagai berikut :

**“Cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedang pada ujung akhirnya merupakan suatu cara langkah untuk memeriksa kebenaran dari pada pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut.”<sup>33</sup>**

### 1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan karya tulis ini penulis melakukan penelitian tidak langsung yang berarti bahwa data hasil pengamatan terhadap obyek yang diteliti, dikumpulkan melalui jurnal-jurnal, buku-buku terbitan, artikel atau buletin dan pemberitaan oleh media massa. Data yang berhasil dikumpulkan menjadi sifat tidak langsung.

Dengan demikian, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (**Library Research**) dan studi literatur. Walaupun merupakan **data skunder**, namun penulis berusaha untuk mengumpulkan data dari sumber aslinya. Ini dikarenakan upaya untuk mendapatkan **data langsung (primer)** terbentur pada masalah letak geografis yang cukup jauh, masalah bahasa dan biaya untuk menjangkau lapangan yang diteliti (Timur Tengah). Adapun penelitian kepustakaan ini telah penulis lakukan di :

1. Perpustakaan FISIP-Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Perpustakaan FISIP-Universitas Gajah Mada Yogyakarta

### 1.6.2 Metode Analisis data

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara **berfikir reflektif**, yaitu dengan mengkombinasikan metode berfikir **deduktif** dan **induktif**. Menurut Marzuki, metode berfikir reflektif adalah :

**“Mulai dengan induktif untuk menunjukkan persoalan atau menetapkan hipotesa kemudian diikuti dengan deduktif guna meletakkan kerangka atau jalan untuk membuktikan hipotesa yang dibuatnya itu. Selanjutnya hipotesa perlu diuji kebenarannya dengan induksi sehingga diperoleh pemecahan yang konklusif.”**<sup>33</sup>

Metode induktif adalah cara berfikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dirumuskan dalam suatu rumusan umum.

Dalam hal ini, penulis menggunakan cara berfikir induktif untuk menetapkan garis besar permasalahan dan hipotesa untuk memudahkan dalam menganalisa fenomena tersebut.

Metode yang selanjutnya dipakai adalah **deduktif**, berangkat dari hal-hal yang umum terlebih dahulu barulah kemudian menuju kepada hal-hal yang khusus. Garis besar permasalahan dan hipotesa yang telah penulis ajukan adalah hal umum yang selanjutnya akan penulis jabarkan ke hal-hal yang khusus untuk dapat lebih memahami fenomenanya.

Barulah setelah hal-hal yang berhasil dijabarkan tadi teruji kebenarannya, maka penulis kembali menggunakan cara berfikir induktif untuk menentukan kesimpulan atas fenomena yang diamati.

Untuk mendapatkan hipotesa yang memadai dan sesuai dengan harapan, penulis memperhatikan beberapa hal (kejadian-kejadian maupun peristiwa-peristiwa) yang meliputi perjalanan perjanjian damai antara Israel-Palestina. Tekanannya adalah pada prospek perdamaian kedua negara, mengapa proses perdamaian berjalan sangat

<sup>33</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1979, hal 73

<sup>34</sup> Marzuki, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hal 21

lambat dan bagaimana kelanjutan perdamaian Israel-Palestina dibawah pemerintahan Ariel Sharon.

### 1.7 Metode Pendekatan

Dalam usaha untuk mempertajam analisa, diperlukan suatu pendekatan atau approach yang membuat peneitian menjadi spesifik. Pendekatan akan semakin jelas dari sudut mana kita memandang suatu permasalahan. Pendekatan menurut Liang Gie adalah :

**“Keseluruhan rangkaian sikap penyelidikan, sudut pandangan, ukuran pangka! duga, dan kerangka dasar pemikiran dari suatu ilmu. Jadi pendekatan merupakan keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran, memasuki suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.”<sup>35</sup>**

Pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran bidang ilmu pengetahuan secara teratur dan sistematis. Dalam penulisan ini penulis menggunakan **pendekatan sejarah-politik (political-historis approach) dan pendekatan personaliti (personality approach).**

Political historis merupakan suatu pendekatan yang melihat ataupun memahami gejala-gejala politik yang muncul dengan berdasar pada proses sejarahnya. Pemahaman terhadap suatu kejadian atau fenomena akan lebih mudah, apabila kita mengetahui latar belakang ataupun kejadian-kejadian yang mendahului timbulnya fenomena tersebut. Eisemann memberikan perumusan mengenai *political-history*, bahwa *political history* adalah suatu deskripsi kronologis dari kenyataan politik berbagai hal, baik itu bersifat institusional maupun non institusional dalam kehidupan suatu negara (atau sosial politik) dalam pertimbangan kebijakan dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan negara lain/politik luar negeri atau kebijakan internasional.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> The Liang Gie. Op Cit. Hal 49

<sup>36</sup> Ibid, Hal 87

Politik dan sejarah memiliki kegiatan yang sangat erat, keduanya saling mempengaruhi dan melengkapi untuk perkembangan kedua unsur tersebut. Segala peristiwa politik dipengaruhi proyeksi sejarah baik dalam hubungan dengan sejarah masa kini menuju masa depan yang tidak terlepas dari situasi masa lalu sejalan dengan perjalanan waktu.

Konflik Israel-Palestina dalam perjalanannya menuju suatu perdamaian yang diinginkan ini tidak dapat dipisahkan dari telaah-telaah sejarah Israel maupun Palestina, baik pada masa lalu, kini dan masa datang. Telaah suatu peristiwa dimasa lampau akan lebih berhasil jika dikaitkan dengan masalah politik.

Selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penulisan ini, penulis juga mencoba untuk menggunakan **pendekatan personaiiti (Personality Approach)**. Dalam pendekatan ini, penulis mencoba untuk memahami kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Ariel Sharon maupun Yasser Arafat yang bertujuan untuk mengoptimalkan tercapainya segala apa yang menjadi tujuan dari kepentingan-kepentingan masing-masing negara/pihak. Sehingga dengan demikian dapat diketahui secara lebih mendalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina tersebut.

Pendekatan sejarah politik dan pendekatan personaliti secara kontekstual menjadi pendekatan studi ini.

## II. GAMBARAN UMUM NEGARA ISRAEL DAN PALESTINA

### 2.1 Israel

#### 2.1.1 Kondisi Umum Israel

Israel adalah sebuah negara yang secara antropologi maupun sosiologis sangat kontradiktif dengan negara-negara tetangganya dalam kawasan. Israel adalah negara Yahudi yang berkebudayaan dan mempunyai gaya hidup model Barat, mereka adalah orang-orang imigran atau keturunan imigran. Negara Israel ini dikelilingi oleh negara-negara Arab yang mayoritas beragama Islam dengan kebudayaan Timur dan telah mendiami wilayahnya secara turun temurun selama ribuan tahun. Dalam kehidupan sehari-harinya, rakyat Israel telah menerapkan kehidupan modern ala Barat dengan membentuk berbagai macam organisasi profesional seperti partai politik, persatuan buruh, asosiasi profesional, birokrasi pemerintah. Israel telah menjalankan politik modern sejak lama.

Namun demikian, dalam soal konflik dengan negara-negara Arab, Yahudi sangat sukar dalam menjelaskan batas-batas wilayah teritorialnya, karena ambisinya untuk menjangkau jauh lebih besar dari daerah yang benar-benar dimilikinya. Klaim-klaim atas wilayahnya didasarkan pada warisan Perjanjian Lama Kitab Injil, Deklarasi Balfour dan Rekomendasi dari PBB pada tahun, 1947<sup>1</sup>. Dengan berdasarkan klaim tersebut Israel memberikan suatu konsep yang elastis dan Bible selalu dipakai sebagai alat legitimasi untuk melakukan suatu agresi<sup>2</sup>.

Klaim Israel atas wilayah yang dikuasainya akan tetap terus ditentang oleh rakyat Palestina yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Meskipun perdamaian masih akan terus diupayakan, namun Israel pasti tidak akan mau untuk melepaskan wilayah yang telah direbutnya dan oleh karena itu akan amat sukar untuk memperoleh ketentraman seperti yang didamtkannya, karena bangsa Palestina juga

<sup>1</sup> Paul Findley, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi*, Mizan, Bandung, 1995, hal 13

<sup>2</sup> R. Garaudy, *Praktek-Praktek Zionisme Israel*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1990, hal 23

akan terus berusaha untuk merebut kembali wilayahnya yang telah dikuasai oleh Israel.

### 2.1.2 Sekilas Tentang Sejarah Israel

Pada tanggal 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dengan didasarkan atas tiga sumber utama yaitu warisan Perjanjian Lama dari Kitab Injil, Deklarasi Balfour dan Rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 1947.

Warisan Perjanjian Lama menyatakan bahwa tanah Palestina adalah milik bangsa Israel, karena tanah tersebut telah dijajikan sejak kurang lebih 4000 tahun yang lalu dan dalam sejarahnya bangsa Yahudi telah beberapa kali tinggal di wilayah tersebut. Periode pemerintahan Yahudi dimulai pada tahun 1020 SM dan berlangsung hingga tahun 587 SM. Kemudian diserbu oleh bangsa-bangsa Assyria, Babylonia, Yunani, Mesir dan Syiria yang menyebabkan bangsa Yahudi kalah namun kemudian Yahudi berkuasa kembali pada tahun 164 SM. Sebelas tahun kemudian Yerusalem ditaklukkan oleh kekaisaran Romawi dan pada tahun 70 SM menghancurkan Kuil kedua dan menyebabkan orang-orang Yahudi mencari tempat yang aman dengan menyebar ke negara-negara lain. Tercatat bahwa bangsa Yahudi kuno menguasai wilayah Palestina selama kurang dari 600 tahun, lebih singkat bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa Kan'an (cikal bakal bangsa Palestina), Mesir, Mu'lim dan Romawi<sup>3</sup>.

Berdirinya negara Israel tidak lepas dari usaha Zionisme<sup>4</sup>. Doktrin zionisme ini disusun oleh Theodore Herzl dan kemudian mengkonkritkan doktrin ini secara sistematis dalam tulisannya *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) sejak tahun 1896. Setahun setelah itu, diadakan Kongres Yahudi sedunia di Basel yang hasilnya adalah akan dibentuknya negara Yahudi di Palestina. Sejak saat itu doktrin ini lebih memfokuskan kepada masalah politik daripada masalah keagamaan. Kasus

<sup>3</sup> Paul Findley, Op Cit, hal 24

<sup>4</sup> "Zionisme adalah sebetulnya rasisme dan diskriminasi rasial" seperti yang pernah disetujui Majelis Umum PBB dengan Resolusi 3379 (XXX) tertanggal 10 Nopember 1975, Garaudy, 1988:200-201, Sharif, 1988:7 dalam Sihbudi dkk, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, buku satu, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 104

Antisemitisme yang kemudian mempunyai kesan kuat bagi Herzl, ia lantas menyimpulkan bahwa ; Pertama, orang Yahudi di negara manapun mereka tinggal di dunia ini, mereka adalah bangsa yang satu. Kedua, orang-orang Yahudi dimanapun berada selalu menjadi sasaran penganiayaan dan ketiga, orang-orang Yahudi tidak dapat diasimilasikan oleh bangsa tempat mereka tinggal. Pemikiran ini tergulir ketika diadakannya kongres Zionis secunia yang pertama.

Gerakan zionisme politik dalam perkembangannya menjadi sebuah gerakan yang kuat dan mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Inggris. Gerakan ini semakin kuat dengan cara mengorganisir bangsa Yahudi yang tersebar di beberapa negara Amerika dan Eropa serta semakin bertambah kuat setelah terjadinya penyiksaan terhadap kaum Yahudi di Rusia yang selanjutnya menjadi terakumulasi dalam konteks ideologis.

Pilar kedua setelah warisan Perjanjian Lama dari kitab Injil adalah Deklarasi Balfour yang merupakan faktor yang sangat penting dalam merealisasikan gerakan zionisme politik. Deklarasi Balfour berasal dari pernyataan Lord Arthur Balfour atas nama Ratu Inggris kepada Lord Rothschild, wakil Yahudi di London yang berbunyi: "Pemerintahan Ratu Inggris menyaksikan dengan senang hati cita-cita untuk mendirikan suatu 'National Home' di Palestina untuk orang-orang Yahudi dan akan menggunakan ikhtiar sebaik-baiknya untuk mempercepat maksud tersebut, setelah dipahami secara jelas bahwa tidak akan dilakukan sesuatu yang merugikan hak-hak sipil dan hak-hak keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh bangsa Yahudi di setiap negeri lain".<sup>5</sup> Pernyataan ini didukung pula oleh Perancis, Itali dan Rusia. Deklarasi ini diberikan oleh pemerintah Inggris tanggal 2 Nopember 1917 kepada Yahudi yang memberi ijin untuk membangun suatu *nasional home* di Palestina.

Inggris menguasai Palestina sejak 1917 ketika tentara Turki tersingkir. Sebelumnya dinasti Utsmaniah Turki telah menguasai Asia Barat sejak 1516.

<sup>5</sup> Paul Findley, Op Cit, hal 26

Penduduk disana menyebut wilayah Palestina dengan sebutan *Al-Ard Al-Muqaddasa* (tanah yang suci). Hal ini untuk mencerminkan bahwa daerah itu sangat diagungkan oleh penganut Islam, Kristen dan Yahudi. Dengan kalahnya Turki pada saat Perang Dunia I mengakibatkan berakhirnya kekuasaan Turki di Palestina. Pada tahun 1920, wilayah Palestina secara resmi menjadi milik Inggris, dan diperintah oleh perwakilan negara-negara yang dibentuk pada saat Deklarasi Balfour. Sesuai dengan mandat pemerintah Inggris, Yahudi diijinkan untuk menduduki wilayah Palestina yang populasinya hampir seluruhnya suku Arab. Namun hal ini terhambat dengan adanya konflik Yahudi dengan penduduk asli yang merasa berhak atas tanah Palestina.

Orang-orang Yahudi yang tersebar di beberapa negara, banyak yang bermigrasi ke Palestina yang mengakibatkan masyarakat Arab semakin terdesak. Hal ini menimbulkan kerusuhan anti Yahudi yang dilakukan oleh bangsa Arab. Bangsa Arab menuntut hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan bersikeras menuntut pemerintahan parlementer demokratis sejak 1920. Tuntutan lainnya adalah penghentian imigrasi Yahudi dan melarang penjualan tanah Arab kepada Yahudi. Tentu saja tuntutan ini ditentang oleh masyarakat Yahudi dan akhirnya menimbulkan pergolakan yang cukup serius. Kenyataan ini dibarengi oleh kebangkitan Hitler tahun 1933 yang membasmi kaum Yahudi. Gerakan antisemitisme ini menyebabkan banyak bangsa Yahudi melakukan imigrasi besar-besaran ke Palestina dan semakin memperparah keadaan. Jumlah imigran Yahudi yang semakin besar ini menimbulkan protes yang tak henti-hentinya dari pihak Arab. Tahun 1933 bangsa Arab melaksanakan teror kepada bangsa Yahudi yang akhirnya menjurus pada pemberontakan Arab, namun berakhir tahun 1939, tepat diambang Perang Dunia II.

PBB mengambil alih mandat atas Palestina karena Inggris tidak berhasil menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Majelis Umum PBB menyetujui rencana pembagian wilayah Palestina menjadi 3 bagian dengan dikeluarkannya Resolusi no. 181 (II) tertanggal 29 Nopember 1947 dengan pembagian sebagai berikut:



1. Negara Arab, dengan wilayah Acre, Nazareth, Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, Jalur Gaza dan Kota Pelabuhan Jaffa.
2. Negara Yahudi dengan wilayah Safed, Tibberias, Beisan, Haifa, Tulkram, Ramleh, Sihara Negev.
3. Yerusalem sebagai wilayah dibawah pengawasan internasional.

Inggris sebagai pemegang mandat atas wilayah Palestina mengumumkan bahwa status mandat atas Palestina berakhir pada tanggal 15 Mei 1948.<sup>6</sup> Hal ini disampaikan Inggris setelah berakhirnya Perang Dunia II yang kemudian membuat para pemimpin Yahudi di Palestina segera memproklamasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Dengan kemerdekaan ini cita-cita orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk mendirikan negara sendiri, tercapai.

Negara Israel setelah merdeka dipimpin oleh Chaim Weizman yang lahir di Rusia sebagai Presiden dan Ben Gurion sebagai Perdana Menteri yang pertama. Segera setelah itu eksistensi negara Israel mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Meskipun Israel telah berdiri tegak sebagai sebuah negara, tetapi masih terus mendapat reaksi keras dari negara-negara Arab yang merasa bahwa Israel telah merebut wilayah Palestina dan konflik Israel-Palestina tetap akan berlangsung dalam konteks ideologis maupun strategis.

### 2.1.3 Kondisi Geografis, Sosial dan Ekonomi

Israel adalah sebuah negara kecil yang terletak di kawasan Timur Tengah, di sebelah Timur Laut Tengah. Negara yang diakui sebagai tempat tinggal kaum Yahudi ini dikelilingi dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara-negara Arab. Di sebelah Timur berbatasan dengan Yordania dan Syiria, di sebelah Selatan sampai Barat Daya berbatasan dengan negara Mesir (gurun Sinai dan Teluk Aqaba), dan di sebelah Utara ada Lebanon. Israel mempunyai iklim tipe mediterania dimana pada musim panas udara sangat kering dengan suhu mencapai 32-38°C. pada musim dingin turun hujan.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 70

Israel mempunyai luas sekitar separuh Belanda. Dan lebih dari setengahnya adalah berupa padang pasir. Jarak antara kota-kota penting sangat dekat, antara Tel Aviv ibu kota Israel yang terletak di sebelah Barat dan Jerusalem yang terletak di Timur hanya berjarak 40 mil, dan dari Tel Aviv ke Haifa di sebelah Utara atau Beersheba yang terletak di Selatan berjarak 60 mil.<sup>7</sup>

Penduduk Israel yang terdiri dari para imigran Yahudi dibedakan menjadi dua istilah, yaitu *Sephardim* dan *Ashkenazim*. *Sephardim* adalah para imigran yang datang dari negara-negara Asia dan Afrika. Sedangkan *Ashkenazim* adalah para imigran yang datang dari negara-negara Eropa dan Amerika. Kedua kelompok ini tentu saja mempunyai beberapa perbedaan. Kebanyakan masyarakat *Sephardim* tidak punya keahlian khusus dan berpendidikan rendah, maka mereka mempunyai status sosial, pekerjaan dan kekuasaan politik yang rendah. Jumlah *Ashkenazim* yang ada lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah *Sephardim*.

Dari sekitar kurang lebih 4,9 juta jiwa penduduk Israel sesuai dengan sensus 1994 sejumlah 85% merupakan bangsa Yahudi, 11% adalah Arab Muslim, 2,5% Arab Kristen dan 1,2% adalah bangsa Druze (sebuah sekte Arab). Sejumlah 55% penduduk lahir di Israel dan 45% lahir di luar wilayah Israel.<sup>8</sup> Disamping itu pemerintah Israel juga membawahi dua daerah pendudukan yaitu Jalur Gaza dengan jumlah warga Arab Palestina kurang lebih 859.000 jiwa dan di Tepi Barat sungai Yordan dengan jumlah penduduk Arab Palestina kurang lebih 800.000 jiwa.

Secara formal Israel adalah negara demokrasi sekuler, artinya Israel tidak didirikan atas dasar agama tertentu, baik Yahudi maupun agama yang lain. Hal ini bukan berarti tidak ada hubungan antara penganut agama dengan negara. Dalam pemerintahan Israel, ada Menteri Agama yang mengurus berbagai agama: Yahudi, Islam, Druze, Kristen dan lainnya. Tercatat tahun 1988 penganut Yahudi ada 82,5%,

<sup>7</sup> Drs. Riza Sihbudi dkk, *Israel*, dalam *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, buku satu, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 102

<sup>8</sup> *ibid*, hal 106

penganut Islam 13,5%, penganut Kristen 2,5% dan yang lainnya 1,5%.<sup>9</sup> Negara menjamin kehidupan keagamaan masing-masing, termasuk bagaimana cara mereka menikah atau bercerai. Israel sangat memperhatikan masalah pendidikan bagi warga negaranya, hal ini diimplementasikan dengan cara pemberlakuan pendidikan wajib dan tanpa dipungut biaya bagi anak-anak usia 5 sampai dengan 15 tahun. Untuk pendidikan sampai dengan umur 18 tahun biaya ditanggung pemerintah tetapi tidak diwajibkan.

Masyarakat Israel sebagian besar mempunyai mata pencaharian pokok dibidang pertanian. Untuk menampung imigran-imigran baru, di wilayah Negev dibuka tanah-tanah pertanian baru, berdasarkan sistem usaha koperasi yang disebut sebagai Moshav dan Kibbutz.

Moshav adalah suatu koperasi desa yang beranggotakan petani-petani kecil, dimana setiap petani di tiap-tiap desa diberi hak daerah pertanian yang dikelola secara perorangan menurut kesanggupan masing-masing petani. Jaminan ekonomi dan sosial petani ditanggung oleh koperasi desa yang juga mengurus masalah hasil-hasil pertanian, pembelian alat-alat pertanian dan pemberian kredit. Hasil pertanian di Israel antara lain adalah gandum, kentang sayur-sayuran, jeruk, ternak dan produk susu.

Kibbutz adalah merupakan usaha kolektif yang berkembang secara khusus di Israel serta didasarkan atas pemilikan bersama terhadap sumber-sumber kekayaan dan mengadakan suatu rolling dari tenaga-tenaga kerja, penghasilan dan pengeluaran. Tiap-tiap anggota dianjurkan untuk bekerja sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negara disuplai oleh Kibbutz yang berdasarkan pada tanggung jawab bersama serta hak yang sama bagi semua anggotanya.

Industri di Israel berkembang sangat cepat akibat datangnya kaum imigran dari Eropa (*Ashkenazim*) karena kebanyakan mereka adalah buruh terdidik. Hasil

---

<sup>9</sup> Republika, 13 Juli 1996

industri yang berkembang di Israel antara lain adalah semen, kaca, kertas, tekstil, ban mobil, pesawat radio, pemrosesan pangan, penggosokan intan, bahan kimia dan keramik. Untuk hasil mineral utama Israel adalah kalium karbonat, fosfat, brom, garam dan tembaga. Ekspor utama negara Israel adalah buah dan sayuran, intan gosokan, tekstil dan pakaian, makanan olahan, pupuk dan produk kimia, dan elektronik. Sedangkan untuk impor Israel berupa peralatan militer, intan mentah, minyak, besi dan baja, dan bahan-bahan kimia.<sup>10</sup>

Dibidang pertahanan dan keamanan Israel memberi jatah anggaran belanja yang termasuk besar, hal ini dapat dipahami mengingat letak geografis Israel yang dikelilingi oleh negara-negara Arab yang nota bene sangat memusuhinya. Ancaman dari luar ataupun dari tetangganya sangat besar sehingga membuat Israel memperkuat peralatan tempurnya. Hampir 38% dari total anggaran belanja negara Israel disisihkan untuk anggaran pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara, baik wanita maupun laki-laki yang sudah dewasa harus mendapat latihan kemiliteran dan wajib militer ditetapkan bagi laki-laki selama 26 sampai dengan 30 bulan dan wanita selama 20 sampai 24 bulan. Dengan anggaran militer yang cukup besar, Israel mempunyai angkatan perang terkuat disamping Irak di kawasan Timur Tengah.<sup>11</sup>

#### 2.1.4 Sistem Politik Dalam Negeri

Israel adalah sebuah negara Republik yang menganut sistem pemerintahan parlemen dengan multi partai. Akar dari sistem politik Israel telah ada sejak sebelum negara ini berdiri. Pada saat berada dalam mandat Inggris (1922-1948) komunitas Yahudi di Palestina yang tergabung dalam Yishuv membentuk suatu badan untuk pemerintahan sendiri, termasuk Majelis terpilih ( Asefat Ha Nivcharim) yaitu sebuah badan perwakilan yang dipilih melalui pemungutan suara. Dalam demokrasi parlemen Israel meliputi kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Ketiga kekuasaan ini terpisah satu sama lain dan mereka bekerja dengan sistem "*check and*

<sup>10</sup> Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, *Asta dan Afrika dalam Negara Bangsa*, edisi Bahasa Indonesia, Grolier International, inc. 1990, hal 11

<sup>11</sup> Europe Publication, *The Middle East and North Africa*, edisi 37, 1993

*balances*". Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen sebagai lembaga Legislatif. Sementara itu kekuasaan Yudikatif adalah independen.

Presiden adalah Kepala Negara dan sebagai simbol pemersatu dipilih oleh parlemen, dengan masa jabatan lima tahun dan boleh menduduki dua kali masa jabatan. Presiden dapat menunjuk anggota parlemen untuk membuat pemerintahan baru menyusul adanya pemilu atau ia dapat membubarkan pemerintah yang sedang berjalan. Tugas lain dari Presiden adalah menerima surat kepercayaan Duta Besar asing di Israel; menandatangani perjanjian dan Undang-Undang yang telah disetujui oleh parlemen; memberikan rekomendasi untuk pengangkatan Gubernur Bank Israel dan misi diplomatik Israel di luar negeri, dan memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman bagi tahanan atas usulan Menteri Kehakiman.

Sebagai penganut demokrasi parlementer, parlemen Israel mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Parlemen merupakan badan Legislatif tertinggi. Parlemen mempunyai fungsi untuk membuat Undang-Undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam proses suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang melalui tiga sidang.

Pada sidang pertama, menteri yang berkepentingan menjelaskan RUU secara umum, kemudian diperdebatkan dan apabila dianggap cukup, maka RUU diputuskan diterima dan dibicarakan lebih lanjut. Pada sidang pertama ini, ditentukan juga Komisi apa yang harus menangani lebih lanjut. Dalam Komisi ini RUU dibahas secara detail. Pada sidang kedua, RUU versi Komisi tersebut dibahas. Jika tidak ada perubahan lagi, maka sidang kedua dan ketiga dapat dilaksanakan pada pada waktu yang sama. Dengan kata lain, sidang ketiga yang berfungsi untuk mensahkan RUU dapat dilangsungkan segera setelah sidang kedua selesai. Namun jika ada perubahan RUU pada sidang kedua, maka sidang ketiga ditunda.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang Perdana Menteri, yang dibantu oleh sejumlah menteri. Para menteri ini dipilih dan bertanggung jawab kepada anggota partainya dalam perlemen. Biasanya Perdana

Menteri tidak bisa mencampuri pilihan partai dan susunan kabinet dapat berubah sewaktu-waktu. Seorang Perdana Menteri haruslah anggota parlemen, dan masa kerja suatu kabinet adalah empat tahun. Namun demikian bisa dipercepat apabila Perdana Menteri meninggal dunia atau mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen.

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa kekuasaan Yudikatif bersifat independen. Para hakim dipilih oleh Presiden untuk seumur hidup atau akan berakhir masa jabatannya pada usia 70 tahun. Hirarki kekuasaan Yudikatif adalah pengadilan rendah (termasuk pengadilan kotapraja, lalu lintas, dan anak-anak), pengadilan distrik, sebagai tempat naik banding pengadilan rendah; dan Mahkamah Agung, sebagai tempat banding paling akhir.<sup>12</sup>

Israel menganut sistem multi partai, artinya siapa saja boleh mendirikan partai asalkan mengikuti tata cara yang diijinkan. Sistem kepartaian mulai muncul bersamaan dengan diselenggarakannya pemilu Israel yang pertama tahun 1949. Dalam pemilu Israel menggunakan perwakilan yang proporsional dalam pendistribusian kursi di Majelis. Majelis Israel melaksanakan pertemuan setiap tahun untuk memilih Dewan Nasional (Vaad Leumi) untuk menjalankan tanggung jawab administratif dan mengurus komunitas Yahudi. Dewan ini difungsikan berdampingan dengan perwakilan Yahudi untuk Palestina yang dibentuk untuk memperjuangkan ide pembentukan wilayah bagi penduduk Yahudi. Perwakilan ini berfungsi sebagai perwakilan diplomatik bagi bangsa Yahudi untuk melakukan negosiasi dengan dunia internasional dan juga untuk mengumpulkan dana.<sup>13</sup>

Partai-partai politik mulai muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an. Pada saat itu terdapat tiga aliran utama dalam Yishuv yaitu : kelompok Buruh (Sosialis yang berhaluan kiri), kelompok Nasionalis yang berhaluan kanan dan kelompok Keagamaan. Kelompok-kelompok tersebut pada perkembangannya berubah menjadi suatu gerakan kepartaian. Partai-partai baru muncul sejalan dengan perkembangan sistem politik di Israel yang menganut sistem Liberal.

<sup>12</sup> Drs. Riza Sihbudi dkk, Op Cit hal 10

<sup>13</sup> Republika, 13 Juni 1996

Jauh sebelum Israel berdiri, masyarakat Yahudi yang bermukim di wilayah Palestina mendirikan suatu organisasi politik yang disebut *Histadrut* (Federasi Buruh Yahudi) yang didirikan pada tahun 1920. Histadrut ini mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan politik dan ekonomi masyarakat Yahudi di Israel. Pada saat Israel belum berdiri, Histadrut mengorganisir para imigran, menyiapkan pasukan para Yahudi, membangkitkan kembali kebudayaan dan bahasa Yahudi dan membeli tanah untuk pemukiman. Mereka juga mendirikan bank, industri, perusahaan asuransi, mengelola koran khusus untuk orang Yahudi, dan asosiasi olah raga. Organisasi ini sudah dikelola secara modern. Sebelum pemilu 1965, aspirasi politik mereka disalurkan melalui Partai Buruh. Tetapi sejak tahun 1965 mereka terpecah, ada yang mendukung Partai Buruh dan ada pula yang mendukung Partai Likud.

Menurut Hamdan Basyar,<sup>14</sup> secara garis besar partai politik yang ada di Israel dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok besar yaitu:

1. Partai Buruh

Partai ini menguasai parlemen secara terus menerus sejak pemilu pertama (1949) sampai dengan pemilu yang ke-8 (1973) dan pada pemilu 1977 posisi mereka digantikan oleh partai Likud. Secara resmi partai Buruh Israel (*Mifleget Ha'avoda Ha Israelit*) baru berdiri pada tanggal 21 Januari 1968. Mereka merupakan aliansi beberapa Partai Buruh yang dahulu bernama Mapai, Mapam, *Ahdut Ha'avoda* Poale Zion dan Rafi.

2. Partai -Partai Agama

Partai-partai ini antara lain adalah Mizrahi, Hapoel Hamizrahi, Agudat Israel, Front Persatuan Agama, Shas dan Kach.

3. Partai Partai Komunis

Partai-partai ini antara lain adalah Rakah, Maki, Front Demokratik untuk Perdamaian dan Persamaan.

---

<sup>14</sup> M. Hamdan Basyar, *Kiprah Parlemen Israel*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 11, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal 51

#### 4. Partai-Partai Arab

Partai-partai ini antara lain adalah Demokratik Arab, Arab Progresif, Petani Arab dan Persatuan Arab.

#### 5. Partai Likud (Unity)

Partai ini muncul dalam pemilu 1973. Partai Likud (Unity) adalah gabungan dari beberapa partai yang dalam pemilu sebelumnya selalu menjadi rival partai Buruh. Mereka adalah Herut, Gahal, Liberal, Shlomzion dan Progresif. Partai ini berjaya dalam pemilu ke-9 (1977) dan ke-10 (1981). Dalam periode ini partai Likud menguasai pemerintahan secara mutlak. Dalam pemilu 1996 partai Likud berhasil memenangkan pemilu dan pada pemilu 2001 kembali berjaya dengan menampilkan Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel yang baru.

Selain kelompok-kelompok diatas, ada kelompok lain dari gerakan independen. Mereka ini antara lain adalah Sephardim, Organisasi Wanita Zionis Internasional (WIZO), Yemenitas, Haolam Hazah, Gerakan Pembela Hak Asasi, Gerakan Demokratik untuk Perubahan dan Moked.<sup>15</sup>

Dari banyak kelompok partai yang ada di Israel, pertarungan yang sebenarnya terjadi dalam setiap pemilu adalah antara partai Likud dan partai Buruh. Sedangkan yang lain hanyalah partai kecil yang kadang-kadang dapat membantu menentukan kemenangan salah satu blok.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemenangan suatu partai politik. Salah satunya adalah kemenangan periode sebelumnya yang akan mendukung kemenangan selanjutnya. Faktor lain adalah program partai yang ditawarkan. Selain itu untuk masyarakat dan pemilih Israel faktor yang cukup menentukan adalah keamanan dan prestise, dimana partai yang bisa menjamin keamanan dan prestise masyarakat Yahudi adalah yang mempunyai peluang besar untuk menang.

---

<sup>15</sup> Drs. Riza Sihbudi, Op Cit hal 114



### 2.1.5 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Israel pada level regional selalu berupaya untuk mencegah adanya suatu kesamaan aksi dan visi dari negara-negara Arab dengan tujuan utama adalah *de coupling* (penguncian) terhadap posisi salah satu negara Arab yang terkuat, sehingga negara tersebut terisolasi dari dunia Arab. Bisa dikatakan bahwa strategi Israel pada tingkat regional adalah bertujuan untuk memutuskan ikatan antara negara-negara Arab. Dengan strateginya ini Israel dengan sengaja mendorong negara-negara Arab untuk menjalankan strategi yang berlawanan satu dengan yang lain. Israel mempunyai asumsi bahwa kepentingan dunia Arab dengan kepentingan Israel selalu bertentangan dan oleh sebab itu politik pecah belah terhadap dunia Arab akan membuat keunggulan militer Israel semakin efektif.<sup>16</sup>

Sementara itu pada level internasional, Israel selalu berusaha mencari bentuk ikatan yang kuat dan langsung dengan Amerika Serikat. Israel berusaha menanamkan kesan pada dunia Arab bahwa negara Yahudi itu merupakan kepanjangan tangan dari Amerika Serikat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Israel tidak hanya bertumpu pada komitmen tradisional Washington dan lobi-lobi domestik, tetapi harus mengupayakan suatu peran yang melekat pada strategi Amerika Serikat. Sebagai akibatnya setiap upaya dari lawan Israel di Timur Tengah untuk membentuk persekutuan dengan Amerika Serikat dianggap sebagai suatu ancaman bagi Israel dan oleh karena itu Israel berusaha mencegah ikatan strategis yang lebih dekat antara Amerika Serikat dan negara-negara Arab.

Stratetgi ini membuat Israel seolah-olah mempunyai sumber yang tidak terbatas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bantuan kepada Israel minimal mencapai US\$ 77 milyar. Sejak tahun 1985 pinjaman-pinjaman dari Amerika Serikat yang seharusnya dibayar beserta bunganya, telah berubah menjadi Outright Grant ( bantuan gratis sama sekali). Outright Grant dari pemerintah Amerika Serikat kepada Israel

<sup>16</sup> Shilbey Telhami, *Israel Foreign Policy: A Strategy in a Changing World*, for Middle East Journal Vol. 44/3, 1990 hal 400

tersebut bertujuan untuk membantu perekonjian Israel yang mengalami kelesuan. Sejak tahun 1985 Israel telah menerima Outright Grant sebesar US\$ 3 milyar yang dialokasikan untuk sektor ekonomi dan militer. Hal ini masih ditambah dengan perlindungan politis Amerika Serikat dalam forum Dewan Keamanan PBB terhadap setiap aksi Israel.<sup>17</sup>

Kebijakan politik luar negeri Israel menurut Adersen<sup>18</sup> dibagi menjadi tiga fase. Pada fase pertama Israel masih disibukkan dengan awal berdirinya negara. Israel membutuhkan pengakuan dunia Internasional (1945-1948). Pada fase kedua politik luar negeri Israel lebih menitikberatkan kepentingan domestik. Israel menggunakan politik *carrot and stick* dalam berhubungan dengan negara Arab tetangganya. Politik *carrot* dijalankan kepada negara yang mau mengadakan negosiasi dan kerja sama dengan Israel. Dengan politik *stick*, Israel ingin menunjukkan bahwa dia superior dalam bidang militer. Tentu saja dalam hal ini Israel mengandalkan Amerika Serikat sebagai pendukung setianya. Fase kedua ini antara tahun 1948-1974. Pada fase ketiga antara tahun 1974 dan 1980, hubungan Israel dengan Amerika Serikat agak merenggang. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat menyadari kebutuhan pada minyak Timur Tengah. Embargo minyak Timur Tengah pada awal 1970-an cukup membuat repot Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat berpikir untuk mengubah politiknya di Timur Tengah. Amerika Serikat akhirnya memperhatikan kepentingan negara Arab yang dianggapnya moderat. Hal ini tentunya mengurangi perhatian Amerika Serikat terhadap Israel yang sebelumnya menjadi anak emas. Melihat kenyataan ini, Israel menerapkan politik luar negerinya secara lebih pragmatis. Sikap pragmatis Israel ini dimulai ketika dipimpin oleh Partai Buruh yang menang pada pemilu 1992.

---

<sup>17</sup> Berita Buana, 14 Maret 1991

<sup>18</sup> Drs. Riza Sihbudi, Op Cit hal 120-121

## 2.2 Palestina

### 2.2.1 Sejarah Singkat Palestina

Palestina dahulu dikenal sebagai daerah Kan'an yaitu daerah yang didiami oleh suku-suku Nomad yang kemudian menetap di daerah pantai sekitar tahun 2000 SM. Pada tahun 1600-1500 SM datang kelompok Yahudi dari Irak yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim dan menetap di Palestina. Kemudian terjadi bencana kelaparan yang memaksa mereka ke Mesir. Namun di Mesir mereka mengalami penindasan dari Fir'aun yang akhirnya mendesak mereka pindah lagi dengan dipimpin oleh Nabi Musa. Bersamaan dengan itu ikut pula suku-suku bangsa berbahasa semit lainnya, seperti Moabites, Edomites dan Amenite, untuk pindah menuju Palestina. Disini terjadi percampuran darah antara orang-orang Kan'an dengan orang Philistin. Sebagian orang Yahudi sekarang adalah keturunan/campuran antara suku-suku tersebut.

Pada tahun 586 SM orang-orang Yahudi setelah ditaklukkan oleh raja Nebukadnesar, dibawa ke Babilonia sebagai tawanan dan di daerah pembuangan ini mereka masih dapat menjalankan agama Judaisme. Tahun 538 SM, raja dari Persia berhasil mengalahkan Nebonidus -- raja Babilonia yang terakhir -- dan mengizinkan tawanan-tawanan Yahudi untuk kembali ke Palestine, namun sebagian besar memilih untuk tetap tinggal di Babilonia karena suasana yang sangat baik di sana. Pada tahun 63 SM Romawi menyerbu Palestina dan banyak menimbulkan kehancuran atas daerah itu, sehingga banyak orang Yahudi pergi meninggalkan Palestina menuju ke Eropa dan daerah Timur Tengah lainnya. Pada tahun 70 M, Romawi (Bizantium) menyerbu Palestina dan menghancurkan kuil-kuil, namun orang Yahudi masih dapat bertahan sampai tahun 135 M. akibat serangan orang Romawi tersebut menghancurkan seluruh negeri dan menyebabkan penduduknya bertebaran ke seluruh penjuru dunia.

Kerajaan Romawi menyerbu lagi ke Palestina, tetapi tahun 637 M didesak keluar Palestina oleh pasukan yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab,<sup>19</sup> khalifah kedua yang menggantikan Nabi Muhammad. Khalifah Umar di Palestina dapat menghindarkan kehancuran yang lebih hebat bagi bangsa-bangsa Yahudi, karena beliau dikenal sebagai khalifah yang adil memperlakukan orang-orang yang bukan beragama Islam.

Sekitar tahun 1009 terjadi ketegangan antara kerajaan Eropa dengan dinasti Fatimi Mesir yang mulai berkuasa di Palestina. Ketegangan ini disebabkan antara lain oleh penghancuran sebuah gereja suci yang merupakan obyek peziarah Eropa. Kemudian berkobar Perang Salib pada tahun 1077 dengan berkuasanya Saljuk Turki atas kota Yerusalem. Perdamaian dapat diwujudkan pada tahun 1102 pada saat berkuasanya Saladin (Salahudin Ayyubi), dimana diputuskan bahwa Palestina dikuasai oleh kerajaan Islam, tetapi peziarah-peziarah Kristen yang hendak mengunjungi tempat-tempat suci di Yerusalem harus dijamin keamanan dan kebebasan mereka.

Akan tetapi kenyataan sekarang justru terbalik, dimana wilayah Palestina yang seharusnya dikuasai oleh kerajaan Islam, malahan dikuasai oleh Zionis Yahudi. Hal inilah yang menjadi sengketa antara Arab Palestina dengan Israel sampai sekarang.

### 2.2.2 Wilayah

Palestina yang juga disebut Tanah Suci dan pada jaman dahulu dikenal sebagai Kan'an, Tanah Israel dan Tanah Perjanjian adalah sebuah negara kecil yang terletak di tepi Tenggara Laut Tengah. Sebagai akibat perang Arab-Israel yang pertama (1948-1949) negara itu pecah menjadi tiga bagian yaitu Israel, Jalur Gaza dan Tepi Barat Yordania.

<sup>19</sup> Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Berpengaruh Dalam Sejarah*, Penerbit Pustaka Jaya, 1982 hal 110

Bagian utama adalah wilayah Israel yang meliputi Galilea, dataran pantai sepanjang pantai Negev kecuali Enklave El Auja dan Jalur Gaza juga suatu koridor luas antara dataran rendah pesisir sampai kota lama Darussalam.

Bagian kedua adalah Tepi Barat Yordania yang meliputi daerah pegunungan yang membujur dari sebelah Utara Janin sampai sebelah Selatan kota Hebron. Daerah ini diduduki tentara Transyordania dan kemudian disatukan dengan wilayahnya menjadi wilayah Yordania.

Bagian ketiga adalah Jalur Gaza, adalah suatu jalur kurang lebih 200 km<sup>2</sup> yang diduduki tentara Mesir dan ditempatkan dibawah pendudukan militer.

Dalam perang Arab-Israel ke-3 (1967), Israel telah merebut Tepi Barat Sungai Yordania dan Jalur Gaza dan menempatkannya dibawah pemerintahan pendudukan militer, tetapi kota lama Darussalam langsung dianeksasinya. Dengan demikian wilayah Palestina disatukan kembali dibawah kekuasaan Israel.

### 2.2.3 Penduduk

Palestina pada tahun 1920 merupakan suatu negara mandat yang diserahkan kepada Inggris oleh PBB. Pada saat itu penduduknya berjumlah 157.182 orang, termasuk 83.794 orang Yahudi. Rakyat Arab merupakan mayoritas penduduk, tetapi dalam sengketa dengan penduduk Yahudi, kurang mampu memanfaatkan jumlahnya yang lebih besar tersebut, terutama karena tidak mampu membentuk suatu kekuatan politik yang kuat dan umumnya masih terbelakang. Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pedesaan sebagai penggarap tanah beberapa tuan tanah yang berkuasa atau sebagai buruh tani.

Selama masa mandat tersebut, orang-orang Arab tidak banyak mendapat latihan dalam pemerintahan lokal, sebagian karena menolak bekerja sama dengan pemerintah mandat dan sebagian karena pemerintah Inggris tidak mampu mengadakan pembaharuan-pembaharuan permanen dalam sengketa Arab-Israel yang semakin meningkat. Ketika pemerintah berhenti berfungsi beberapa bulan sebelum akhir mandat, mereka kurang mampu mengambil alih fungsi pemerintah. Maka

terjadilah keruntuhan hukum dan ketertiban. Disintegrasi sipil mendahului dan mempermudah kekalahan militer mereka. Dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi sesudah PBB menerima Resolusi pembagian wilayah Palestina, sekitar 400.000 orang mengungsi ke wilayah yang dimaksud untuk negara Arab.

Dalam perang Arab-Israel pertama (1948-1949) rakyat Arab yang menjelang akhir mandat berjumlah 1.320.000 orang menjadi terpecah belah dan sebagian besar hidup sebagai pengungsi baik di negara mereka sendiri maupun di negara-negara tetangga. Sesudah perang itu di Israel terdapat 120.000 orang termasuk 37.600 orang pengungsi, di Tepi Barat Yordan 623.000 orang (termasuk di Jalur Gaza 245.000 orang) dan di Lebanon sebanyak 127.000 orang. Sekitar 960.000 orang terdaftar sebagai pengungsi.<sup>20</sup>

Perang ke-3 (1967) membawa perubahan-perubahan besar bagi rakyat Palestina. Israel menguasai Jalur Gaza dan Tepi Barat Yordania dan penduduk yang berjumlah sejuta orang Arab, termasuk pengungsi-pengungsi. Sebagai pemerintah yang secara de facto berkuasa, Israel menjamin kesejahteraan rakyat.

Keadaan penduduk daerah-daerah pendudukan di wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat banyak mengalami perbaikan. Pemerintah Israel berkepentingan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pada tahun 1992, sekitar 2,5 juta orang Palestina tinggal di negara-negara Arab lainnya, lebih dari separo di Yordania dimana mereka bahkan merupakan mayoritas penduduk dan memiliki kewarganegaraan.

---

<sup>20</sup> Sihbudi, op cit, hal 164



### III. PERKEMBANGAN PROSES PERDAMAIAN ISRAEL - PALESTINA

#### 3.1 Latar Belakang Konflik Israel-Palestina

Awal abad ke-20, pada masa Utsmaniyah Turki, Filastin atau *Al-Ard Al-Muqaddasa* yang sekarang dikenal dengan nama Palestina dibagi menjadi tiga propinsi yaitu: Yerusalem, Nablus dan Acre. Penguasa Utsmaniyah menggunakan sistem Millet yang memberikan otonomi luas kepada penduduk yang menganut agama Kristen dan Yahudi. Mereka dijamin kehidupan sosial, keagamaan, budaya dan masalah-masalah lainnya. Maka pada waktu itu masyarakatnya dapat hidup secara damai, toleransi terhadap agama lain sangat tinggi dan timbul kerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama. Kekuasaan Turki di Palestina berakhir pada saat Perang Dunia I, dimana Turki kalah perang dan Palestina jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1918. Pada bulan September 1923, LBB secara resmi menyerahkan mandat kepada Inggris untuk mengurus wilayah Palestina.<sup>1</sup>

Apabila berbicara mengenai siapa yang paling berhak memiliki wilayah Palestina, terlebih dahulu perlu diketahui siapa yang disebut penduduk asli Palestina. Seperti telah dijelaskan dimuka, bahwa orang Palestina sekarang adalah keturunan dari orang-orang Philistine dan Kan'an. Mereka inilah yang mendiami daerah Palestina selama 400 tahun secara berturut-turut. Kemudian keturunan ini bercampur darah dengan orang-orang keturunan Yunani, Romawi, Arab, Mongolia dan Turki. Sebagian dari mereka beragama Kristen dan sebagian lain beragama Islam. Orang-orang Yahudi dalam hal ini tidak termasuk ke dalam golongan Palestina asli, karena mereka hanya merupakan masyarakat yang jumlahnya sedikit. Mulai dari abad pertama sampai abad ke-20 penduduk Yahudi bisa dikatakan berhenti berkembang.

Banyaknya imigran Yahudi yang datang ke Palestina adalah sebagai realisasi pelaksanaan "amanat" yang disampaikan Theodore Herzl dalam tulisannya *Der*

<sup>1</sup> M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnae. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hal 43

*Judenstaat* (negara Yahudi) pada tahun 1896. Gelombang imigrasi massal tersebut kemudian disebut *aliyah* dan berdatangan dari berbagai negara antara lain Rusia, Rumania, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman, Aden, Jerman dan negara-negara Afrika. *Aliyah* ini semakin mendapat angin ketika dikeluarkannya Deklarasi Balfour yang berisi dukungan pemerintah Inggris kepada gerakan zionis untuk mendirikan negara di Palestina.

Deklarasi Balfour tersebut dikeluarkan karena rasa simpati dan dukungan dari pemerintah Inggris kepada orang-orang Yahudi yang telah mengalami pengejaran dalam perantauannya di Eropa sekitar abad ke-18 dan abad ke-19. Pada waktu itu kehidupan orang-orang Yahudi sangat menyedihkan, apalagi oleh ancaman antisemitisme orang-orang Eropa. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina.

Gelombang imigrasi Yahudi yang sangat besar menuju ke Palestina menyebabkan rakyat Arab Palestina terdesak. Hal ini menyebabkan bentrokan antara Yahudi dan Palestina. Bentrokan ini berlangsung berlarut-larut dan pemerintah Inggris tidak dapat menyelesaikannya. Kemudian masalah Palestina diambil alih oleh PBB. Setelah melalui proses yang amat panjang, akhirnya Majelis Umum PBB menetapkan pembagian daerah Palestina menjadi tiga bagian yang tercantum dalam Resolusi no 181 (II) pada tanggal 29 Nopember 1947. Bangsa Arab Palestina dan negara-negara Arab menolak pembagian wilayah tersebut, karena melanggar ketentuan dalam piagam PBB yang memberi hak kepada bangsa-bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Israel yang mempunyai wilayah yang berada di tengah-tengah negara-negara Arab, menimbulkan suatu masalah yang rumit dan berkepanjangan. Secara historis, negara-negara Arab dan Israel belum pernah berhasil menyepakati tapal batas yang jelas bagi keberadaan wilayah Israel. Konflik Israel-Palestina yang berakar dari kepentingan Israel untuk memiliki *national territory* bagi bangunan *national home* bagi bangsa Yahudi, kemudian berkembang demikian rumit dan runyam dengan semakin kuatnya posisi Israel dan terus terjepitnya posisi Arab untuk mengesalkan



usulan-usulan perdamaianya serta masuknya korsep perdamaian hasil rekayasa pihak-pihak luar yang mempunyai kepentingan strategis di Timur Tengah.

Konflik antara Israel dan Palestina telah berkembang menjadi konflik multi-dimensional. Hal ini juga diakui oleh pemimpin-pemimpin Arab, khususnya Gamal Abdul Nasser, setiap gerakan politik atau perang dalam konteks Timur Tengah merupakan hasil rancangan bersama antara Israel dan Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Sulitnya penyelesaian konflik ini secara mendasar disebabkan tidak adanya titik temu dalam sikap masing-masing pihak yang bertikai. Arab bersikukuh tidak akan merelakan wilayahnya dikuasai oleh Israel, sedangkan Israel sendiri tidak akan mengubah batas wilayahnya seperti pada saat ditinggalkan Inggris pada tahun 1948 ataupun menyerahkan wilayah pendudukan tanpa suatu imbalan.

Salah satu formula Khartoum yang masih berlaku sampai saat ini menyebutkan bahwa tidak ada penyerahan sebagianpun wilayah Arab yang diduduki kepada Israel. Selain itu deklarasi ini juga menyebutkan bahwa zionisme internasional dan Israel sebagai pelindungnya adalah musuh langsung bangsa Arab. Berbagai upaya pemecahan, baik melalui saluran diplomatik maupun dengan kekerasan telah dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai. Namun semua itu belum mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik yaitu tercapainya perdamaian.<sup>3</sup>

### 3.2 Masalah Perbatasan Dan Perebutan Wilayah

Konflik Israel-Palestina telah berkembang menjadi konflik regional. Perang Arab-Israel telah beberapa kali terjadi dan menempatkan negara-negara Arab pada posisi yang dikalahkan. Pada saat perang ke-3 tahun 1967, seluruh wilayah yang diperuntukkan negara Arab Palestina, dicaplok oleh Israel. Untuk mewujudkan perdamaian yang diinginkan dan menyelesaikan konflik yang terjadi, maka pengembalian wilayah Palestina yang telah dikuasai oleh Israel adalah suatu hal yang perlu dilaksanakan. Namun hal ini menemui hambatan karena kekakuan sikap Israel

---

<sup>2</sup> Kompas, 18 Maret 1992

<sup>3</sup> Kompas, 19 Maret 1992

untuk mempertahankan wilayah itu. Mereka selalu berdalih bahwa wilayah Tepi Barat adalah wilayah Judea dan Samaria "yang dijanjikan" oleh kitab suci sebagai tanah orang Israel, dan untuk merealisasikannya mereka membangun pemukiman Yahudi.

Sebelum membicarakan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, maka penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai klasifikasi tanah berdasarkan kepemilikan. *Pertama*, tanah pribadi milik orang Arab. *Kedua*, tanah pribadi milik orang Yahudi; sebelum tahun 1948 ada sekitar 8000 are di Hebron dan Etzion dimiliki oleh Yahudi. Setelah perang 1967, tanah pribadi ini bertambah luas diperkirakan mempunyai luas 17.500 are. *Ketiga*, tanah negara yang berada langsung dibawah kontrol negara; diatas tanah inilah pemerintah Israel membangun pemukiman penduduk Yahudi. Namun ada juga orang Yahudi yang menyerobot tanah milik orang Arab dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut. Sejak tahun 1967, Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan dan Jalur Gaza melalui tindakan kekerasan serta pada saat yang sama terus mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di semua wilayah tersebut.<sup>4</sup>

Yahudi tidak berhak untuk mendirikan pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan, seperti yang telah diperingatkan oleh Amerika Serikat dan PBB. Namun Israel tetap menentang opini dunia dan terus melakukan pembangunan pemukiman penduduk Yahudi.

Pada saat pemerintahan Shamir, Israel telah mengambil sedikitnya 70 persen dari seluruh wilayah Tepi Barat dan 50 persen wilayah di Jalur Gaza. Departemen Perumahan Israel merencanakan pembangunan perumahan bagi sekitar empat juta orang Israel, padahal jumlah orang Palestina saat itu tidak lebih dari 1,7 juta jiwa. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa Israel ingin mengusir bangsa Palestina dari tanah airnya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> M. Riza Sihbudi, *op cit.* Hal 50

<sup>5</sup> Amien Rais, *Prospek Perdamaian Timur Tengah* dalam Himpunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah, UGM, Yogyakarta, 1993, hal 7-8

Pada tahun 1991, terdapat sekitar 250-280 ribu pemukiman Yahudi di Gaza dan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Sedikitnya ada 25.000 rumah dengan bangunan permanen. Daerah pemukiman Yahudi itu tersebar memenuhi hampir semua wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, daerah-daerah sekitar Hebron, Yerusalem, Jericho, Ramallah, Nablus dan Jenin. Daerah-daerah tersebut telah habis digunakan untuk perluasan pemukiman Yahudi.

Pada bulan Mei 1992 Kementrian Luar Negeri Israel melaporkan bahwa Israel telah menyita 55 persen tanah di Tepi Barat, 42 persen di Jalur Gaza dan seluruh Dataran Tinggi Golan dari kepemilikan bangsa Palestina. Seluruh sumber air berada di bawah kontrol Israel dan 30 persen air di Tepi Barat dialihkan ke Israel atau para pemukimnya.

Pada saat Israel dibawah pemerintahan Yitzak Rabin pada Juni 1993, merubah kebijakan tentang pemukiman di wilayah pendudukan dari pemerintah sebelumnya yang menyatakan bahwa pemukiman di seluruh tanah Israel merupakan hak dan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari keamanan nasional Israel.<sup>6</sup> Pada kebijakan baru ini, tindakan yang dilakukan antara lain tidak melanjutkan pembangunan pemukiman baru; membatalkan pembangunan sekitar 5.000 unit rumah tambahan; penghentian deklarasi "tanah negara"; dan menanggukhen pembangunan jalan untuk penghuni dalam wilayah teritori.

Namun pembekuan aktivitas pembangunan pemukiman tersebut tidak berlangsung lama, setelah diketuarkannya perubahan kebijakan tersebut, pemerintah Israel mengumumkan hal-hal sebagai berikut : bahwa pembangunan sekitar 11.000 unit rumah sedang berlangsung (dilanjutkan); dialokasikan dana sejumlah US\$ 36 juta pada 1993 untuk Departemen Perumahan dari Organisasi Yahudi Dunia; membuat komitmen untuk tidak menghentikan atau mengurangi pembangunan di Yerusalem Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Israel selalu mengingkari pernyataan-pernyataan yang telah dibuatnya sendiri.

---

<sup>6</sup> *Journal of Palestine Studies* Vol XXII No 2, 1993, hal 151

Tindakan Yahudi yang mendirikan pemukiman-pemukiman di atas tanah-tanah milik bangsa Palestina menjadi rintangan yang serius bagi usaha-usaha perdamaian kedua negara. Pada dasarnya, negara zionis itu tidak pernah benar-benar memegang erat konsep *land for peace* seperti ketika mulai perundingan perdamaian dengan Palestina pada awal 1990. Apalagi setelah Amerika Serikat pada bulan Maret 1997 memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecah pembangunan pemukiman Yahudi di Har Homa yang telah menyebabkan kerusuhan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.<sup>7</sup>

Masalah perbatasan dan perebutan wilayah kembali memanas ketika terjadi bentrokan berdarah di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang disebabkan oleh kunjungan kontroversial Sharon ke tempat-tempat ziarah muslim di wilayah kota Yerusalem pada 28 September 2000. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan ambisi Sharon bahwa tempat-tempat tersebut tidak akan dilepaskan oleh bangsa Yahudi.

Pada awal tahun 2001, dalam kampanye pemilu, Sharon secara tegas menyatakan bahwa Palestina bisa mendirikan negara merdeka diatas 42 persen wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.<sup>8</sup> Gagasan tersebut tidak hanya memperlihatkan sebuah arogansi, tetapi sekaligus menunjukkan ketidakadilan. Bukankah seluruh daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza merupakan tanah air bangsa Palestina, yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. Atas asas keadilan, seluruh wilayah itu harus dikembalikan kepada Palestina.

Kekerasan-kekeraan yang terjadi di perbatasan masih tetap berlangsung. Serangan bom bunuh diri sering dilakukan oleh warga Palestina yang kemudian dibalas oleh Israel dengan serangan bom dan mortir. Bahkan Israel juga mengerahkan tank-tank dan helikopter buatan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran-sasaran yang diduga sebagai markas Otorita Palestina. Tentu saja banyak korban berjatuhan

<sup>7</sup> Jawa Pos, 6 April 1997

<sup>8</sup> Kompas, 8 Februari 2001

baik itu dari pihak Palestina maupun dari Israel yang terdiri dari warga sipil dan militer.

Pada akhir Maret 2001, Israel dengan helikopter bersenjata dan tank-tank menyerang target di kota Ramallah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Serangan ini merupakan agresi militer pertama yang dilakukan Israel sejak tiga minggu kekuasaan pemerintahan Ariel Sharon.<sup>9</sup> Dalam enam bulan setelah kerusuhan September 2000, jumlah korban tewas mencapai 456 orang, diantara korban tersebut warga Palestina yang terbunuh sebanyak 373.<sup>9</sup>

### 3.3 Proses Perdamaian Israel-Palestina

Proses perdamaian Israel-Palestina sejak meletusnya konflik pada tahun 1967 selalu diupayakan oleh kedua belah pihak dan tidak jarang melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga yang sering melakukan intervensi adalah Amerika Serikat. Keberadaan Amerika Serikat dalam perjalanan menuju perdamaian Israel-Palestina dirasa sangat signifikan, mengingat Amerika Serikat pada saat ini adalah merupakan satu-satunya negara *super power* di dunia ini. Walaupun dalam menghadapi persoalan tersebut, Amerika Serikat masih selalu memperhatikan kepentingannya untuk melindungi Israel sebagai sekutu terdekatnya di kawasan Timur Tengah, sehingga keputusan-keputusan yang diambil setidaknya selalu menguntungkan Israel.

Pembicaraan-pembicaraan damai antara Israel dan Palestina sendiri, masih terus dilakukan. Kedua belah pihak sering mengadakan pembicaraan-pembicaraan damai tentang masalah-masalah keamanan, di wilayah perbatasan dan daerah pendudukan. Namun kekerasan tetap saja terjadi di kawasan konflik yang berupa aksi saling membalas serangan antara kedua pihak dan hal ini banyak sekali menimbulkan korban jiwa.

Kecenderungan memburuknya keadaan muncul dengan naiknya Ariel Sharon di puncak kekuasaan Israel. Sharon memiliki sejumlah reputasi yang memperlihatkan

<sup>9</sup> Kompas, 30 Maret 2001

sikap bermusuhan dan tidak mau kompromi dengan bangsa Palestina (lihat lampiran).<sup>10</sup> Ketegangan dan kekerasan yang terjadi di wilayah konflik ini bersifat siklis dan kemungkinan akan tetap terus berkobar. Gelombang kekerasan yang terjadi sekitar lima bulan sejak intifada Al Aqsa 28 September 2000 tidak hanya menghentikan proses perdamaian, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang hancurnya momentum perdamaian yang sulit sekali muncul dalam hubungan permusuhan Yahudi dengan Palestina yang sudah berlangsung berabad-abad.<sup>11</sup>

Terlepas dari semua hal di atas, pembicaraan dan perundingan damai masih tetap dilangsungkan walaupun disela-sela kekerasan yang masih terus terjadi. Diharapkan kedua belah pihak dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, karena hanya dengan kondisi yang tenang sajalah perundingan damai dapat dilangsungkan antara kedua pihak yang sedang bertikai.

### **3.3.1 Peran Amerika Serikat Dalam Masalah Perdamaian Israel-Palestina**

Sejarah hubungan politik Amerika Serikat-Palestina berawal pada tahun 1974 dan mencapai puncaknya pada keputusan untuk mengadakan pembicaraan langsung di Tunisia pada pertengahan Desember 1988. Pembicaraan dengan Amerika Serikat dipandang sangat perlu dan penting dalam upaya untuk meminta Washington menggunakan pengaruhnya terhadap Israel, membujuk sekutu dekatnya tersebut membuka mata untuk menyelesaikan masalah Palestina secara damai dan adil guna menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

Pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter muncul pernyataan politik mengenai masalah Timur Tengah yang sangat membesarkan hati rakyat Palestina. Yaitu harus diusahakan tanah air bagi rakyat Palestina yang sudah menderita selama bertahun-tahun. Hal ini dinyatakan pada bulan Maret 1977 dan untuk mendukung pernyataan ini kemudian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada bulan

<sup>10</sup> Jawa Pos, 4 Februari 2001

<sup>11</sup> Kompas, 16 Februari 2001

September 1977 menegaskan bahwa rakyat Palestina haruslah menjadi bagian yang harus diikutsertakan dalam setiap proses perundingan damai Timur Tengah.

Prakarsa yang diambil Carter mencapai puncaknya pada tahun 1979, beberapa saat menjelang kejatuhannya. Pada tanggal 26 Maret 1979, Mesir dan Israel mengadakan perjanjian Camp David atas prakarsa Amerika Serikat. Namun hal itu dikecam oleh Arafat dan sejak saat itu rintisan hubungan baik Amerika Serikat dan Palestina mulai goyah menuju keruntuhan.

Pada masa pemerintahan Ronald Reagan, Amerika Serikat berusaha untuk melanjutkan kembali pendekatan-pendekatan dengan Palestina yang sudah dirintis oleh Carter. Ia mengawalinya dengan mengajukan suatu rencana perdamaian Timur Tengah bulan September 1982. Namun hal ini langsung ditolak Palestina dan membuat hubungan mereka menjadi tegang kembali. Keadaan ini semakin tegang ketika Amerika Serikat menuduh PLO mendalangi berbagai aksi teror di berbagai penjuru dunia.

Atas usaha keras dari PLO, dibawah situasi memburuknya hubungan PLO dan Amerika Serikat, akhirnya Arafat bisa berpidato di depan Majelis Umum PBB pada bulan Desember 1988, setelah sebelumnya hal tersebut dihalang-halangi oleh Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Arafat menyatakan bahwa Palestina akan berusaha keras mencapai penyelesaian tuntas yang menjamin semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk Palestina, Israel dan para tetangganya untuk memperoleh hak hidup dalam kedamaian dan keamanan.

Tanggal 14 Desember 1988, Gedung Putih menyatakan pernyataan Arafat tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang diajukan Amerika Serikat bagi perundingan langsung antara pejabat Amerika Serikat dan PLO. Akhirnya, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 1988, Duta Besar Amerika Serikat untuk Tunisia Robert Pelltreau mengontak markas besar PLO di Tunisia untuk mengadakan dialog resmi pertama. Peristiwa ini di satu pihak merupakan peluang yang sangat baik bagi Palestina dan Amerika Serikat untuk memulai lagi hubungan yang sudah kusut

selama pemerintahan Ronald Reagan. Di lain pihak, hal ini menimbulkan rasa tidak enak bagi pemerintah Israel.

Pembicaraan langsung antara Amerika dan PLO yang kemudian disusul oleh beberapa negara sekutu dan sahabat Amerika Serikat memberikan kesan bahwa ada sebuah titik terang bagi perjuangan bangsa Palestina dalam mencapai kemerdekaannya. Hal ini juga bisa dilihat dari beberapa peristiwa politik yang mengikutinya. Antara lain adalah proklamasi kemerdekaan negara Palestina, yang langsung mendapat pengakuan dari beberapa negara; Yasser Arafat berpidato pada sidang Majelis Umum PBB pada pertengahan Desember 1989 di Jenewa dan pidato ini mendapat dukungan resmi dari PBB atas negara Palestina merdeka; keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai berbagai masalah internasional.

Kecenderungan yang kuat untuk berunding dengan Palestina, makin nyata di AS pada masa pemerintahan George Bush. Hal ini terlihat ketika Palestina mencetuskan perjuangannya diatas dua kaki. Kaki yang satu diplomasi Palestina di gelanggang internasional, dan kaki yang lain perjuangan rakyat Palestina di wilayah yang diduduki Israel.

Inti dan dasar perubahan sikap Amerika terhadap masalah Palestina, sebenarnya berkisar pada peristiwa-peristiwa politik yang telah ditampilkan oleh perjuangan rakyat Palestina untuk berdamai dengan Israel di Timur Tengah. Peristiwa politik tersebut meliputi: Proklamasi kemerdekaan Palestina; penerimaan Resolusi PBB No 242 dan 338; mengakui hak eksistensi Israel untuk hidup dengan aman dan Palestina menentang terorisme dalam segala bentuk. Kebijakan pemerintah Amerika ini berlanjut pada saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Bill Clinton.

Sementara itu, pada saat-saat terakhir jabatan kepresidenannya, Clinton mengeluarkan suatu proposal yang isinya menghimbau agar Palestina tidak lagi meminta menempatkan kembali para pengungsi serta keturunannya di Israel. Sebagai imbalannya, Israel akan melepaskan kontrolnya atas tempat suci Yerusalem yang selama ini menjadi salah satu pokok perdebatan serta perbedaan sikap Israel-Palestina. Proposal damai Presiden Clinton ini juga memuat berdirinya negara



Palestina yang berdaulat dengan menjaga sepenuhnya keamanan Israel, kota Yerusalem yang terbuka dan hak pengungsi Palestina kembali ke negara Palestina. Namun pihak Palestina menyambut dingin proposal damai Bill Clinton tersebut.<sup>12</sup>

Amerika Serikat pada saat awal pemerintahan Presiden George W. Bush kembali berperan dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Hal ini ditandai dengan kunjungan Menlu Amerika Serikat, Colin Powell ke Ramallah, Tepi Barat yang bertemu langsung dengan Yasser Arafat. Dalam pertemuan tersebut Arafat meminta AS membantu menghentikan blokade Israel pada warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat kemudian Powell mendukungnya. Dalam pertemuan itu, Arafat juga menyerukan pemerintah baru Israel kembali ke meja perundingan. Menanggapi permintaan Palestina tersebut, Powell menyatakan sependapat. Namun dia juga menyerukan agar aksi-aksi kekerasan dihentikan.<sup>13</sup>

Presiden George W. Bush akan tetap memegang peranan penting dalam proses perdamaian. Bush menyatakan khawatir terhadap peningkatan kekerasan di Timur Tengah. Untuk itu Palestina dan Israel harus menganihil langkah-langkah penting untuk meredakan ketegangan. Bush juga tidak menolak akan campur tangan. "Tujuan kami adalah mendorong serangkaian langkah timbal balik dan paralel oleh kedua belah pihak yang akan menghentikan peningkatan kekerasan, memberikan keamanan dan keselamatan bagi warga sipil di kedua pihak, dan memulihkan kehidupan normal setiap orang di wilayah itu" kata Bush.<sup>14</sup>

Peranan Amerika Serikat dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina dalam beberapa hal memang sangat penting. Namun perlu diingat bahwa Israel adalah "anak emas" Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Hal ini menyebabkan AS akan berpikir dua kali apabila perundingan-perundingan antara Israel-Palestina lebih banyak merugikan Israel. Amerika Serikat akan bersikap sangat hati-hati dalam melindungi kepentingan-kepentingannya di Timur Tengah. Dari sini akan terlihat

<sup>12</sup> Kompas, 8-9 Januari 2001

<sup>13</sup> Jawa Pos, 26 Februari 2001

<sup>14</sup> Jawa Pos, 31 Maret 2001

sikap ambiguitas AS dalam menangani masalah di Timur Tengah. Hal ini pula yang menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

### **3.3.2 Perkembangan Proses Perdamaian Israel-Palestina**

Usaha-usaha perdamaian antara Israel dan Palestina dibuka dengan berkuasanya kembali partai Buruh di pemerintahan. Hal ini dimulai dengan Konferensi Perdamaian Timur Tengah (KPTT) yang dilangsungkan di Madrid, Spanyol pada tahun 1991. Berikut ini tahapan dari KPTT.

1. KPTT I: diadakan di Madrid pada bulan Oktober-Nopember 1991. Dalam konferensi ini Israel menegaskan bahwa yang terpenting adalah eksistensi negara Israel. Israel menolak Resolusi 242 dan 338, menolak menarik pasukan dari daerah pendudukan, menolak untuk menyerahkan kembali wilayah Arab yang didudukinya saat ini, serta menolak untuk menghentikan pembangunan pemukiman baru di daerah pendudukan.

2. KPTT II: diadakan di Washington pada bulan Desember 1991-Februari 1992. Perundingan putaran II ini berlangsung berlarut-larut. Delegasi Palestina ingin memisahkan diri dari delegasi Yordania. Pihak Israel menolak ikut sertanya orang-orang Palestina dari Yerusalem Timur dalam perundingan.

3. KPTT III: diadakan di Moskwa pada akhir Januari 1992. Dalam perundingan ini banyak delegasi yang tidak hadir. Israel menyatakan tetap tidak akan mundur dari wilayah Arab yang didudukinya.

4. KPTT IV: diadakan di Washington bulan Februari-Maret 1992. Dalam konferensi tersebut Menteri Luar Negeri AS tidak akan memberikan jaminan kredit 10 miliar dollar jika Israel tidak membekukan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Kedua pihak saling menolak usulan-usulan yang disampaikan. Namun kedua pihak sepakat bahwa KPTT memang bermaksud untuk mencari rumusan tentang bentuk pemerintahan mandiri bagi bangsa Palestina di wilayah pendudukan.

5. KPTT V: diadakan di Washington pada bulan April 1992. Dalam perundingan ini Palestina kembali menanyakan mengenai rencana pembentukan otonomi luas sebagaimana diusulkan pada KPTT IV dan pihak Israel menolaknya. Israel hanya dapat menyelenggarakan pemilihan tingkat kotapraja (Municipal election) bagi kota-kota di wilayah pendudukan.

Hal tersebut merupakan hasil perundingan rahasia: PLO-Israel yang pernah dilakukan di Oslo, Norwegia pada 20 Agustus 1993 dan kemudian diresmikan di Gedung Putih tanggal 13 September 1993. Isi pokok kesepakatan tersebut adalah mengenai otonomi pemerintahan sementara Palestina di Jalur Gaza dan Jericho.<sup>15</sup> Perundingan tersebut lebih dikenal dengan perjanjian Oslo I atau Deklarasi Prinsip.

Perundingan dilanjutkan di Taba, Mesir, sebuah kota peristirahatan di Laut Merah pada 13 Oktober 1993 guna membahas rancangan secara rinci otonomi Palestina. Puncaknya terjadi ketika Israel dan Palestina pada tanggal 4 Mei 1994 menandatangani kesepakatan yang memberikan otonomi pertama kepada Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki Israel sejak tahun 1967. Kesepakatan ini menyerukan penarikan Israel namun mengizinkan militer tetap menjaga pemukiman Yahudi yang terdiri dari 40% di Jalur Gaza.<sup>16</sup>

Setelah Israel menarik mundur pasukannya dari Jalur Gaza dan Jericho, selanjutnya tujuh kota di Tepi Barat yakni Nablus, Kalkiliya, Thulkarem, Jenin, sebagian Hebron dan Ramallah serta 450 desa diserahkan pula kepada Otorita Palestina. Kesepakatan ini dicapai antara Israel dan PLO di Taba pada tanggal 22 September 1995. Perundingan ini dikenal dengan perjanjian Oslo II, tindak lanjut dari perjanjian Oslo I. Namun kesepakatan perundingan tersebut bukan berarti perdamaian telah terwujud, karena adanya pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan persetujuan tersebut. Dan hal ini dilakukan oleh pihak Israel.

Pada awal Nopember 1995, terjadi pembunuhan terhadap Perdana Menteri Yitzak Rabin dimana hal itu dianggap sebagai penghambat proses perdamaian Israel-

<sup>15</sup> Kompas, 15 September 1993

<sup>16</sup> Kompas, 4 Mei 1996

Palestina. Karena Rabin dipandang sebagai satu-satunya penguasa Israel yang berani melakukan perdamaian dengan PLO.

Pada bulan Oktober 1996, perundingan antara PLC-Israel membahas penyelesaian penarikan mundur pasukan Israel dari kota Hebron, Tepi Barat. Namun kedua pihak saling menuduh tidak ada kemauan untuk segera mencapai kesepakatan dalam pembicaraan maraton tentang penarikan Israel dari Hebron. KTT Israel-Palestina yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, 24 Desember 1996 menyepakati penyerahan 80% wilayah kota Hebron di Tepi Barat. Hal ini menimbulkan kemarahan warga Yahudi di Hebron. Protes terhadap kesepakatan ini dilontarkan Ariel Sharon yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Infrastruktur Israel, yang menyatakan bahwa pemerintah Netanyahu telah melemah akibat tekanan dari dunia Arab.<sup>17</sup>

Sementara itu kesepakatan KTT Israel-Palestina tanggal 24 Desember 1996 disambut gembira oleh warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza khususnya Hebron. Kesepakatan KTT tersebut mempunyai arti penting bagi perjalanan perdamaian kedua negara. Masa depan perdamaian antara Israel dan Palestina yang otentis serta kedaulatannya sudah mendapat pengakuan dari PBB agak terbuka. Sikap Israel yang seringkali mengingkari kesepakatan perdamaian timbul karena alasan melindungi warganya harus dihentikan. Pecahnya proses perdamaian antara kedua negara secara berulang-ulang selalu muncul bukan karena inisiatif pemerintahnya melainkan seringkali timbul oleh sebab ulah seorang atau sekelompok kecil warga Yahudi dari golongan ultra kanan atau garis keras melalui tindakan-tindakan provokasi dengan menyerang warga Palestina yang kemudian memicu gerakan intifada secara meluas.

Untuk pertama kalinya sejak teretusnya intifada Al-Aqsa tanggal 28 September 2000, perundingan keamanan Israel-Palestina yang dilangsungkan di Erez, sebuah tempat di perbatasan Israel-Jalur Gaza pada tanggal 10-11 Januari 2001

---

<sup>17</sup> Kompas, 26 Desember 1996

berhasil mencapai kesepakatan yang cukup penting dibidang keamanan, yaitu memulai patroli bersama di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Dalam kesepakatan tersebut, Israel juga mulai mencabut blokade atas kota Kalkiliya di Tepi Barat, membuka pos penyeberangan ke Mesir dan Yordania, dan pintu gerbang Karni yang merupakan pintu perdagangan utama antara Jalur Gaza dan Israel selama ini. Selain itu Israel juga membuka kembali jalan penghubung Gaza City dan Khan Yunis di Jalur Gaza. Sebagai imbalannya, Yasser Arafat menginstruksikan kepada para komandan keamanan Palestina untuk mencegah aksi kekerasan dan mencegah warga Palestina melakukan tembakan dengan sasaran Israel.<sup>18</sup> Kesepakatan keamanan ini tentu saja sangat menentramkan, namun masyarakat internasional masih pesimis akan terciptanya keamanan dan perdamaian abadi di wilayah ini.

Sejak berkuasanya Ariel Sharon ke kursi Perdana Menteri Israel, proses perdamaian kembali tersendat. Sharon mengirim pesan yang berisi ancaman kepada Yasser Arafat. Hal ini berupa pembatalan penghentian blokade apabila pihak Otorita Palestina tidak menghentikan tindak kekerasan di wilayahnya.

Sharon, pada bulan Maret 2001 berpidato di depan Knesset menegaskan kesediannya mencapai kesepakatan yang menyakitkan dengan Palestina demi terwujudnya perdamaian. "Kami akan megulurkan tangan pada Palestina demi perdamaian" kata Sharon yang juga banyak menyinggung masalah perdamaian dengan negara Arab tetangganya. Ia juga kembali menegaskan agar Palestina tidak melakukan tindakan kekerasan dan perundingan damai tidak mungkin dimulai selama aksi kekerasan masih berlangsung.<sup>19</sup>

Pembicaraan-pembicaraan damai antara kedua pihak terus berlangsung baik melalui pertemuan-pertemuan rahasia maupun melalui KTT. Namun masalah kekerasan adalah masalah utama yang menjadi penghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Kedua negara baik Israel maupun Palestina, sama-sama saling

---

<sup>18</sup> Kompas, 12 Januari 2001

<sup>19</sup> Kompas, 9 Maret 2001

menuduh bahwa masing-masing pihak melakukan tindakan kekerasan. Sehingga hal ini dijadikan alasan untuk enggan melakukan perundingan damai. Terlebih lagi Israel dibawah kepemimpinan Sharon yang notabene bergaris keras dan lebih suka menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyikapi permasalahan dengan Palestina, sehingga membuat jurang ke arah perdamaian semakin lebar.

Sementara itu Dewan Keamanan PBB mendesak Israel-Palestina segera melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam laporan Mitchell tentang Timur Tengah, juga untuk segera membangun kepercayaan diantara kedua pihak. Komisi internasional pemberi rekomendasi tersebut dibentuk pada bulan Oktober 2000 dengan menggunakan nama ketuanya, mantan senator Amerika, George Mitchell. Komisi ini meneliti kerusuhan di Timur Tengah yang menewaskan lebih dari 560 orang, sebagian besar orang Palestina, mulai kerusuhan Oktober 2000. Laporan rekomendasi ini menyerukan penghentian segera dan tanpa syarat terhadap kerusuhan, penghentian pembangunan pemukiman Yahudi dan tindakan lebih keras Palestina terhadap "terorisme".

Sharon secara terbuka mendukung himbauan laporan Komisi Mitchell bagi diakhirinya kerusuhan di Timur Tengah, tapi dia menolak menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi seperti yang dituntut Palestina. Sharon juga mengajak Palestina mengadakan gencatan senjata.<sup>20</sup> Namun dengan meneruskan pembangunan pemukiman, Palestina melihat hal itu sebagai sikap yang akan menghambat proses menuju perdamaian.

Pihak Palestina juga menanggapi rekomendasi tersebut dengan mengumumkan gencatan senjata dari Yasser Arafat, menyusul terjadinya bom bunuh diri yang menewaskan 21 remaja Yahudi. Kedua negara berusaha untuk menahan diri dan menghormati gencatan senjata tersebut. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa sikap menahan diri jangan ditafsirkan sebagai ketidakberdayaan. "Menahan diri adalah bagian dari kekuatan" demikian kata Sharon menanggapi kubu kanan

---

<sup>20</sup> Surya, 24 Mei 2001

Israel yang meminta agar segera melancarkan serangan balas dendam kepada Palestina.<sup>21</sup>

Menanggapi seruan Arafat tersebut, salah seorang pemimpin faksi Fatah di Tepi Barat juga menegaskan akan menghormati keputusan gencatan senjata itu. Hal ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan pihak Palestina, dimana mereka memberi peluang bagi berakhirnya perang, namun pemerintah Israel juga harus menghentikan agresinya terhadap rakyat Palestina.

---

<sup>21</sup> Kompas, 5 Juni 2001

#### IV. MASA DEPAN PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA DIBAWAH KEPEMIMPINAN ARIEL SHARON

##### 4.1 Kebijakan Politik PM Ariel Sharon/Partai Likud Terhadap Masalah Palestina

Partai Likud yang terkenal bersifat keras dan enggan untuk berkompromi dengan negara-negara Arab khususnya Palestina dapat dilihat dari platform partai tersebut. Likud mengakui hak masyarakat Yahudi atas Daerah Eretz adalah kekal dan tidak ada satu bangsapun yang boleh melanggar perdamaian dan keamanannya. Daerah Eretz Israel ini termasuk di daerah Yudea dan Samaria (Tepi Barat), serta Jalur Gaza. Sedangkan Yerusalem adalah ibukota Israel yang utuh dan abadi.<sup>1</sup>

Dalam kaitannya dengan Palestina platform Likud menyebutkan bahwa tidak akan ada perundingan dengan orang-orang pembunuh yang mencoba menghancurkan Israel. Israel harus menegakkan hukum di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza dan tidak akan pernah ada negara Palestina merdeka. Persetujuan Camp David adalah jaminan bahwa tidak akan ada lagi pembagian wilayah Israel terhadap bangsa Arab.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, partai Likud yang didirikan pada tahun 1973 adalah sebagai gerakan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan wilayah yang telah direbut Israel sejak 1967.

##### 4.1.1 Latar Belakang Politik Ariel Sharon

Sejarah Sharon terkenal penuh dengan lumuran darah rakyat Palestina. Ia dilahirkan di Kafr Malal, Palestina pada tahun 1928 dengan nama Ariel Shinerman. Pada usia 17 tahun, Sharon bergabung dengan organisasi Hagane yang mempunyai aktifitas menteror rakyat Palestina. Dalam melancarkan aksi teror, Sharon secara bergantian berada dibawah komando David Ben Gurion, Yitzak Shamir, dan Yitzak

<sup>1</sup> Yehuda Lukacs, *The Israeli-Palestinian Conflict a Documentary Record 1967-1990*. Press Syndicate of The University of Cambridge, 1992, hal 54

<sup>2</sup> Ibid, hal 77



Rabin. Sharon tercatat ikut serta dalam pembantaian Desa Deir Yasin pada tanggal 10 April 1948 yang menewaskan 360 warga Palestina dan membunghanguskan semua rumah milik warga Palestina di desa tersebut. Setelah deklarasi negara Israel pada tahun 1948, Sharon melanjutkan study di bidang hukum pada Universitas Hebrew, Yerusalem.

Pada tahun 1953, Sharon membentuk satuan khusus 101 yang para anggotanya dijuluki "setan". Sharon dalam memoarnya mengakui melakukan lima kali pembantaian terhadap warga Palestina dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1956. Dari lima pembantaian tersebut, yang paling terkenal adalah pembantaian Kibya yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1953. Saat itu 600 tentara dibawah komando Sharon mengepung sebuah desa Kibya kemudian membombardirnya dengan artileri yang menewaskan 156 warga Palestina dan menghancurkan 56 rumah dan masjid.

Pada waktu perang tahun 1967 dengan Mesir, Sharon ditunjuk sebagai komandan jalur Matla, perbatasan Israel-Gurun Sinai. Saat itu Sharon berhasil menangkap 300 tentara Mesir yang kemudian disuruhnya bertiarap dan selanjutnya dilindas dengan tank. Sungguh merupakan tindakan yang sangat-sangat keji. Pada tahun itu pula Sharon melakukan pembantaian di Khan Yunis, Jalur Gaza yang menewaskan 250 warga Palestina.<sup>3</sup>

Ariel Sharon yang besar dari partai Likud, pada pemilu Februari 2001 berhasil memenangkan kursi Perdana Menteri Israel. Kemenangannya tidak tanggung-tanggung, ia unggul atas kandidat Partai Buruh, Ehud Barak dengan skor 62,39-37,61 persen yang berarti selisih 25 persen. Hal ini tercatat sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah pemilu Israel. Akan tetapi ia tetap lemah secara politik. Bahkan Sharon mungkin Perdana Menteri Israel terlemah sepanjang sejarah negara Israel.

Ada tiga titik lemah Sharon secara politik. *Pertama*, usianya yang sudah lanjut, 73 tahun. Hal ini menyebabkan Sharon tidak memiliki kemampuan maksimal

<sup>3</sup> Musthafa Abd. Rahman. 2001. "Sharon dan Mimpi Buruk Bangsa Arab". Dalam *Kompas*, 8 Februari. Jakarta

dalam mengontrol kekuasaan. Anak sulung Sharon, Omrie Sharon, dan teman-teman dekat Sharon dipastikan banyak melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan.

*Kedua*, kontradiksi kepentingan dari basis politik pendukung Ariel Sharon saat ini. Mereka merupakan aliansi kaum Nasionalis Yahudi Radikal, Yahudi Ortodoks, dan imigran Yahudi asal Rusia. Aliansi mereka ini bersifat sangat sementara. Kaum Nasionalis Yahudi dan Yahudi Ortodoks misalnya, terkenal berbeda pendapat sengit soal merumuskan hubungan agama dan negara di Israel.

*Ketiga*, pertarungan elit ditubuh partai Likud sendiri dengan kubu mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Ariel Sharon. Kubu Netanyahu menginginkan pemerintahan Sharon ambruk dalam beberapa bulan saja untuk membuka jalan digelarnya pemilu lagi. Hal ini dapat dipahami karena pemilu Israel yang akan datang menggunakan sistem pemilu lama, yaitu hanya memilih anggota Knesset. Ketua partai peraih kursi terbanyak akan mendapat wewenang pertama membentuk kabinet. Diduga Netanyahu akan mudah mendepak Sharon dalam forum pemilihan ketua partai Likud mendatang, mengingat basis politik Netanyahu ditubuh partai Likud jauh lebih kuat.<sup>4</sup>

Dengan segala kelemahannya, Sharon berusaha keras untuk membentuk suatu pemerintahan Persatuan Nasional yang melibatkan Partai Buruh. Akhirnya dengan segala cara Sharon berhasil membentuk kabinet Persatuan Nasional pada tanggal 27 Februari 2001. Hal ini merupakan sebuah catatan awal yang cukup baik di dunia politik praktis. Ia dapat mengambil pelajaran dari kesalahan kedua pendahulunya, Barak dan Netanyahu. Koalisi tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk mencegah perpecahan dalam masyarakat Israel, selain itu koalisi ini muncul untuk menghadapi konflik Israel-Palestina yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Sehingga ia berupaya dengan segala cara membentuk pemerintahan Persatuan Nasional dengan spektrum politik yang luas, dengan melibatkan Partai Buruh.

---

<sup>4</sup> Musthafa Abd. Rahman. 2001. "Skenario Kabinet Ariel Sharon". Dalam *Kompas*, 11 Februari Jakarta

Sharon juga berani membayar harga politik yang cukup mahal demi terbentuknya pemerintahan Persatuan Nasional. Ia menawarkan jabatan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan – selain enam jabatan menteri lainnya – kepada Partai Buruh. Jabatan Menlu dan Menhan adalah merupakan jabatan paling strategis setelah jabatan Perdana Menteri dalam konteks politik Israel.<sup>5</sup>

Keberhasilan Sharon membujuk tokoh-tokoh kunci kiri Israel itu adalah berkat kelihaiannya memainkan manuver politik. Sharon mengancam akan meninggalkan partai-partai kanan Israel, dengan membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional atas basis politik yang sempit, yakni terbatas dengan Partai Buruh dan partai kiri lainnya. Ancaman ini akhirnya memaksa para pemimpin Partai Likud lainnya menocrima jabatan menteri yang kurang populer dibanding dengan jabatan menteri yang diberikan kepada Partai Buruh.

Namun tantangan selanjutnya adalah, mampukah Sharon membawa pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpinnya itu menciptakan perdamaian dengan negara-negara Arab tetangganya, khususnya Palestina.

Komposisi koalisi Ariel Sharon memang tidak menjanjikan adanya angin segar terhadap proses perdamaian Timur Tengah. Pilar-pilar politik yang menentang keras KTT Camp David II masih bercokol kuat, bahkan lebih kuat lagi ditubuh pemerintah Persatuan Nasional. Oleh karena itu beban Ariel Sharon sangat berat untuk mengakomodasikan kotradiksi kepentingan antara anggota pemerintah Persatuan Nasional menyangkut proses perdamaian dengan Palestina.

#### **4.1.2 Fisi Partai Likud Terhadap Pemukiman Yahudi di Daerah Pendudukan**

Konstitusi partai Likud yang mengesankan tidak adanya kompromi dengan Palestina yang telah ditawarkan untuk direalisasikan Benjamin Netanyahu diteruskan oleh Perdana Menteri terpilih, Ariel Sharon.

<sup>5</sup> Musthafa Abd. Rahman. 2001. "Perdamaian dan Pemerintah Persatuan" Dalam *Kompas*, 9 Maret. Jakarta

Dalara hal pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan, partai Likud bersikeras untuk terus melanjutkannya walaupun kadang mendapat tentangan dari Amerika Serikat. Seperti juga yang pernah dikatakan mantan Perdana Menteri Netanyahu kepada kongres Amerika bahwa Israel akan tetap bersikeras mempertahankan hak orang Yahudi untuk tinggal dimana saja yang mereka sukai di wilayah Israel dan daerah-daerah pendudukan. Hal ini yang menjadi dasar Sharon untuk terus melanjutkan kebijakannya membangun pemukiman-pemukiman baru.

Rencana menyeluruh pemukiman Yahudi di Tepi Barat diformulasikan oleh Departemen Pemukiman Zionis yang bekerja sama dengan pemerintah Israel dan IDF (angkatan bersenjata Israel). Perencanaan ini meliputi sampai pada tahun 2010 yang rencananya akan dimukimkan sekitar setengah juta orang Yahudi. Lebih jauh, Departemen Organisasi Zionis telah menyiapkan "rencana seratus ribu" yang menginginkan dalam 30 tahun di Tepi Barat akan ada 165 daerah pemukiman dengan penghuni sebanyak 1.300.000 orang Yahudi. Tujuan akhir rencana pemukiman selama 30 tahun adalah persebaran penduduk Yahudi di wilayah yang cukup penting ini dapat terlaksana secepat mungkin. Para pembuat kebijakan Israel sangat sadar bahwa bila daerah Tepi Barat telah dipenuhi oleh orang-orang Yahudi maka klaim Arab Palestina terhadap wilayah tersebut dapat diruntuhkan.

Israel memacu pertumbuhan pemukiman untuk menghadapi populasi rakyat Palestina di Tepi Barat yang pada tahun 1987 berjumlah sekitar 300.000 jiwa. Pada tahun yang sama, di Jalur Gaza jumlah penduduk Palestina sekitar 520.000 jiwa dan di Israel sendiri penduduk Arab berjumlah 620.000 jiwa. The Middle East edisi Mei 1992, menulis data bahwa ada kecenderungan peningkatan jumlah penduduk Yahudi di Israel dan daerah pendudukan antara tahun 1991-2000.

Dengan kondisi demikian, pemerintah Israel berdalih, bahwa pembangunan pemukiman di Tepi Barat akibat adanya permintaan (demand). Menurutnya, banyak masyarakat Yahudi yang ingin tinggal di wilayah tersebut. Pemerintah Israel membagi Tepi Barat menjadi tiga *demand zone*. Pertama, daerah dengan peminat tinggi, sekitar 30 menit perjalanan darat dari Tel Aviv. Dalam tahun 2010

diperkirakan daerah ini sudah ditempati sekitar 250.000-450.000 orang Yahudi atau sekitar 65-75 persen dari total penduduk Yahudi di Tepi Barat.

Kedua, daerah peminat sedang, dari Tel Aviv daerah ini memakan waktu 50 menit. Di daerah sebelah timur dari daerah dengan peminat tinggi ini, pada tahun 2010, akan ditempati sekitar 100.000-150.000 orang Yahudi atau sekitar 20-25 persen dari total penduduk Yahudi di Tepi Barat.

Ketiga, daerah dengan peminat rendah. Di daerah paling timur Tepi Barat ini, pada tahun 2010 akan ditempatkan 40.000-70.000 pemukim Yahudi atau sekitar 10-15 persen.<sup>6</sup>

Dengan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Israel, serta target yang ingin dicapai untuk memukimkan kaum Yahudi di daerah pendudukan, nampak bahwa ketetapan partai Likud yang menganggap bahwa Yudea dan Samaria (Tepi Barat) serta Jalur Gaza merupakan wilayah yang memang diperuntukkan kaum Yahudi, akan terustetap direalisasikan apapun risikonya.

Hal ini mulai lagi diperlihatkan Israel dengan menyetujui pembangunan pemukiman lebih dari 700 rumah yang dibangun di dua pemukiman di wilayah Tepi Barat. Pembangunan ini dilakukan ditengah seruan dunia internasional untuk membekukan aktivitas yang berkaitan dengan pemukiman di daerah pendudukan. Tentu saja langkah ini mendapat kecaman dari Palestina.

Menteri Perumahan Nathan Sharansky menyatakan bahwa ia telah memberikan lampu hijau untuk membangun 993 unit rumah di Maale Adumim, pemukiman Yahudi terbesar yang terletak di selatan Yerusalem. Sisanya, 217 unit dibangun di Alfei Menashe, sebelah utara Tepi Barat. "Adalah hal yang penting untuk menanggapi desakan kebutuhan perumahan di pemukiman tersebut, yang pembangunannya memenuhi konsensus di antara populasi Israel." Katanya.<sup>7</sup>

Sebuah tim internasional pimpinan mantan senator Amerika, George Mitchell menyerukan agar dilakukan pembekuan sepenuhnya pembangunan konstruksi di

<sup>6</sup> Europe Publication, *The Middle East and North Africa*, edisi 37, 1992, hal 99

<sup>7</sup> Republika, 30 Mei 2001

wilayah kekuasaan, Palestina. Mereka juga menyerukan agar aksi kekerasan yang berlangsung hampir 8 bulan terakhir dihentikan.

Keputusan Israei untuk melakukan pembangunan ini dinilai Otorita Palestina sebagai langkah yang membahayakan misi yang diemban utusan Amerika William Burns yang bertugas untuk mendesak diterapkannya misi laporan Mitchell. Namun disayangkan bahwa agenda perdamaian Presiden George W. Bush yang ditawarkan lewat rekomendasi Mitchell ditolak oleh Ariel Sharon.<sup>8</sup>

Ariel Sharon hanya menyerukan kepada bangsa Palestina untuk menyetop aksi kekerasan dan intifada untuk memasuki proses-proses yang dapat membangun kepercayaan antar kedua pihak. Dan ia berkeyakinan akan meremukan cara untuk dapat memuaskan bangsa Palestina dan tetap melanjutkan pembangunan pemukiman baru sesuai dengan kebutuhan sekarang. Tapi Sharon tidak mengatakan soal pemindahan pemukiman Yahudi di Palestina yang selama ini sering menjadi pemicu kerusuhan.

#### 4.1.3 Fisi Partai Likud Terhadap Status Kota Yerusalem

Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama utama di dunia yaitu Islam, Kristen dan Yahudi yang secara *de facto* kota Yerusalem saat ini dikuasai oleh Yahudi Israel. Partai Likud yang saat ini berada di tampuk kekuasaan Israel tetap berpendirian bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang utuh dan abadi. Karena itulah setiap kebijakan partai Likud dalam status akhir kota Yerusalem selalu menunjukkan sikap yang tidak mau berkompromi dengan Palestina.

Dari hal tersebut, secara eksplisit mengindikasikan Likud tidak mau mengakui persetujuan yang telah ditandatangani di Washington tahun 1993, antara Arafat dan Rabin tentang otonomi Palestina. Hal ini mengingat bagi partai Likud mengenai masalah Yerusalem, memilih kepentingan ideologi dan moral yang sangat besar dan

---

<sup>8</sup> Republika, 9 Maret 2001

sejak dulu mereka rela menerima kutukan internasional asalkan dapat mempertahankan daerah-daerah yang diklaim sebagai wilayah Israel.

Kegigihan Israel dalam memperjuangkan Yerusalem sebagai bagian integral dari negaranya tidak bisa dipisahkan dari doktrin *founding fathers* negaranya. Adalah David Ben Gurion yang pernah menyatakan bahwa “Yerusalem adalah jantung dari jantungnya Israel.....Kita tidak membayangkan PBB akan berusaha memisahkan Yerusalem dari Israel, atau mencurigai kedaulatan Israel atas ibu kota abadinya.” Bahkan Ben Gurion juga menantang masyarakat internasional dengan memindahkan kantor Perdana Menteri Israel ke Yerusalem. Dia menyatakan bahwa awal tahun 1950 sebagai hari perpindahan semua kantor pemerintahan Israel ke Yerusalem kecuali kantor Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan serta Markas Besar Polisi Nasional.<sup>9</sup>

Perdebatan tentang status kota Yerusalem terus berlangsung dan menjadi salah satu sebab alatnya perundingan damai antara Israel dan Palestina. Pada perundingan Taba, profesor Moshe Amizav dari Universitas Haifa menawarkan dua alternatif solusi menyangkut kedaulatan atas tempat-tempat suci Yerusalem Timur. *Pertama*, diciptakan semacam wilayah suci yang kedaulatannya dimiliki bersama Israel dan Palestina. Wilayah suci ini bisa diperluas meliputi Jabal Zaitun dan David City (Kota Salwan).

*Kedua*, diciptakan kekuasaan khusus, dimana Palestina menguasai distrik Islam, Kristen dan Armenia. Sementara Israel menguasai distrik Yahudi dan Tembok Ratapan. Sedangkan kompleks Masjid Al Aqsa (Haram As Sharif) bisa dikuasai aparat internasional dan sejumlah negara Arab lainnya. Dalam alternatif kedua itu, semua pihak hanya memiliki kekuasaan tanpa kedaulatan.<sup>10</sup>

Sementara dalam perundingan mengenai kompleks Masjid Al-Aqsa, menghasilkan empat konsep solusi Yerusalem:

1. Desakan Israel atas kedaulatan atas Haram As-Sharif tetap saja di edepankan dalam semua proposalnya. Untuk menangkis penolakan

<sup>9</sup> Paul Findley, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi*, Mizan, Bandung, 1995, hal 250

<sup>10</sup> Republika, 25 Januari 2001

atas kontrol Israel di Haram, ahli hukum Amerika memunculkan sejumlah "solusi". Pertama, melibatkan komite internasional termasuk Dewan Keamanan PBB dan Morocco (sebagai ketua Organisasi Komite Konferensi Islam Yerusalem) yang akan memberikan pemeliharaan Haram kepada Palestina, sementara Israel akan menerima kedaulatan atasnya. Kedua, formula "kedaulatan vertikal", dimana orang-orang Palestina akan mendapat "kedaulatan" atas tanah dimana Haram dibangun, dan Israel akan mendapat kedaulatan dibawahnya. Akhirnya ahli-ahli tersebut mengembalikan tawaran mereka atas "kedaulatan pemeliharaan" kepada Palestina dan "kedaulatan sisanya" kepada Israel.

2. Secara ideal, Israel menginginkan Yerusalem tanpa adanya penduduk Arab, untuk tujuan ini kondisi kehidupan yang kejam akan diciptakan untuk mengusir mereka.
3. Ketika pembicaraan terfokus pada masalah kota terbuka, proposal Israel dan Amerika yang terbaru melibatkan pembagian dan perpecahan. Beberapa sistem yang berbeda akan diterapkan untuk lingkungan yang berbeda pula.

Amerika mengusulkan sistem khusus untuk kota lama, yaitu membagi antara kedaulatan Palestina atas distrik Islam dan Kristen serta kedaulatan Israel atas orang-orang Armenia dan Yahudi serta Tembok Barat. Hal ini sama dengan yang diusulkan oleh Profesor Moshe. Posisi yang demikian akan menghormati tempat suci Haram.<sup>11</sup>

Menurut Penanggung Jawab Khusus Palestina Urusan Kota Yerusalem yang juga anggota delegasi Palestina dalam konferensi Madrid, Faisal Husseini memberikan pernyataan tentang kota Yerusalem. Kota Yerusalem Timur adalah kota pendudukan selama 33 tahun terakhir. Jika Israel kini meminta kedaulatan atas tempat-tempat suci mereka, hal itu tentu tidak rasional dan bertentangan dengan Resolusi DK PBB no 242 yang tidak membenarkan menduduki wilayah orang lain

<sup>11</sup> Journal Palestine Studies, Vol. XXX, no 2, 2001, hal 83-84



dengan kekuatan. Tuntutan Isreal itu adalah sekedar kedok untuk minta semacam imbalan politik dari kemungkinan dia harus mundur dari Yerusalem Timur di masa mendatang.<sup>12</sup>

Sementara itu, usai dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 7 Maret 2001, Ariel Sharon menegaskan kembali sikapnya bahwa Israel tidak akan berkompromi soal ibukota Yerusalem. Ia menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibukota abadi umat Yahudi. "Yerusalem adalah ibu kota impian umat Yahudi dari generasi ke generasi. Yerusalem adalah ibukota Israel dan akan tetap menjadi ibukota Israel" demikian penjelasan Sharon.

Dilain pihak, Otorita Palestina mengaku Yerusalem Timur adalah ibukotanya, Yasser Arafat menyatakan tidak akan mau berunding dengan Israel jika negara Yahudi tersebut tidak mau menyerahkan Yerusalem Timur sepenuhnya kepada Palestina. Arafat menegaskan Yerusalem harus menjadi ibukota Palestina yang direbut Israel dari Palestina pada tahun 1967.<sup>13</sup> Status final kota Yerusalem tetap saja menjadi perdebatan antara kedua pihak yang bertikai. Keduanya sama-sama mengklaim daerah tersebut sebagai wilayahnya. Status yang terkatung-katung ini akan tetap menjadi penghalang akan tercapainya perundingan damai antara Israel dan Palestina.

## **4.2 Intervensi Amerika Serikat Dalam Perdamaian Israel-Palestina**

### **4.2.1 Kebijakan Politik Amerika Terhadap Masalah Israel-Palestina**

Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat mempunyai jangkauan global berprinsip pada tiga pola sentral, yakni pengalaman sejarah, pengakuan ide-ide demokrasi dan kepentingan global. Ketiga pola sentral ini digunakan untuk memahami strategi global Amerika, yaitu usaha-usaha untuk mempertahankan hegemoninya, mainpu untuk memperbesar dan memperluas hubungan kerja sama dengan negara-negara lain, dalam hal ini dengan sekutu-sekutunya.

<sup>12</sup> Kompas, 25 Januari 2001

<sup>13</sup> Republika, 9 Maret 2001

Sebagai negara *super power* tunggal yang memenangkan perang Teluk II, Amerika Serikat merasa bertanggung jawab dalam menangani krisis Teluk dan mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk menata peta politik di Timur Tengah. Salah satunya adalah berusaha mengupayakan perdamaian di Timur Tengah dengan menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Dalam upaya merealisasikan perdamaian tersebut, Amerika melakukan lawatan diplomatik, namun lawatan diplomatik tersebut tidak berjalan mulus, meskipun telah ditawarkan beberapa konsensi dan jaminan ekonomi untuk memperkuat usul Amerika terhadap perundingan damai dimana tujuan lawatan tersebut untuk mengakhiri konflik di kawasan itu.

Amerika sebagai negara pemrakarsa perundingan, berusaha menjembatani perbedaan-perbedaan yang menghambat proses perundingan perdamaian. Sebagai upaya mengatasi perbedaan itu, Amerika berusaha untuk melancarkan ofensif diplomatik terhadap negara-negara yang terlibat dalam sengketa Israel-Palestina.

Berkaitan dengan upaya dalam perundingan tersebut Amerika berusaha memainkan beberapa peranan yakni sebagai mediator dan sebagai fasilitator. Sebagai mediator, Amerika berusaha untuk mempertahankan titik persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan langsung dalam sengketa. Dan sebagai fasilitator, Amerika berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan antara kedua pihak dalam suatu bentuk perundingan damai yang akan menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Namun proses perdamaian yang didorong oleh Amerika sejak awal sudah berjalan tidak adil. Tidak ada jaminan apapun yang diberikan oleh Amerika pada pihak Palestina. Sedangkan jaminan untuk Israel cukup jelas, yaitu Amerika tidak akan pernah menjatuhkan sanksi apapun untuk memaksa Israel menghentikan pembangunan pemukiman baru Yahudi di daerah pendudukan.

Amerika menyatakan kepada tokoh-tokoh Palestina bahwa Amerika hanya dapat melakukan tekanan-tekanan politik kepada Israel dan bukan sanksi. Dalam kenyataannya tekanan politik Amerika terhadap Israel tidak pernah ada, mengingat

Amerika tetap mengucurkan dana untuk pembangunan pemukiman baru di daerah pendudukan, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.

Sebaliknya, Amerika menekan dan menakut-nakuti Palestina agar mau bergabung dalam proses perundingan damai yang diprakarsai oleh Amerika. James Baker pernah berkata bahwa rakyat Palestina akan menjadi pihak yang paling rugi bila tidak ada proses perdamaian. Tetapi masalahnya, tidak ada jaminan apapun bahwa Palestina akan mendapatkan apa yang sudah didambakannya selama ini. Tidak ada jaminan apapun bahwa Palestina akan mendapatkan kembali Jalur Gaza dan Tepi Barat seperti yang telah ditetapkan dalam Resolusi DK PBB no 242 dan 338.

Sementara itu, seluruh langkah Amerika dalam usulan "mencapai perdamaian" tersebut selalu berwajah ganda. Misalnya AS mendorong perdamaian, tetapi pembangunan pemukiman Yahudi di daerah pendudukan yang secara jelas melanggar moralitas dan hukum internasional serta ketentuan-ketentuan konvensi Jenewa, dibiarkan jalan terus. Alasannya pun sangat ganjil, pembangunan pemukiman adalah urusan kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Lalu bagaimana dengan nasib para pengungsi yang terus bertambah karena daerahnya terus menerus digerogoti oleh Israel?

Permintaan bantuan Israel sebesar 10 miliar dolar Amerika untuk pembangunan pemukiman baru dalam rangka menampung arus imigrasi Yahudi terutama dari Rusia telah diberikan oleh pemerintah AS. Padahal pada saat itu pemerintah Federal AS sendiri membutuhkan dana 13,2 miliar dolar AS untuk mengatasi masalah krisis perumahan di AS. Jumlah penduduk Israel lebih dari seperlimapuluh penduduk AS, tetapi permintaan bantuan tersebut oleh pemerintah Israel tetap saja di cairkan.<sup>14</sup>

Tampak jelas bahwa setiap kebijakan AS lebih menonjolkan hak-hak Israel dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Menurut pemerintah Amerika, Palestina memang harus diberi hak, namun bukan hak untuk mendirikan sebuah negara

<sup>14</sup> M. Amien Rais, *Prospek Perdamaian Timur Tengah* dalam Himpunan Ceramah Masalah Timur Tengah, UGM press, Yogyakarta, 1993, hal 7-8

merdeka, dan mereka tidak berhak menentukan masa depan Israel. Memang aneh, pernyataan seperti itu keluar dari sebuah negara yang katanya sangat memuji dan mengagung-agungkan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak manusia.

#### 4.2.2 Standar Ganda Amerika Serikat

Dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, ternyata Amerika Serikat mengambil pilihan untuk menerapkan keputusan politik standar ganda. Dipilihnya standar ganda ini salah satu alasannya karena pembuatan keputusan yang berkompetensi dengan Timur Tengah dikuasai oleh lobi Yahudi.

Usaha-usaha lobi Yahudi dalam pemerintahan Amerika ditujukan untuk menimbulkan rasa sentimen pro Israel. Keberhasilan sentimen pro Israel ini telah memberikan keuntungan besar bagi Israel karena telah melahirkan doktrin *Israel first*. Doktrin ini memandang bahwa Israel tidak hanya sebagai sebuah aset strategis; tentang juga sebagai negara yang pantas didukung penuh dasar-dasar moral bentuk pemerintahan yang demokratis (Israel tercatat sebagai negara yang paling “demokratis” di kawasan Timur Tengah); warna-warna budaya Baranya dan diatas segala-galanya, fungsi Israel sebagai tempat perlindungan dari “pengganti kerugian” bagi orang-orang Yahudi yang telah mengalami “penderitaan historis”.<sup>15</sup>

Pada awalnya kebijakan Amerika ditujukan untuk meminimalkan pengaruh Uni Soviet di kawasan Timur Tengah. Untuk itu Amerika menjadikan Israel sebagai sekutu terpentingnya. Namun dalam perkembangannya, karena kehadiran Israel menimbulkan kontroversi, AS pun menjadi pihak yang terlibat dalam konflik berkepanjangan di kawasan ini. Posisi Amerika di satu sisi ingin menciptakan “perdamaian” tetapi di sisi lain membutuhkan sekutu yang dapat menjamin kepentingannya, menimbulkan kontradiksi dalam kebijakan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> M. Riza Sihbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hal 24

<sup>16</sup> Ibid, hal 18

Amerika Serikat memang telah melibatkan diri secara langsung dalam masalah Timur Tengah "atas nama" keamanan dan perdamaian. Peran AS dalam perundingan Timur Tengah yang kini tengah dilakukan adalah dalam rangka "permainan catur". Tujuannya jelas, Amerika Serikat ingin mendorong perdamaian Timur Tengah, menurut caranya sendiri.

Permainan AS ini merupakan bagian usahanya untuk menghilangkan tuduhan dunia, bahwa Amerika menjalankan standar ganda dalam kebijakannya di kawasan Timur Tengah. Amerika juga menekankan, walaupun selalu mendukung kepentingan Israel, tetapi AS tetap tidak membenarkan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Amerika "mendukung" penyelesaian *land for peace*, sebagaimana tercantum dalam Resolusi PBB.

Kebijakan Amerika baik domestik maupun internasional secara menyeluruh merupakan rangkaian dari strategi globalnya. Agaknya hal ini yang paling utama adalah masalah keamanan. Hal ini dapat dimaklumi jika dilihat dari sudut ekonomi, AS tergolong *self sufficient* (pemenuhan kebutuhan sendiri) dan dari sudut kebudayaan, ideologi, AS memiliki peran besar dalam mengembangkan demokrasi dan kebudayaan modern sejalan dengan pola-pola yang telah diciptakan.

Kebijakan Amerika dibawah pemerintahan George W. Bush terhadap Timur Tengah benar-benar sudah jauh bergeser dari pendahulunya. Ketika Bill Clinton masih berkuasa, Amerika terkesan netral dan sangat arif menjaga keseimbangan hubungannya, baik dengan Israel maupun dengan Palestina. Hal ini tampak dari pertemuan Bush dengan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon di Washington. Pertemuan kedua pemimpin tersebut memberi legitimasi posisi Israel yang makin agresif menekan hak-hak hidup dan kemerdekaan rakyat Palestina.

Bush menyatakan kepada Sharon bahwa Amerika Serikat tidak akan mencoba memaksa perdamaian Timur Tengah. Ia juga memberi sinyal bahwa Presiden Arafat tidak diterima di White House sampai pemimpin Palestina tersebut mengakhiri kekerasan. Sikap keras AS yang condong meminggirkan dan mengisolir Arafat itu sangat menyenangkan Israel, dimata Israel dan anti Palestina di AS, Arafat dianggap

teroris dan penganjur kekerasan di kawasan Timur Tengah.<sup>17</sup> Sikap berwajah dua AS tersebut tampak nyata karena sebaliknya tidak menekan Israel supaya menghentikan pembantaian terhadap rakyat Palestina.

Dalam kesempatan berikutnya, Bush kembali menghimbau Arafat secara "tegas dan jelas" untuk menghentikan kekerasan sehingga dapat dimulai lagi perundingan damai antara Israel-Palestina. Amerika juga menuding Arafat tidak menunjukkan keseriusannya menapak perdamaian. Pernyataan Bush ini tentu saja bertentangan dengan kenyataan di lapangan, karena Israel masih terus menghujani posisi-posisi Palestina dengan tembakan-tembakan mortir dan serangan helikopter.

Amerika Serikat tetap berkepala batu, tidak mau tahu tentang sikap agresor Israel dan kekejamannya terhadap orang-orang Palestina. Sebaliknya Menlu AS Collin Powell meminta sejawatnya dari Mesir, Amr Moussa agar menekan Arafat untuk mengurangi kekerasan di Timur Tengah. Di bawah Bush, Amerika seolah mengedepankan peluru.

Apalagi terhadap masalah Palestina. AS memveto Resolusi DK PBB untuk mengirimkan pasukan pengamat PBB yang akan bertugas melindungi warga sipil Palestina. Bush bahkan mendukung pemindahan ibikota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.<sup>18</sup> Sikap standar ganda yang diterapkan AS dalam menyikapi masalah Israel-Palestina, di satu sisi AS sebagai sekutu Israel selama ini selalu memprakarsai dan mendukung berbagai upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun di sisi lain, AS diam saja apabila sekutunya itu membua; ulan. Keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel ini tentu saja sangat merugikan bangsa Palestina dan upaya untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah tidak dapat berjalan secara efektif.

---

<sup>17</sup> Jawa Pos, 22 Maret 2001

<sup>18</sup> Jawa Pos, 1 April 2001

### 4.3 Sikap dan Pandangan Negara Arab Radikal dan Kelompok Garis Keras Terhadap Masalah Israel-Palestina

#### 4.3.1 Sikap dan Pandangan Negara-Negara Arab Radikal

Ketika Deklarasi Oslo ditandatangani, banyak analis politik internasional menyatakan bahwa perdamaian akan mendapat rintangan dari negara-negara Arab radikal. Disamping negara-negara Arab radikal, juga bangkitnya politik Islam di daerah pendudukan seperti gerakan Hamas dan Jihad Islam lainnya atau dari pihak Israel sendiri—gerakan ultra kanan Israel yang anti perdamaian—akan menjadi penghalang bagi terciptanya perdamaian Israel-Palestina.

Sebenarnya terminologi “radikal” atau “moderat” yang biasa di sebut dalam konteks konflik yang berkejolak di Timur Tengah bukanlah sesuatu yang statis.<sup>19</sup> Sebuah negara atau seorang pemimpin suatu saat dapat masuk dalam kubu “moderat”, namun di saat lain dapat dikatakan “radikal”. Saddam misalnya, selama perang dengan Iran masuk dalam kubu “moderat” karena ia perlu dukungan negara-negara Arab “moderat” seperti Arab Saudi, Kuwait dan Yordania. Juga hal ini karena negara-negara Arab “radikal” seperti Suriah, Libya dan Yaman Selatan berada di pihak Khomeini. Padahal sebelum terjadi perang Iran-Irak, Saddam tergolong “radikal” karena pernah memelopori pengucilan Mesir dari dunia Arab, setelah Mesir menandatangani perjanjian Camp David.

Kedua terminologi yang bersifat dinamis (selalu berubah-ubah) menunjukkan kawasan Timur Tengah yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena, pertama, latar belakang sejarah konflik yang beraneka macam sehingga menghalangi penyelesaian politis. Kedua, banyaknya konflik internasional yang bersumber dari destabilitas regional, akibat kekacauan domestik. Ketiga, perubahan-perubahan ekonomi dunia yang bertolak dari kekuatan OPEC telah mengakibatkan penjualan senjata yang tidak

<sup>19</sup> M. Riza Sihbudi, Masa Depan Perkembangan Politik Timur Tengah, dalam Tempo no 44, 1990

terkontrol ke wilayah itu. Keempat, pemerintahan lokal begitu kuat terikat sebagai boneka-boneka kekuatan besar.<sup>20</sup>

Iran, sebagai negara yang masuk dalam kubu radikal dalam menyikapi proses damai Israel-Palestina, menolak Deklarasi Prinsip. Hal ini karena keterlibatan AS dalam proses tersebut. Sejak awal revolusi Iran, hubungan Iran dengan Washington memang sudah tidak bersahabat. Revolusi Iran tersebut ingin mengakhiri hegemoni Amerika di kawasan Timur Tengah memang mengancam kepentingan AS dan Israel serta mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan itu. Wajar apabila Iran secara tegas menolak hasil perundingan damai Israel-Palestina yang disponsori oleh Amerika Serikat.

Lepas dari penolakan politik diatas, penolakan Iran terhadap hasil perundingan damai Israel-Palestina, disebabkan prinsip Iran yang selalu menolak setiap kompromi dengan Israel. Bahwa apa yang direbut oleh Israel dengan senjata atau kekerasan harus direbut kembali dengan kekerasan dan senjata pula. Bagi Iran perjuangan politik dan diplomasi tidak akan dapat menyelesaikan masalah Israel-Palestina, hanya dengan politik kekerasan saja yang bisa membebaskan Palestina. Iran juga mendekati Rusia dan menghasilkan kesepakatan militer Iran-Rusia sesuai kunjungan Presiden Khatami ke Moskwa.<sup>21</sup>

Sementara itu Libya yang juga digolongkan ke kubu radikal juga tidak mendukung apa yang telah dicapai dalam perundingan damai Israel-Palestina. Libya dibawah Qadhafi sejak awal berkuasa telah berseberangan dengan pihak Barat. Upaya Qadhafi untuk mengeliminasi hegemoni AS dan sekutunya, ia bekerja sama dengan Rusia dalam bidang ekonomi, politik dan militer. Bukan hanya itu, Qadhafi juga membentuk "front anti Barat" yang didalamnya terdapat negara-negara Arab radikal seperti Suriah, Aljazair dan Yaman Utara.

20 Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal 102

21 Kompas, 19 Maret 2001



Seperti halnya Iran, Qadhafi sebagai pemimpin Libya akan tetap komitmen terhadap perjuangan pembebasan Palestina secara menyeluruh dan melenyapkan Israel dari bumi Palestina. Juga konsistensi dengan penolakannya terhadap pengaruh Barat sebagai tindakan balasan akibat penetrasi Barat yang berlebihan Terhadap Libya.

Negara Arab radikal yang lain, Irak memberi pernyataan tentang keremangan Sharon, bahwa baik Sharon maupun Barak tidak akan berbeda dalam demo Israel, karena keduanya adalah "kriminal". "Mereka ingin mencaplok Palestina, membantai mereka namun berusaha menutupinya dengan perjanjian damai, ini lelucon", kata Mentu Irak. Pernyataan ini dikeluarkan Irak setelah siap membentuk pasukan untuk memerangi Israel.

Harian pemerintah Irak juga mengutuk seruan Presiden Bush untuk mengakhiri intifada Palestina. Padahal pada saat ini pasukan pertahanan Israel (IDF) melakukan pengeboman terhadap sasaran-sasaran yang diduga sebagai markas pasukan elit Force ke-17 dan Otorita Palestina, yang kemudian disusul serangkaian penembakan pasukan Israel terhadap warga sipil Palestina yang menewaskan 6 jenderal. Dikatakan Bush tidak akan berani jika pada KTT Amman negara-negara Arab bersikap tegas.<sup>22</sup> Irak juga mendukung perjuangan intifada Palestine, karena jalan perundingan damai tidak akan menghasilkan apa-apa

Sementara itu di tingkat regional, solidaritas negara-negara Arab dan negara Timur Tengah non Arab seperti Turki terhadap Palestina makin kuat untuk mengucilkan pemerintahan Sharon dalam forum regional. Tidak mustahil pula, negara-negara Arab akan mengesampingkan perselisihannya guna menghadapi tantangan bersama yang lebih besar yaitu ancaman bangkitnya zionisme yang direfleksikan oleh tampilnya Sharon dari Partai Likud ke tampuk kekuasaan pemerintahan Israel.

---

<sup>22</sup> Jawa Pos, 1 April 2001

Dalam konteks ini, Irak banyak mengambil manfaat dengan menggunakan momentum tersebut untuk bisa kembali ke barisan Arab, setelah dikucilkan selama 10 tahun terakhir. Sementara itu Presiden Mesir Husni Mubarak mengadakan lawatan ke Arab Saudi, Oman, Tunisia dan Kuwait guna menggalang lagi solidaritas bangsa Arab menghadapi tantangan serius dengan naiknya Ariel Sharon ke puncak kekuasaan Israel. KTT Arab yang digelar di Amman, Yordania menjadi barometer bagi solidaritas bangsa Arab. (hasil dari KTT Amman dapat dilihat pada lampiran).<sup>23</sup> Pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab tersebut memutuskan untuk menanggapi kebijakan baru Israel dan akan bersikap tegas terhadap setiap kebijakan Israel yang menghilangkan prospek perdamaian di Timur Tengah.

#### 4.3.2 Sikap Kelompok Garis Keras

Sementara dari dalam Palestina sendiri sebagai penentang perundingan damai dengan Israel adalah Faksi-Faksi garis keras PLO atau Hamas dan juga kelompok Jihad Islam yang lainnya. dari kubu Israel sendiri kelompok yang menentang perundingan damai dengan Palestina adalah gerakan ekstrim kanan Yahudi yang anti perdamaian. Kelompok-kelompok penentang ini pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu berusaha menggagalkan proses perundingan damai yang disponsori oleh Amerika Serikat. Kelompok Hamas berusaha untuk menggagalkan proses perdamaian karena pandangannya yang mengharuskan pengembalian tanah Palestina secara keseluruhan.

Gerakan Hamas timbul akibat penjajahan yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina selama lebih dari setengah abad dan telah menyebabkan kehidupan rakyat Palestina sangat menderita. Hamas identik dengan gerakan Islam menjadikan semangat keagamaan dan kemandirian di tengah kehidupan masyarakat di daerah pendudukan. Salah satu hasil dari gerakannya yang meletus pada tahun 1987 -dikenal dengan intifada- adalah perubahan segi moralitas rakyat Palestina. Keberanian mereka cenderung meningkat dan lebih agresif mengadakan serangan-serangan

---

<sup>23</sup> Kompas, 12 Februari 2001

kepada orang-orang Israel. Perlawanan mereka walaupun hanya dengan menggunakan senjata seadanya –seperti lemparan batu dan ketapel-, namun gerakan ini sangat ditakuti oleh pihak Israel.

Menyangkut penolakan Hamas terhadap upaya-upaya damai dengan Israel yang disponsori oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya tertuang dalam konstitusi atau piagam Hamas pasal 13 yang menyebutkan : “Segala prakarsa dan apa yang disebut sebagai penyelesaian perdamaian serta mu’tamar (kongres, konferensi) Internasional yang diadakan untuk menyelesaikan masalah Palestina adalah berlawanan dengan aqidah Hamas, mengurangi sebagian dari Palestina sama saja dengan mengurangi sebagian dari agama Islam”.<sup>24</sup>

Bagi Hamas, perjuangan Palestina hanya dapat dilakukan dengan jalan jihad. Perundingan damai dianggap sebagai strategi Israel yang akan melemahkan perjuangan Palestina. Hamas dalam aksinya sering menggunakan cara bom bunuh diri, dalam hal ini dianggap sebagai balasan yang setimpal atas gempuran-gempuran Israel. “ Jadi teror semacam serangan bunuh diri seperti ini telah ditanamkan sendiri oleh Israel. Sekarang mereka menuai apa yang telah mereka tanam sendiri” demikian pernyataan Ismail Abu Shannab, pemimpin gerakan politik perlawanan Islam, Hamas.<sup>25</sup> Jadi, gerakan Hamas yang keras dan sering menggunakan aksi kekerasan ini adalah awalnya dimulai oleh Israel sendiri. Israel tidak segan untuk membunuh warga Palestina yang melakukan aksi protes terhadap pendudukan Israel, dan gerakan Hamas adalah sebagai balasan atas apa-apa yang telah dimulai oleh Israel selama ini. Presiden Palestina Yasser Arafat sempat mengecam serangan-serangan bunuh diri yang dilakukan oleh Hamas, namun pemerintahnya tidak berupaya mencegah aksi Hamas tersebut.

Pada tanggal 27 Mei 2001 hari Minggu, terjadi dua ledakan bom mobil. Ledakan pertama mencedarai sekitar 31 orang yang kebanyakan karena *shock*.

<sup>24</sup> Ahmad Fauzi, *Gerakan Hamas dalam Perjuangan Kemerdekaan Palestina*, Studia Press, Jakarta, 1996, hal 63

<sup>25</sup> *Republika*, 26 Mei 2001

Kelompok radikal Front Rakyat untuk Kebebasan Palestina menyatakan bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Ledakan kedua terjadi hanya selisih waktu 9 jam dan berjarak sekitar hanya 100 meter dari tempat terjadinya ledakan yang pertama. Tempat ledakan terjadi didekat camp Rusia, ditempat ini terdapat markas polisi Yerusalem dan gedung-gedung pengadilan. Tidak ada korban dalam peledakan tersebut. Milisi Jihad Islam di Damaskus mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut dan hal tersebut sebagai pesan kepada kantor-kantor berita asing.<sup>26</sup>

Sementara itu kelompok radikal lainnya, kelompok Fatah Palestina melakukan protes terhadap Inggris di Jalur Gaza karena Inggris bersama Amerika Serikat mendukung Israel dalam memerangi Palestina. Aksi protes disertai dengan menahan secara simbolik dua wartawan asing yang diculik gerilyawan bersenjata di Jalur Gaza dan ditahan selama 4 jam. Mereka kemudian dibebaskan tanpa cedera.

Kelompok radikal yang lain adalah Elang Fatah, kelompok yang dibentuk selama intifada pertama yang berlangsung dari 1987 sampai 1993, mengumumkan penculikan tersebut dalam sebuah pernyataan yang dialamatkan kepada Presiden George W. Bush, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan rakyat kedua negara tersebut. "Anda harus memikul tanggung jawab atas sikap berat sebelah dari pemerintah anda", demikian pernyataan kelompok Elang Fatah.<sup>27</sup>

Aksi-aksi kekerasan dan bom bunuh diri semakin banyak terjadi. Hal ini semakin membuat gusar pemerintah Israel dan menyerukan kepada Arafat untuk meredam aksi-aksi mereka. Para tokoh garis keras menyatakan, hanya sebuah komisi yang bercakupan luas –termasuk Hamas, Fatah dan Faksi lain Palestina- yang bisa memutuskan untuk menghentikan aksi itu. Arafat tidak bisa mencegah aksi tersebut sendirian. Dan menurut para tokoh faksi-faksi Palestina tersebut, tidak ada garis komando yang secara resmi mengeluarkan komando serangan bom bunuh diri itu. Hal itu datang dari hati keikhlasan mereka sendiri.

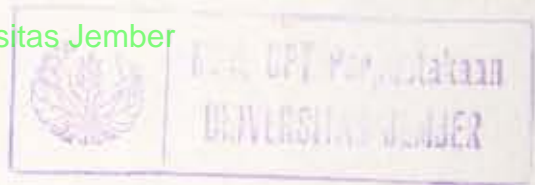
---

<sup>26</sup> *Republika*, 28 Mei 2001

<sup>27</sup> *Republika*, 31 Mei 2001

Fakta lain menunjukkan serangan bom bunuh diri kian meningkat sejak naiknya Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel menggantikan Barak. Hal ini disebabkan karena memang banyak kebijakan Sharon terutama soal perluasan daerah pemukiman Yahudi yang memprovokasi kemarahan warga Palestina. Sharon merupakan satu-satunya faktor yang memicu kian maraknya serangan bom bunuh diri warga Palestina. Kebijakan Sharon yang memberi pengamanan lebih besar bagi warga Israel justru telah membawa Israel pada situasi yang memanas. Faksi-faksi Palestina menyatakan membuka kemungkinan masyarakat Israel-Palestina yang hidup berdampingan. Tetapi karena faktor Sharon diatas, maka mereka mendukung aksi-aksi kekerasan melawan Israel.





## V. KESIMPULAN

Kemenangan Ariel Sharon dari Partai Likud dalam pemilu tanggal 6 Februari 2001 atas lawan politiknya mantan Perdana Menteri Ehud Barak dari Partai Buruh dengan kemenangan telak yaitu sekitar 25 persen, membuat cemas akan kelanjutan nasib perdamaian antara Israel dan Palestina. Kekhawatiran tersebut sangat wajar, mengingat latar belakang politik Sharon yang berasal dari partai Likud dan record Sharon yang selama ini meninggalkan kenangan hitam bagi rakyat Palestina. Partai Likud sebagaimana kita ketahui adalah merupakan partai yang konservatif yang bersifat konfrontatif dalam menghadapi masalah Palestina.

Israel, dibawah kepemimpinan Sharon akan membuat bangunan perdamaian yang sudah dirintis sejak 1993 akan semakin rapuh. Hal ini disebabkan kebijakan Sharon yang pada awal berkuasanya sudah mulai memperlihatkan sikap kepala batu dengan menegaskan sikap menolak melanjutkan perundingan damai dengan Palestina yang telah dibuka kembali pada bulan Januari 2001 di Taba, Mesir. Sharon juga menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan terkungkung oleh persetujuan-persetujuan yang telah disepakati sebelumnya

Peran Amerika yang diharapkan dapat menjadi penengah dalam proses perdamaian kedua negara ternyata tidak dapat diharapkan. Amerika memilih untuk menjalankan sikap bermuka dua. Disatu sisi AS menyerukan perdamaian dan penghentian kekerasan kepada Palestina, namun disisi lain AS memilih diam saja ketika Israel melakukan pembantaian warga Palestina. Sikap ini akan menghambat perdamaian.

Ada tiga hal penting yang akan menentukan arah perdamaian antara Israel dan Palestina, yaitu:

1. Sikap Israel. Apabila Israel dibawah Ariel Sharon tetap bersikap represif (menggunakan cara-cara kekerasan) dan tidak mentaati hasil-hasil perundingan yang telah disepakati bersama dengan Palestina, akan sulit tercapai perdamaian. Karena kelompok-kelompok garis keras seperti

Hamis dan kelompok Jihad Islam lainnya akan terus melawan Israel dengan kekerasan. Selain itu status kota Yerusalem sebagai "ibukota abadi" Israel perlu dibahas kembali mengingat Yerusalem adalah tempat suci tiga agama utama didunia, sehingga Israel tidak dapat seenaknya mengklaim sebagai wilayahnya. Kota Yerusalem harus berada dalam pengawasan bersama. Kemudian masalah pembangunan pemukiman baru Yahudi di daerah pendudukan harus benar-benar dihentikan. Hal tersebut diatas adalah salah satu hal penting yang harus diselesaikan agar kedua negara bersedia bertemu di meja perundingan.

2. Sikap bermuka dua AS. Dibawah pemerintahan George W. Bush, sikap ambiguitas ini lebih terlihat jelas. Keberpihakan Amerika terhadap Israel tentu saja sangat merugikan Palestina dan upaya untuk menciptakan perdamaian di kawasan inipun tidak dapat berjalan efektif, kalau tidak dikatakan membuang-buang waktu.
3. Kekompakan bangsa Arab, hal ini sangat diperlukan mengingat selama ini bangsa Arab masih mempunyai sikap berbeda-beda dalam menghadapi masalah Palestina. Mereka akan terlibat selama tidak mengganggu kepentingan mereka. Ini disebabkan bangsa Arab masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap AS dan ini menjadi poin sendiri bagi Israel. Tetapi dengan dikeluarkannya deklarasi Amman diharapkan negara-negara Arab (terutama yang radikal) dapat menjalin kembali persatuan Arab dalam menghadapi AS dan arogansi Israel.

Jadi dari apa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa prospek perdamaian Isreal-Palestina dibawah kendali Perdana Menteri Ariel Sharon masih jauh dan bahkan suram. Karena Sharon dalam setiap kebijakannya tetap menggunakan kekerasan terhadap Palestina dan Palestinapun tidak tinggal diam. Sehingga kekerasan demi kekerasan masih akan berjalan terus dan bersifat siklis yang membuat jalan menuju perdamaian abadi seperti yang diinginkan semakin panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Sumber dari Buku-Buku Literatur

- Anderson, James. 1979. *Public Policy Making*. New York.
- Arikunto, Suharsimi. 1977. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Clelland, Charles A. 1971. *Ilmu Hubungan Internasional, Sistem dan Teori*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Dye, Thomas. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Engle Wood Cliffs.
- Dougherty, James E. and Robert L. Pfalzgraf. 1971. *Contending Theory of International Relation a Comprehensive Survey*. New York: Horper and Row Publisher.
- Fauzi, Ahmad. 1996. *Gerakan Hamas dalam Perjuangan Kemerdekaan Palestina*. Jakarta: Studia Press.
- Findley, Paul. 1995. *Diplomasi Munafik Ala Yahudi*. Bandung: Mizan.
- Gie, The Liang. 1979. *Ilmu Politik*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Garaudy, R. 1990. *Praktek-Praktek Zionisme Israel*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hart, Michael H. 1982. *Seratus Tokoh Yang Berpengaruh Dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hadi, Sutrisno. 1980. *Metode Research*. Yogyakarta: UGM Press.
- Jones, Walker S. 1990. *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan Ekonomi Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya.
- Kartono, Kartini. 19 . *Pengantar Metode Research*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Lukacs, Yehuda. 1992. *The Israeli-Palestinian Konflik a Documentar; Record 1967-1990* : Press syndicate of the University of Cambridge.



- Marzuki. 1980. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Gajah Mada.
- Mas'ood, Mohktar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Purwodarminto, WJS. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Perpustakaan Nasional Dalam Terbitan. 1990. *Negara dan Bangsa Edisi Bahasa Indonesia*: Grolier International inc.
- Rosnou, James N. 1971. *The Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Said, Abdul and Charles Lerche. 1963. *Concept of International Politics*. New York: Engle Wood Cliff Prentice Hall.
- Sihbudi, Riza. 1993. *Timur Tengah, Dunia Arab dan Hegemoni Amerika Serikat*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- . 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah, Buku Satu*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Sihbudi, R., Hamdan Bashir, Happy Bone Zulkarnaen. 1993. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: PT. Eresco.
- Snyder, Richard C. 1962. *Foreign Policy Making: an Approach to Study International Politic*. New York: The Free Press.
- Surachmad, Winarno. 1976. *Penyantar Metode Research*. Bandung: PT. Alumni.
- Tan, Melly G. 19 . *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Varna, S.P. 1982. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- b. Sumber Dari Jurnal Dan Artikel**
- Jurnal Ilmu Politik 9. 1991. Jakarta: PT. Gramedia.
- Journal of Palestine Studies Vol. XXII No 2. 1993.
- . Vol. XXX No. 2. 2001.

Musthafa Abdul Rahman, 2001. "Sharon dan Mimpi Buruk Bangsa Arab". Dalam *Kompas*, 8 Februari. Jakarta.

-----, 2001. "Skenario Kabinet Sharon". Dalam *Kompas*, 11 Februari. Jakarta.

-----, 2001. "Perdamaian dan Pemerintah Persatuan". Dalam *Kompas*, 9 Maret. Jakarta.

M. Riza Sihbudi, 1990. "Masa Depan Perkembangan Politik Timur Tengah". Dalam *Tempo* no 44. Jakarta.

M. Amien Rais, 1993. "Prospek Perdamaian Timur Tengah". Dalam *Impunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah*. Yogyakarta: UGM Press.

Europe Publication: *The Middle East and North Afrika* Edisi 44/3 Tahun 1990.

-----, Edisi 37 Tahun 1993.

#### **c. Sumber Dari Surat Kabar**

##### **Jawa Pos**

6 April 1997  
4 Februari 2001  
6 Februari 2001  
16 Februari 2001  
18 Februari 2001  
20 Februari 2001  
28 Februari 2001  
22 Maret 2001  
31 Maret 2001  
1 April 2001

##### **Republika**

13 Juni 1996  
13 Juli 1996  
25 Januari 2001  
9 Maret 2001

26 Mei 2001

28 Mei 2001

31 Mei 2001

**Kompas**

18 Maret 1992

19 Maret 1992

5 September 1993

3 Mei 1996

26 Desember 1996

8 Januari 2001

9 Januari 2001

12 Januari 2001

25 Januari 2001

8 Februari 2001

12 Februari 2001

26 Februari 2001

9 Maret 2001

19 Maret 2001

30 Maret 2001

5 Juni 2001

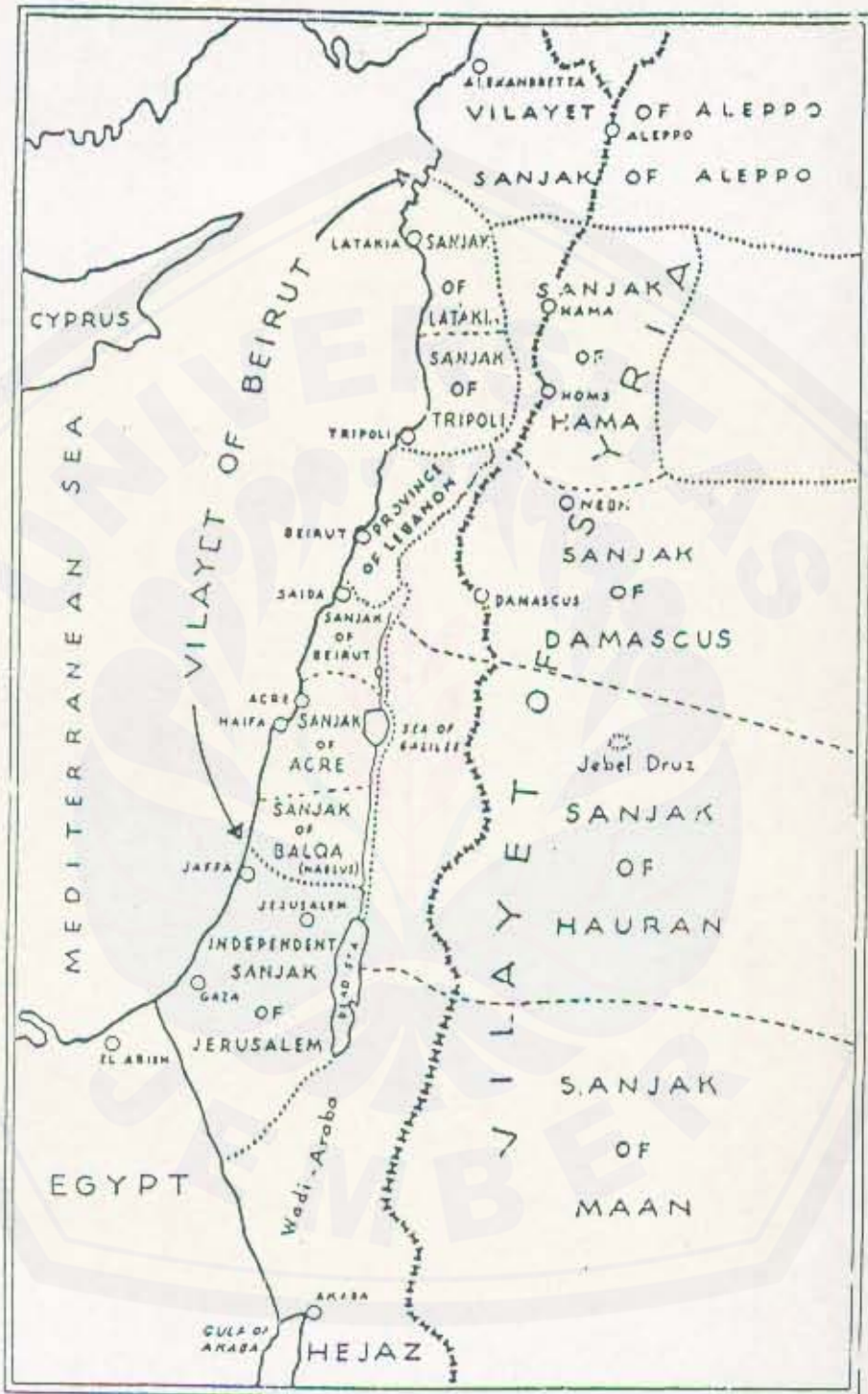
**Berita Buana**

14 Maret 1991

**Surya**

24 Mei 2001

PALESTINE AND SYRIA IN 1915

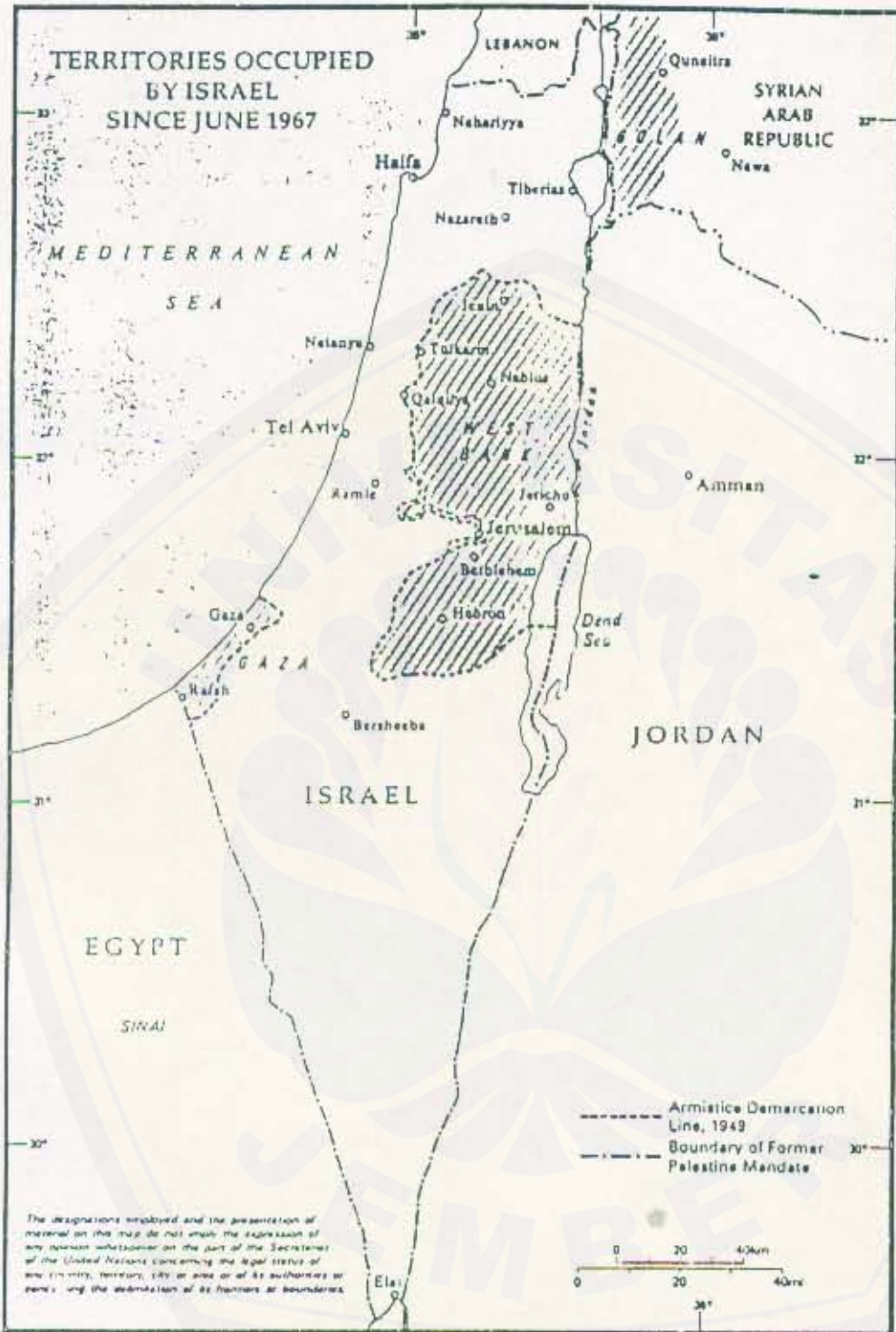


Source: *The Origins and Evolution of the Palestine Problem 1917-1988*  
United Nations, New York, June 1990





Lampiran IV



MAP NO. 1212 Rev. 1 UNITED NATIONS  
JUNE 1981

## RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 242 (1967)

Disahkan pada tanggal 22 November 1967

## DEWAN KEAMANAN

*Menyatakan* lebih lanjut kecemasannya dengan situasi di Timur Tengah.

*Menekankan* tidak dibenarkannya pencaplokan wilayah dengan jalan perang dan perlunya usaha untuk menegakkan perdamaian yang adil dan abadi di mana setiap negara di wilayah yang bersangkutan dapat hidup dengan aman.

*Menekankan lebih lanjut* bahwa semua negara anggota [PBB] ketika menerima Piagam PBB telah menyatakan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan Pasal 2 Piagam PBB.

1. *Menegaskan* bahwa pemenuhan prinsip-prinsip Piagam PBB membutuhkan tegaknya perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah termasuk penerapan dua prinsip berikut ini:
  - i) Penarikan mundur angkatan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini;
  - ii) Diakhirinya semua tuntutan atau pernyataan permusuhan dan dihormati dan diakui kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah itu beserta hak mereka untuk hidup damai dalam batas-batas yang aman dan diakui, dan bebas dari ancaman-ancaman atau tindakan-tindakan kekerasan;
2. *Menegaskan lebih lanjut* perlu
  - a) Adanya jaminan kebebasan pelayaran melalui jalur perairan internasional di wilayah itu;
  - b) Dicapainya penyelesaian yang adil mengenai masalah pengungsi;
  - c) Adanya jaminan atas tidak adanya pelanggaran wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah itu, melalui berbagai tindakan termasuk pembangunan zona bebas militer;
3. *Meminta* Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus untuk datang ke Timur Tengah dalam rangka membangun dan memelihara hubungan-hubungan dengan negara-negara yang terlibat agar menjalin kesepakatan dan membantu usaha-usaha untuk mencapai penyelesaian yang damai dan bisa diterima sesuai dengan pandangan-pandangan dan prinsip-prinsip dalam resolusi ini;
4. *Meminta* Sekretaris Jenderal PBB untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan atas kemajuan usaha-usaha dari Wakil Khusus tersebut secepat mungkin.



## RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 338 (1973)

Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1973

### DEWAN KEAMANAN

1. *Menghimbau* semua pihak yang sekarang sedang berperang untuk menghentikan semua kegiatan tembak-menembak dan segera mengakhiri semua kegiatan militer, tidak melewati batas waktu 12 jam setelah disahkannya keputusan ini di tempat-tempat yang mereka duduki sekarang.
2. *Menghimbau* pihak-pihak yang terlibat untuk memulai [penghentian tembak-menembak] segera setelah dilaksanakannya resolusi Dewan Keamanan Nomer 242 (1967) tentang gencatan senjata dalam semua bagiannya.
3. *Memutuskan* bahwa, segera dan berbarengan dengan gencatan senjata, negosiasi-negosiasi akan segera dimulai antara pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan yang tepat untuk menegakkan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah.

**RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMER 681 (1990)**

Disahkan pada tanggal 20 Desember 1990

**DEWAN KEAMANAN**

*Menegaskan kembali* kewajiban-kewajiban negara-negara anggota menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,

*Juga menegaskan kembali* prinsip-prinsip mengenai tidak diperbolehkannya pencaplokan wilayah dengan perang yang dikemukakan dalam resolusi Nomer 242 (1967) tanggal 22 November 1967,

*Setelah menerima* dukungan Sekretaris Jenderal yang disampaikan sesuai dengan resolusi Nomer 672 (1990) tanggal 12 Oktober 1990 mengenai cara-cara dan sarana-sarana untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel, dan membaca terutama alinea 20 s.d. 26 resolusi tersebut:

*Memperhatikan* minat Sekretaris Jenderal PBB untuk berkunjung dan mengirimkan utusan khususnya untuk mengemukakan gagasannya kepada para pejabat Israel, sebagaimana ditunjukkan pada alinea 22 laporannya, dan memperhatikan undangan mereka yang disampaikan kepadanya.

*Memperhatikan dengan sungguh-sungguh* situasi yang semakin buruk dan berbahaya di semua wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem, pelanggaran dan ketegangan yang muncul di Israel.

*Mempertimbangkan* pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Keamanan pada tanggal 20 Desember 1990 tentang metode dan pendekatan untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh, adil dan abadi dalam konflik Arab-Israel.

*Mengingat* resolusinya Nomer 607 (1988) tanggal 5 Januari 1988, Nomer 608 (1988) tanggal 14 Januari 1988, Nomer 636 (1989) tanggal 6 Juli 1989 dan Nomer 641 (1989) tanggal 30 Agustus 1989, dan mengingat adanya bahaya dari keputusan Pemerintah Israel untuk mendeportasikan empat orang warga Palestina dari wilayah-wilayah yang didudukinya yang melanggar kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi Jenewa, tanggal 12 Agustus 1949, tentang perlindungan warga sipil di waktu perang.

1. *Menyatakan penghargaan* kepada Sekretaris Jenderal atas laporannya;
2. *Menyatakan keprihatinan yang sangat besar* atas penolakan Israel terhadap resolusinya Nomer 672 (1990) tanggal 12 Oktober 1990 dan Nomer 673 (1990) tanggal 24 Oktober 1990;
3. *Menyesalkan* keputusan yang diambil oleh Pemerintah Israel, selaku penguasa wilayah pendudukan, untuk melakukan deportasi warga-warga sipil Palestina di wilayah-wilayah yang didudukinya.
4. *Mendesak* Pemerintah Israel untuk menerima secara *de jure* diterapkannya keputusan-keputusan Konvensi Jenewa, tanggal 12 Agustus 1949, yang berhubungan dengan perlindungan warga sipil pada waktu perang, di semua wilayah yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967, dan untuk selalu memperhatikan dengan cermat ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut;
5. *Menghimbau* pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Tingkat Tinggi dalam Konvensi tersebut untuk menjamin agar Israel, selaku penguasa di wilayah pendudukan, mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Pasal 1 Konvensi itu.
6. *Meminta* Sekretaris Jenderal, bekerjasama dengan Komite Palang Merah Internasional, untuk mengembangkan lebih lanjut gagasan yang dikemukakan dalam laporannya, untuk mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Tingkat Tinggi dalam Konvensi tersebut untuk membicarakan tindakan-tindakan yang mungkin bisa mereka lakukan menurut Konvensi tersebut dan, untuk tujuan ini, mengundang pihak-pihak itu untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai bagaimana gagasan itu dapat disumbangkan demi tercapainya tujuan-tujuan Konvensi itu, dan [membicarakan] masalah-masalah lain yang terkait, dan untuk melaporkannya kepada Dewan [Keamanan].
7. *Juga meminta* Sekretaris Jenderal untuk memantau dan mengamati situasi tentang warga sipil Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel, dengan melakukan usaha-usaha baru dalam hal ini berdasarkan alasan mendesak, dan untuk memanfaatkan dan mengerahkan atau menarik PBB dan orang-orang serta sumber-sumber lain yang ada, di wilayah itu atau dan di mana saja, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ini dan untuk menjaga agar Dewan Keamanan secara teratur mendapatkan informasi.
8. *Meminta lebih lanjut* Sekretaris Jenderal [PBB] untuk menyampaikan laporan kemajuan pertama kepada Dewan Keamanan sebelum minggu pertama bulan Maret 1991 dan setiap empat bulan sesudahnya, dan memutuskan untuk di mana perlu tetap berpegang teguh pada masalah yang diperlukan.

## RESOLUSI MAJLIS UMUM NOMER 181 (II)

Disahkan pada tanggal 29 November 1947  
Pemerintahan Palestina di masa mendatang

### A MAJLIS UMUM

*Setelah bertemu* dalam sidang khusus atas permintaan negara mandataris untuk membentuk dan memerintahkan komite khusus untuk mempersiapkan pembahasan tentang masalah pemerintahan Palestina di masa mendatang pada sidang reguler kedua;

*Setelah membentuk* Komite Khusus dan memerintakkannya untuk meneliti semua persoalan dan masalah yang relevan dengan masalah Palestina, dan untuk mempersiapkan beberapa proposal tentang penyelesaian masalah tersebut, dan

*Setelah menerima dan memeriksa* laporan dari Komite Khusus (Dokumen Nomor A/364) termasuk sejumlah rekomendasi yang diserahkan dengan secara bulat dan rencana pembagian dengan kesatuan ekonomi yang disetujui oleh sebagian besar anggota Panitia Khusus itu.

*Menimbang* bahwa situasi sekarang di Palestina merupakan situasi yang mungkin sekali bisa mengurangi kesejahteraan umum dan hubungan-hubungan persahabatan antar bangsa;

*Mengingat* deklarasi yang diumumkan oleh Negara mandataris bahwa ia merencanakan untuk menyelesaikan pengungsian rakyat Palestina sebelum tanggal 1 Agustus 1948;

*Menyarankan* kepada Inggris, sebagai Negara mandataris untuk menyelesaikan masalah Palestina, dan kepada semua anggota PBB yang lain, untuk mengesahkan dan melaksanakan, sehubungan dengan pemerintahan Palestina di masa mendatang, Rencana Pemisahan dari Kesatuan Ekonomi yang ditetapkan sebagai berikut:

*Memutuskan agar:*

- a). Dewan Keamanan agar mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya;
- b). Dewan Keamanan mempertimbangkan, jika keadaan selama kurun waktu peralihan memerlukan pertimbangan semacam itu, apakah situasi di Palestina merupakan ancaman terhadap perdamaian. Jika Dewan memutuskan bahwa ancaman seperti itu ada, dan dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan harus melengkapi otorisasi Majelis Umum dengan melakukan tindakan-tindakan, berdasarkan Pasal-pasal 39 dan 41 Piagam PBB, untuk memberikan wewenang kepada Komisi PBB, sebagaimana dimaksud dalam resolusi ini, untuk melaksanakan berbagai fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh resolusi ini di Palestina;
- c). Dewan Keamanan menetapkan, berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, bahwa setiap usaha untuk melakukan penggantian secara paksa penyelesaian yang diajukan dengan Resolusi ini sebagai ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresif, bahwa suatu ancaman terhadap perdamaian;
- d). Dewan Perwalian diberi beberapa tanggungjawab yang ditetapkan dalam rencana ini.

*Meminta* para penduduk Palestina untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, antara lain, untuk melaksanakan rencana ini;

*Meminta dengan sangat* semua Pemerintah dan semua bangsa untuk tidak melakukan tindakan apa pun yang bisa mengganggu atau menyebabkan ditanggungkannya pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi ini, dan

*Memberi wewenang* kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk membayar ganti rugi biaya perjalanan dan biaya akomodasi para anggota Komite yang disebut pada Bagian I, sub bagian B, alinea 1 di bawah ini, dengan dasar dan bentuk tertentu yang dinilainya paling cocok dalam keadaan itu, dan untuk melengkapi Komite itu dengan staf yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepada Komite itu oleh Majelis Umum.

---

### RESOLUSI MAJLIS UMUM NOMER 194 (III)

Disahkan pada tanggal 11 Desember 1948  
Laporan Kemajuan Perantara PBB mengenai Masalah Palestina

#### MAJLIS UMUM

*Setelah mempertimbangkan lebih lanjut situasi di Palestina,*

- I. *Menyatakan penghargaan yang sedalam-dalamnya atas kemajuan yang dicapai melalui jasa-jasa baik dari mendiang perantara PBB dalam memperjuangkan penyelesaian secara damai masa depan situasi Palestina, yang menyebabkan dia mengorbankan jiwanya, dan  
Mengucapkan terima kasih juga kepada Penjabat Sementara Perantara PBB dan stafnya yang melanjutkan usaha-usaha dan pengabdian [Perantara sebelumnya] dalam tugasnya di Palestina.*  
.....
- II. *Memutuskan bahwa para pengungsi yang ingin kembali ke kampung halaman mereka dan hidup secara damai dengan tetangga-tetangga mereka harus diijinkan secepatnya, dan bahwa ganti ruginya harus dibayarkan atas hak milik orang-orang yang memutuskan untuk tidak kembali dan atas kehilangan atau kerusakan harta milik yang, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional atau secara adil, harus diperbaiki oleh Pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa yang bertanggung-jawab.  
Memerintahkan Komisi Konsiliasi untuk memberikan kemudahan bagi pengembalian para pengungsi ke tanah airnya, pemukiman kembali dan rehabilitasi ekonomi dan sosial para pengungsi dan pembayaran ganti rugi, dan untuk memelihara hubungan baik dengan Direktur Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina dan, melalui dia, dengan lembaga-lembaga dan badan-badan PBB yang terkait.*

## RESOLUSI MAJLIS UMUM NOMER 43/177

Disahkan pada tanggal 15 Desember 1988  
Masalah Palestina

### MAJLIS UMUM

*Setelah mempertimbangkan* butir yang berjudul "Masalah Palestin: ",

*Mengingat kembali* resolusinya Nomer 181 (II), tanggal 29 November 1947, di mana, *inter alia*, ada tuntutan untuk didirikannya negara Arab dan negara Yahudi di Palestina,

*Menyadari sepenuhnya* tanggungjawab khusus PBB untuk mencapai penyelesaian yang adil terhadap masalah Palestina,

*Menyadari [bahwa]* Proklamasi Negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina sejalan dengan resolusi Majelis Umum Nomer 181 (II) dan dalam rangka pelaksanaan atas hak-hak sah rakyat Palestina,

*Menegaskan* adanya kebutuhan mendesak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menyeluruh di Timur Tengah yang, *inter alia*, memberikan jaminan koeksistensi secara damai kepada semua negara di wilayah itu,

*Mengingat kembali* resolusinya Nomer 3237 (XXXIX) tanggal 22 November 1974 mengenai status pengamat bagi PLO dan resolusi-resolusi berikutnya yang relevan dengan masalah itu,

1. *Mengakui* proklamasi [kemerdekaan] negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina pada tanggal 15 November 1988;
2. *Menegaskan* perlu bagi rakyat Palestina untuk melaksanakan kedaulatan mereka di atas wilayah yang diduduki [Israel] sejak tahun 1967;
3. *Memutuskan* bahwa, sejak tanggal 15 Desember 1988 sebutan bagi "Palestina" harus digantikan sebagai pengganti "Organisasi Pembebasan Palestina" dalam sistem PBB, tanpa prasangka terhadap status peninjau dan fungsi-fungsi PLO dalam sistem PBB, sesuai dengan resolusi-resolusi dan kegiatan PBB yang relevan dengan nya;
4. *Meminta* Sekretaris Jenderal untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan resolusi ini.

**RESOLUSI MAJLIS UMUM NOMER 45/68**

Disahkan pada tanggal 6 Desember 1990  
Konperensi Perdamaian Internasional di Timur Tengah

**MAJLIS UMUM**

*Setelah mempertimbangkan* laporan Sekretaris Jenderal (PBB) tanggal 12 Nopember 1990,

*Setelah mendengar* pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 1990 oleh Ketua Delegasi Peninjau Palestina,

*Menekankan* bahwa pencapaian penyelesaian yang menyeluruh terhadap konflik Timur Tengah, yang intinya adalah masalah Palestina, merupakan sumbangan yang berarti bagi perdamaian dan keamanan dunia,

*Menyadari* akan dukungan sangat besar untuk menyelenggarakan Konperensi Perdamaian Internasional mengenai Timur Tengah.

*Mencatat dengan penghargaan* atas usaha-usaha Sekretaris Jenderal (PBB) bagi terselenggaranya konperensi ini.

*Dengan menyadari* situasi yang semakin gawat di wilayah Palestina yang diduduki [Israel] sebagai akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan keras Israel, sebagai penguasa wilayah yang didudukinya itu, maka dengan tetap tidak adanya kemajuan untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah,

*Menyadari* akan timbulnya gerakan (*intifadah*) yang berkepanjangan oleh rakyat Palestina sejak 9 Desember 1987, yang dimaksudkan untuk menuntut diakhirinya pendudukan wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967.

1. *Menegaskan kembali* adanya keperluan mendesak untuk mencapai penyelesaian konflik Arab-Israel secara adil dan menyeluruh, yang intinya adalah masalah Palestina;
2. *Menghimbau sekali lagi* untuk diselenggarakannya Konperensi Perdamaian Internasional mengenai Timur Tengah, atas prakarsa PBB, dengan mengikutsertakan semua pihak yang terlibat konflik, termasuk PLO, dengan hak yang sama, serta lima negara anggota tetap Dewan Keamanan, berdasarkan resolusi-resolusi Dewan Nomer 242 (1967) tanggal 22 November 1967, dan Nomer 338 (1973) tanggal 22 Oktober 1973, dan pengakuan atas hak-hak nasional rakyat Palestina yang sah, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri;



3. *Menegeskan kembali* prinsip-prinsip berikut ini untuk mencapai penyelesaian perdamaian yang menyeluruh itu:
  - a) Penarikan mundur Israel dari wilayah-wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem, serta dari wilayah-wilayah Arab lain yang didudukinya;
  - b) Menjamin penataan-penataan keamanan semua negara di wilayah itu, termasuk negara-negara yang disebut dalam resolusi Nomer 181 (II) tanggal 29 November 1947, dalam batas-batas yang aman dan diakui secara internasional;
  - c) Memecahkan masalah para pengungsi Palestina sesuai dengan Resolusi Majelis Umum Nomer 194 (III) tanggal 11 Desember 1948, dan resolusi-resolusi terkait berikutnya;
  - d) Pembongkaran tempat-tempat pemukiman [Yahudi] Israel di wilayah-wilayah yang diduduki sejak tahun 1967;
  - e) Menjamin kebebasan untuk memasuki tempat-tempat suci, bangunan-bangunan dan tempat-tempat keagamaan.
4. *Membaca* keinginan-keinginan dan usaha-usaha yang dinyatakan secara terbuka untuk menempatkan wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem, di bawah pengawasan PBB dalam jangka waktu terbatas, sebagai bagian dari proses perdamaian itu;
5. *Mengajak sekali lagi* Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang perlu untuk mengadakan Konferensi Perdamaian Internasional mengenai Timur Tengah, termasuk dibentuknya Komite Persiapan, dan untuk mempertimbangkan jaminan-jaminan terhadap tindakan-tindakan keamanan yang disepakati oleh Konferensi itu bagi semua negara di wilayah tersebut.
6. *Meminta* Sekretaris Jenderal [PBB] untuk melanjutkan usahanya hanya dengan pihak-pihak yang terkait, dan dengan berkonsultasi dengan Dewan Keamanan, untuk memberikan kemudahan bagi terselenggaranya konferensi itu, dan untuk menyampaikan laporan-laporan kemajuan mengenai perkembangan-perkembangannya dalam masalah ini.

## KRONOLOGI SEKITAR PERJANJIAN OSLO

- 20-08-1993: *Gaza-Jericho first* ("Perjanjian Oslo I") disepakati dalam pertemuan rahasia PLO-Israel di Oslo, Norwegia.
- 03-09-1993: anggota kelompok "fundamentalis" Islam Palestina, Hamas, menembak mati seorang serdadu Israel di daerah pendudukan, sebagai protes terhadap formula Gaza-Jericho. Penembakan itu adalah yang pertama kalinya sejak diumumkannya formula Gaza-Jericho.
- 04-09-1993: Yasser Arafat berhasil mendapatkan dukungan penting dari Komite Sentral Al-Fatah, faksi terbesar dalam PLO, dalam sebuah sidang darurat yang diadakan di Tunis (ibukota Tunisia). Dukungan itu sangat berarti bagi Arafat, mengingat sebelumnya suara Al-Fatah sempat terbelah, antara yang pro dan kontra terhadap formula Gaza-Jericho.
- 13-09-1993: Deklarasi Prinsip (DOP) ditandatangani di Washington.
- 21-09-1993: Abu Shaban, pembantu dekat Arafat yang mendukung formula Gaza-Jericho, ditembak mati di Gaza. Ia adalah pejabat senior PLO pertama yang terbunuh sejak diresmikannya formula Gaza-Jericho.
- 24-09-1993: Arafat berkunjung ke Jakarta.
- 01-10-1993: Dalam sebuah konferensi internasional di Washington, 47 negara dan beberapa organisasi internasional sepakat menyediakan dana sekitar satu milyar dollar AS bagi rekonstruksi Gaza dan Tepi Barat.
- 02-10-1993: Tentara Israel menembak mati dua anggota Hamas dan menahan 16 lainnya di Gaza.
- 04-10-1993: Seorang warga Palestina anti-formula Gaza-Jericho melancarkan aksi bunuh diri dengan bom mobil terhadap warga Israel di Tepi Barat. Seorang tewas dan 30 luka berat.
- 06-10-1993: Di Kairo, untuk kedua kalinya Arafat bertemu Rabin.
- 10-10-1993: 10 kelompok anti-formula-Gaza-Jericho ("The Damascus Ten") mengadakan pertemuan di Damaskus, dan sepakat untuk meningkatkan *intifada* di wilayah pendudukan.
- 13-10-1993: Dibentuk komite bersama PLO-Israel untuk mengimplementasikan DP.
- 13-12-1993: Persetujuan mengenai penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza dan Jericho.
- 13-04-1994: Pasukan Israel sepenuhnya sudah meninggalkan Gaza dan Jericho. Dimulai pemerintahan sementara Palestina di Gaza dan Jericho selama lima tahun.
- 13-07-1994: Pemilu untuk memilih anggota Dewan Palestina yang akan menjalankan pemerintahan sipil di Gaza dan Jericho.
- 13-12-1995: Batas akhir perundingan tentang penyelesaian permanen; Perjanjian Oslo II diresmikan.
- 13-12-1998: Masa sementara berakhir, penyelesaian permanen mulai berlaku.

Sumber: *The Middle East* (Oktober 1993) dan berbagai media massa.

## *Deklarasi Amman*

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) reguler Arab yang digelar di Amman-Jordania selama dua hari, Selasa dan Rabu (25/3), berhasil mengeluarkan deklarasi Amman sebagai berikut:

Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi Arab dan hubungan Arab-Arab dalam konteks tantangan dan ancaman terhadap keamanan nasional Arab yang disusul dengan bekunya proses perdamaian di Timur Tengah:

*Pertama*, akan berpegang teguh terhadap keterkaitan nasionalisme dan jalinan persaudaraan. Piagam Liga Arab, menjaga keamanan Arab atas dasar menghormati keselamatan dan kedaulatan suatu negara atas tanah, hak-hak dan kekayaan alamnya, serta tidak dibenarkan ikut campur urusan dalam negeri atau penggunaan kekuatan atau ancaman. Dan, Komitmen menyelesaikan masalah dengan cara damai melalui dialog dan perundingan serta komitmen atas mekanisme penyelesaian masalah dengan cara damai.

*Kedua*, menekankan kembali komitmen atas keputusan menggelar KTT Arab secara periodik dalam waktunya yang telah ditentukan mengingat pentingnya meningkatkan kerja sama Arab.

*Ketiga*, berusaha memperkuat solidaritas Arab, memberdayakan kerja sama Arab untuk mencapai kerja sama ekonomi Arab menurut metode baru yang berdasarkan pada konsep yang konkret.

*Keempat*, mendukung keter-

kaitan antara sesama warga Arab dalam upaya membangkitkan masyarakat madani di dunia Arab mengingat perannya dalam perimbangan, memelihara identitas umat, mengkonsolidasikan perannya dan memperkuat keberadaannya.

*Kelima*, mempromosikan interaksi dengan budaya lain dengan titik tolak dari suatu keyakinan yang harus meninggalkan semua bentuk rasialisme, serta mengajak kearah toleransi, hidup berdampingan dengan dasar saling menghormati dan menjaga hak-hak orang lain.

*Keenam*, mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina, Suriah, dan Lebanon untuk mengembalikan hak-haknya. Ditegaskan, pemukiman pasukan Israel dari tanah yang diduduki pada tahun 1967, terutama Kota Yerusalem timur, merupakan satu-satunya jalan bagi tercapainya perdamaian yang adil dan menyeluruh di Timur Tengah. Dan, tercapainya perdamaian yang adil adalah jaminan bagi terwujudnya keamanan semua penduduk. Setang terwujudnya perdamaian yang adil dan menyeluruh terkait erat dengan bebanya kawasan ini dari senjata pemusnah massal, terutama semua nuklir yang dimiliki Israel.

*Ketujuh*, menyerukan dicabutnya sanksi atas Irak dan hendaknya melibet persoalan itu dari sudut kemanusiaan dengan berdasar nilai-nilai agama dan bangsa.

*Delapan*, menyerukan untuk melupakan pertikaian dan me-

wujudkan rekonsiliasi Arab, dan mencegah segala tindakan yang mengancam solidaritas Arab atau mengancam keamanan nasional, termasuk aksi meoan masa, tanpa menggingga kebebasan pers dalam mumbentuk opini umum yang membantu hak-hak Arab.

*Sembilan*, mengambal langkah yang mempercepat terciptanya kawasan dagang bebas Arab dan mendukung pembentukan komite setingkat menteri untuk mewujudkan program tersebut.

*Sepuluh*, menghargai Pemerintah Jordania di bawah pimpinan Raja Abdullah II yang bersedia menjadi tuan rumah KTT Arab dan membantu mensukseskannya.

## Aktif Perang di Usia 20

**ARIEL SHARON** adalah salah satu politisi kontroversial Israel. Ia melancarkan serangan ter-

hadap Lebanon pada 1982. Kala itu posisinya menteri pertahanan. Korbanannya 2.000 warga Palestina terbunuh dengan penerimaan pasif Israel. Ia mempercepat pembangunan proyek di wilayah yang diduduki dari 1990 sampai 1992. Ia adalah politisi Israel paling tidak populer dan dibenci bagi lawannya. Inilah cuplikan biografinya.



Ariel Sharon

**1928:** Lahir di Kafr Malal di Palestina, dengan nama Ariel Shinerman. Keluarganya simpatisan kuat zionis.

**1948:** Sharon berpartisipasi di perang Palestina pertama. Setelah perang ia tetap aktif di militer di bagian intelijen dan serangan balas dendam terhadap Arab.

**1956:** Di perang Suez-Sinai, Sharon bertindak di luar perintah menyebabkan banyak korban bagi Israel. Ini menyebabkan karirnya mandek.

**1965:** Dengan Yitzhak Rabin sebagai pimpinan staff, karir Sharon kemudian berlanjut. Dua tahun kemudian jadi Brigjen.

**1967:** Komandan divisi selama perang enam hari antara koalisi Arab dan Israel.

**1973:** Sharon meninggalkan tentara. Ia bergabung dengan partai Gahal, dan aktif di formasi Likud.

**Oktober:** Mengomando satu divisi di perang Yom Kippur dengan sukses.

**1974:** Mundur dari parlemen dan mengambil posisi darurat senibr di cadangan militer.

**1975:** Menjadi Penasehat PM Yitzhak Rabin.

**1976:** Membentuk partai Shlomzion. Setahun kemudian dapat dua kursi.

**1981:** Menjadi Menteri Pertahanan.

**19. 2:** Bertanggung jawab atas penyerangan brutal atas Lebanon, dan hanya sedikit perlawanan.

**1983, 14 Februari:** Sharon mundur dari menteri pertahanan setelah ditekan publik dan media.

**1984:** Sharon kalah dalam pemilihan untuk menjadi pimpinan partai Likud. Pada September, Sharon ditunjuk sebagai menteri perdagangan dan industri di zaman Shimon Peres.

**1998, 9 Oktober:** Sharon dipilih jadi menteri luar negeri oleh PM Netanyahu.

**1999, 27 Mei:** Netanyahu mundur dari pimpinan partai Likud dan Sharon menjadi pimpinan baru.

**2000, 28 September:** Sharon memicu protes besar warga Palestina setelah melanggar empat suci Muslim di Yerusalem/AI Quds dan menewaskan 400 warga Palestina, 50 di antaranya Israel. (frd)

## Lampiran XV

## The Labor Party

*The Labor Party (Mifleget ha-Avodah ha-Yisraelit/Maarach) was established in 1968 with the joining of Mapai, Ahava, HaAvoda and Labor. Labor is the dominant left-of-center party in Israel. Until Mehitza's victory in 1977, every Israeli Prime Minister came from Labor. Since 1977, Labor leaders Yitzhak Rabin, Shimon Peres and Yehonatan Peled have served as Prime Ministers.*

The Israel Labor Party is a social-democratic political party. Its ideological vision for Israel is based upon the values of the Jewish labor movement, which are in turn, products of the social experience and cultural heritage of the Jewish people.

The Labor Party has a principled commitment to the maintenance of a democratic form of government; to the enhancement of the social and economic well being of all of Israel's citizens; to the strengthening of Israel's economy based on free market principles; and, to the achievement of a comprehensive peace with security in the Middle East.

The Labor Party is pragmatic in its approach. It recognizes the necessity to compromise in both the domestic arena and in foreign affairs in order to promote political stability and the advancement of Israel's fundamental interests.

Leaders of Israel's Labor Party have included David Ben-Gurion, Moshe Sharet, Levi Eshkol, Golda Meir, Moshe Dayan, Abba Eban, Yehonatan Peled and Shimon Peres. The head of the Labor Party today is Ehud Barak. In 1992, Labor joined Mizrahim, and Gesher to form the One Israel Party and won a total of 26 seats in the Knesset.

### Political Platform

As approved at the 6th Party Congress, May 1997

#### Introduction

The Israel Labour Party will strive to create a new reality in which there will be no more terrorism and war, and in which tremendous financial resources will no longer be committed to the arms race. Israel's peace and security policy will be aimed toward ending the Israeli-Arab conflict. The regional policy will be based on pursuing economic cooperation in various fields; mutual ties in the areas of culture, science and technology; joint development of the standard of living and welfare; and fulfilling the promise of a better future with greater opportunities for the young generation in our region. In order to achieve this goal, Israel will continue to conduct peace negotiations, while at the same time, combating the forces of fundamentalism and terrorism that aim to destroy this process. This new reality will strengthen Israel's security and standing and will encourage economic prosperity and the welfare of the state.

#### Israel's Security

The Government of Israel is responsible for the personal and general security of the citizens of the State of Israel. Israel's peace policy is based on the reconciliation between both peoples and their readiness to live in respect of mutual rights to self-determination and statehood, and on the superior deterrent capability and strength of the IDF.

A stable peace is, in and of itself, an important security element for the strength of the State. This stability is based on, among other things, defensible borders and vital security arrangements which the Israel Labour Party sees as essential elements for all future security arrangements.

The reconciliation of the people of the region and their readiness to live in respect of the rights to self-determination are also important elements for the future nature of the region.

Israel will continue to develop its qualitative advantage over those of Arab armies, and will place a high priority on independent research and development in the area of defense and on expanding the manufacture of innovative and sophisticated weaponry and material. Combating terror and subversion, will be a fundamental component of Israel's peace and security policy. The fight against terrorism requires a firm stand, sophistication, determination, patience, regional and international mobilization - the foundations of which have already been laid by the previous Labour Government.

Israel will struggle to prevent nations whose ideologies are based on hatred and ruin, first and foremost, the nations of Iran and Iraq, from obtaining weapons of mass destruction. It will work within the regional and international framework to prevent the lethal combination of fundamentalist ideology and unconventional weapons.

#### **Final Status Agreement with the Palestinians**

The negotiations will be based on the Oslo Accords, with guarantees for the State of Israel to exist in peace and security within defensible borders, and with precise definitions of the elements for the normalization of relations between Israel and its neighbors.

##### **1. Jerusalem**

United Jerusalem, the capital of Israel, under Israeli sovereignty. The Palestinian residents of the city will enjoy municipal rights in the quarters in which they reside, and special arrangements will be established for the sites sacred to Christianity and Islam.

##### **2. Self-Determination for the Palestinians**

The Labour Party recognizes the Palestinians' right to self-determination, and does not rule out in this connection the establishment of a Palestinian state with limited sovereignty.

##### **3. Security**

The Jordan river will be Israel's eastern security border and there will be no other army stationed to the west of it.

##### **4. Borders and Settlements**

Israel extends its sovereignty over areas that are major Jewish settlement blocs.

##### **5. The Right of Return**

Israel does not recognize the right of return of Palestinians to areas under Israeli sovereignty.

Israel will negotiate with the Palestinians on allowing the return to areas under Palestinian control.

### **Israeli Relations with Syria**

The Israel Labour Party will continue to pursue a peace agreement with Syria. Within the framework of the peace agreement, Israel will be open to compromise on the basis of land for peace and security, U.N. Security Council Resolutions 242 and 338, and the guidelines of the Madrid Conference.

### **Security Arrangements**

Within the framework of a peace agreement, Israel demands strict and diverse security arrangements. Israel insists that a peace agreement with Syria will include Syria's obligation to prevent hostile activities against Israel, emanating from its soil and areas under its control.

### **Type of Agreement and its Implementation**

The agreement will be implemented gradually and will be accompanied by confidence building measures. Within the framework of the peace agreement, Israel insists on the full normalization of relations considered standard among neighboring countries living in peace.

### **The Question of Water**

An agreement of the source of water, its protection, development and use will be an integral part of the peace agreement.

### **POWs and MIAs**

In any peace agreement with Syria, Israel will demand that the Syrian government work toward the return of Israel's POWs and provide any and all information on the fate of its MIAs. Israel will also insist that Syria enable the return of the remains of Eli Cohen.

### **Settlements**

Existing settlements on the Golan will be strengthened.

### **Israel - Lebanese Relations**

Israel is prepared to reach a peace agreement with an independent and sovereign Lebanon. Israel has no territorial designs on Lebanon and recognizes that the international border serves as the border for peace between the two countries.

The peace agreement, which will include diplomatic ties and full normalization of relations, will protect the security interests of the State of Israel and its citizens in the north through a variety of security arrangements that will ensure, among other things, the complete cessation of terrorism and the prevention of its renewal.

Within the framework of either a comprehensive settlement or a partial agreement, the Israel Labour Party will strive to create conditions that will enable the IDF to withdraw from Lebanon in return for a guarantee of peace and well-being for the residents of northern Israel.

In any agreement, either full or partial, there will be guarantees for the security and safety of the residents of the security zone in southern Lebanon and the forces of the South Lebanese Army.

### **Israel and the Palestinians: Demographic Facts**

Israel's population today is 5.5 million. 4.5 million of Israel's people are Jewish while 1 million are Arab. The overwhelming number of Israel's Arab citizens were born and raised in the State of Israel, after 1948.

### ***Palestinian Population Statistics in the Territories***

- In 1967, after the Six Day War, the Palestinian population in the Gaza strip was 300,000.
- In 1995 the Palestinian population in the Gaza Strip was over 900,000.
- In 1995 the Palestinian population on the West Bank, in Judea and Samaria, was 1.25 million.
- The World Bank reports that by the year 2030 the Palestinian population in these areas will more than double. There will be approximately 5.1 million Palestinians in the territories (2.7 million on the West Bank and 2.4 million in the Gaza Strip). The Jewish population in the territories of Judea, Samaria and Gaza numbers 145,000.

*Unemployment among the Palestinians is at or above 50%. The large majority of the population in Gaza is under the age of 25.*

The choice facing Israel and the Palestinians is either the creation of a reality based on a geo-political separation, the development of a relationship of peaceful co-existence with security, improved social and economic conditions for both peoples and the hope for a better future for our youth or, a renewal of the cycle of violence and blood letting, the spread of religious fanaticism and an increase in political extremism.

### ***Settlement Building Facts 1992-1996***

Units under construction in 1992:

Units under construction on the West Bank and in the Gaza Strip, summer 1992: up to 40,000.

When the Labor-led government assumed power in 1992 it prohibited new construction and terminated construction on the great majority of the units already being built. The remaining 10,000 units, most of which were close to completion, were allowed to be finished.

*With the exception of the Jerusalem area, virtually no new construction was permitted in the settlements all through the period, 1992-1996, of the Labor-led government.*

### ***Population Increase:***

The increase in the number of people living in settlements from 1992 to 1996 totaled some 39,000 people. 16% of these were due to natural growth (i.e. 6,240 people). The remainder can be accounted for largely by the occupation of many of the housing units mentioned above.

In July 1992, when the Labor-government began its rein, there were approximately 106,000 settlers in the territories of the West Bank and Gaza Strip.

In June 1996, the population totaled about 145,000 individuals. The four years growth in population, therefore, totaled some 37% or approximately 39,000 people.

It should also be noted that more than half of the number of people who became new residents in the settlements between 1992 and 1996 actually took up residence in the Jerusalem area or in communities located literally within minutes of the pre-67' border (the 'green line').



### ***Labor Legacy***

When the new Likud-led government assumed power in the summer of 1996 it did not receive, as the previous government had, a legacy of tens of thousands of new housing units being constructed throughout the West Bank and in the Gaza Strip.

### ***Likud Policy***

On October 17, 1996, Prime Minister Netanyahu has canceled the Labor government freeze on construction in the territories and has announced plans to expand existing settlements and build new roads and industrial parks throughout the West Bank and Gaza Strip. On October 17 Prime Minister Netanyahu announced his intention to personally take responsibility for advancing the new government's settlement expansion program.

Sources: Central Bureau of Statistics, Settlement Division WZO and Peace Now

## **Other News**

### **Labor Opposes Change in Conversion Law**

Labor Party Knesset M.K.'s oppose the proposed amendment to the Law on religious conversions. "The approval of this Law" the Labor Party caucus declared "will affect the 'status quo', create division within the Jewish people and affect the solidarity with Israel of a great portion of the Jewish people".

Labor Party leader Shimon Peres, explaining the decision to oppose the proposed amendment put forward by the Orthodox religious parties, declared that "passage of the proposed law would divide the Jewish people. It would be a grave political mistake to do this". "We favor", he said, "finding a solution which will maintain the unity of the Jewish people".

M.K. Dr. Ephraim Sneh, former Minister of Health, said: "Passage of this law would be a slap in the face of the Jewish people. It will result in our losing the moral high ground as the center of Jewish life".

M.K. Prof. Shevah Weiss, former Speaker of the Knesset said: "The current (conversion) law has created unnecessary problems and has resulted in the justified protest of the Reform and Conservative religious communities. The proposed amendment to the law will create a split among the Jewish people and this must be prevented".

M.K. Haggai Merom, former Chair of the Knesset Security and Foreign Affairs Committee said: "The proposed law which supposedly deals with the matter of conversions in Israel, in fact has much broader implications. It will result in the separation of the Diaspora Jewish community from Israel. We must not, under any circumstances, allow the Orthodox to change the law and then to exploit the opening it would give give them to impose further restrictive controls on Jewish life. The Reform and Conservative communities in Israel must not be isolated".

### ***Quote Unquote***

"We are not making any substantive changes in our relations with Diaspora Jewish communities and their right to perform conversions. We are simply changing a de facto situation to a de jure one. This is a judicial process which was imposed on us by Reform and Conservative bodies".  
Prime Minister Benjamin Netanyahu

### **Labor and Likud - The Difference**

#### **The Oslo Process**

The Oslo Agreements is based on the principles of mutual recognition and territorial compromise. The Oslo "process" is based on the principle of gradualism, including the gradual redeployment of Israeli forces on the West Bank as the Palestinian Authority assumes both political and security responsibility in agreed upon areas.

**Labor** believes it is essential to adhere to the Oslo Process which is gradual and step by step. The idea of conducting negotiations over permanent status issues immediately, without pursuing a more gradual, supervised implementation process, is to risk undermining the entire peace

process by addressing the most explosive issues in an atmosphere of distrust and enmity.

**Likud** seeks to ignore the Oslo "process" and to advance immediately to permanent status talks without having created conditions conducive to rational and cautious decision making based on agreed and acceptable incremental changes in political and security realities on the ground.

### Settlements

**Labor** opposes construction of new settlements and the expansion of existing settlements before the final status agreements are reached.

**Likud** will not build new settlements at this time. However, the Likud-led government has approved the expansion of existing settlements, including the creation of new neighborhoods often well beyond the borders of current settlement boundaries.

**Labor** would extend Israeli sovereignty over areas of major Jewish settlement blocs. (It has been estimated that 70% of the settlers are located in several settlement blocs, and a small number of other settlements close to the pre-1967 border, on a total about 10% to 15% of the West Bank land mass).

### Har Homa

**Labor** considers Har Homa to be within the southern municipal boundaries of Jerusalem. The governments of Yitzhak Rabin and Shimon Peres were committed in principle to developing Har Homa. However, out of recognition of the consequences of a unilateral action of this kind, approval of implementation was withheld until final status talks establish undisputed boundaries for all of Jerusalem.

**Likud**, without heeding the warnings of Israel's security establishment and without due consideration of the political consequences, chose to initiate the development program of Har Homa.

### Territories and Borders - Final Status Guidelines

**Labor's** position is that the final status borders must be based on three principles.

1. Population separation between the 2 million plus residents of the West Bank and Gaza strip and the State of Israel.
2. Adjustments in the pre-1967 borders to accommodate Israel's security requirements.
3. There will be no foreign army west of the Jordan river.

To insure stability in the Israeli - Palestinian relationship and the viability of the emerging Palestinian entity, geographical contiguity must be allowed for on most of the West Bank.

**Likud** seeks to extend Israeli sovereignty over a majority of the territory on the West Bank. Included would be as many as 120 or more Jewish settlements, many of which are located within, or contiguous to, areas with large Palestinian population concentrations. This will insure the fact that there will be many small enclaves of Jewish settlers dispersed throughout the Palestinian controlled territories.

This Likud "peace plan", will result in preventing the creation of a viable, contiguous Palestinian geographical entity, a Palestinian *sine qua non* to a political settlement. It will also perpetuate and exacerbate a Bosnia like integration of population and territory.

### The Jordan Valley

**Labor** will make the Jordan river Israel's eastern security border. Necessary and appropriate security arrangements will be made to insure an Israeli presence in the Jordan valley.

**Likud** calls for the extension of Israeli sovereignty over the entire Jordan Valley area, making the Jordan valley Israel's eastern political border.

### Jerusalem

**Labor** is committed to maintaining Jerusalem as the united capital of Israel, under Israeli sovereignty. The Palestinian residents of the city will enjoy municipal rights in the quarters in

which they reside, and special arrangements will be made for the sites sacred to Christianity and Islam.

**Labor** favors the preservation of separate residential neighborhoods in the city, in order to prevent unnecessary friction between the Jewish and Arab residents.

**Likud**, while advocating that Jerusalem remain united and under Israeli sovereignty, has encouraged and supported Jewish habitation in areas of the city such as Ras El Amud and Silwan, which until now have been populated exclusively by Arab residents.

### Syria

**Labor** led governments, under Prime Minister Yitzhak Rabin and Shimon Peres, affirmed the principle of land for peace in Syrian track negotiations.

The depth of Israel's territorial compromise on the Golan Heights is to be predicated on the depth of the peace, normalization arrangements and on security arrangements. Water sources, their protection and use, as well as arrangements for economic cooperation, will also be essential elements to any agreement.

### Likud

**Likud** appears to be ready to consider a territorial compromise on the Golan Heights. However, its refusal to acknowledge the progress which was made in negotiations conducted by the Labor government, has created a stalemate on the Syrian track.

### Lebanon

**Labor** seeks a comprehensive agreement with the Lebanese, providing for security arrangements in southern Lebanon which end terrorism and which guarantees peace and security for the residents of the region, as well as along Israel's northern border.

Likud's inability to reopen talks on the Syrian track has perpetuated the conflict with Hizbollah terrorist forces in Lebanon.

### Economics

**Labor** favors a free market economy, gradual privatization and reduced government involvement in the economy. Labor maintains that government must act with social responsibility, recognizing that the provision of education, health and other social services, cannot be guaranteed by the market place. Labor does not agree with the extreme philosophy of socio - economic Darwinism. Social stability and justice must be guaranteed by responsible government.

**Likud's** extreme commitment to market forces and its support of West Bank settlements have resulted in enormous cuts in the education budget, in the reduction of essential social services, in a crisis in the medical system and in high and increasing levels of unemployment, and social discontent.

### Religious Pluralism

**Labor** is committed to the unity of the Jewish people. It affirms the legitimacy of all religious streams and asserts that Israel is a democratic, Zionist and Jewish State in which all have the right to live in an atmosphere of tolerance and true equality.

The Labor Party is opposed to the passage of legislation in the Knesset which would deny the rights of non-Orthodox religious groups in Israel.

**Likud** is committed to an agreement with its extreme Right wing, religious and haredi (ultra-Orthodox) coalition partners. This agreement obliges the Likud to support legislative and other arrangements designed to insure the centrality and authority of the Orthodox Rabbinate in all matters of personal status and religious practice in Israel.

Source: Israeli Labor Party

## Lampiran XVI

## 1996 Likud Party Platform

*The following is a translation of the entire first chapter of the Likud Party platform. Detailed summaries are provided for the remaining chapters.*

---

 Chapter 1: Peace & Security
 

---

## Preamble

The right of the Jewish people to the Land of Israel is an eternal right, not subject to dispute, and includes the right to security and peace. Zionism is the liberation movement of the Jewish people, and its fulfilment is at the top of the list of priorities of the Government of Israel. Immigration will be increased, and settlement will be strengthened. The decision to freeze settlements will be rescinded.

Peace will be a central aim of Israel's policy. The Government of Israel will conduct direct negotiations with Arab states to reach peace agreements.

Security is the basis for durable peace in our region. Israel will make security a first condition in any peace agreement.

## Operatives

1. The Government of Israel will honor international agreements, and will continue the diplomatic process to achieve a just and lasting peace in the Middle East. It will recognize the facts created on the ground by the various accords, and will act to reduce the dangers to the future and security of Israel resulting from these agreements.
2. The Government of Israel will carry out negotiations with the Palestinian Authority to achieve a permanent peace arrangement, on condition that the Palestinians fully honor all their obligations. Most important among these are that the Palestinians annul in an unequivocal manner the clauses in the Palestinian Charter which call for the destruction of Israel, and that they prevent terror and incitement against Israel.
3. The Government of Israel will enable the Palestinians to manage their lives freely, within the framework of self-government. However, foreign affairs and defense, and matters which require coordination, will remain the responsibility of the State of Israel. The government will oppose the establishment of an independent Palestinian state.
4. Sources of employment for the Palestinians will be developed in the autonomous areas to reduce the number of Palestinian workers in the Israeli market.
5. Jewish settlement, security areas, water resources, state land and road intersections in Judea, Samaria and the Gaza Strip shall remain under full Israeli control.
6. Israel will keep its vital water resources in Judea and Samaria. There shall be no infringement of Israel's use of its water resources.
7. United and undivided Jerusalem is the capital of the State of Israel. Activities which undermine the status of Jerusalem will be banned, and therefore PLO and Palestinian Authority institutions in the city, including the Orient House, will be closed.

Lake Kinneret. This will be the permanent border between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan. The Kingdom of Jordan may become a partner in the final arrangement between Israel and the Palestinians, in areas agreed upon in the negotiations.

9. Israel will conduct peace negotiations with Syria, while maintaining Israeli sovereignty over the Golan Heights and its water resources.

---

## Chapter 2: Foreign Relations

---

1. Israel's foreign policy will serve its security interests and the hope for peace and economic prosperity. Expanding economic ties will be a main task of the Foreign Ministry.
2. Israel will continue to view its relations with the United States as the cornerstone of its foreign policy, with ties between the two countries grounded in shared values of freedom, justice, and democracy.
3. Israel has an interest in a strong Hashemite Jordan. There are a whole range of areas of common interest between Israel and Jordan, and the government will work to deepen the ties between the two countries.
4. Israel desires good neighborly relations with Egypt, the largest Arab country. However, relations between Jerusalem and Cairo can only develop on the basis of reciprocity.
5. Israel will continue efforts to reach mutual recognition with Arab countries with which it does not have relations, and will try to establish full relations with states with which it has low-level contacts. Particular attention will be given to Morocco and Tunisia, as well as the Gulf states.
6. Israel will seek to strengthen its ties with Russia, along with other CIS states, recognizing Russia's importance in the world arena, its interest in the Middle East, and with an eye to maintaining close ties with Jews living there.
7. Israel looks to become an associate member of the European Community, and will continue its policy of integrating into the European market.
8. Israel will continue to deepen its ties with countries in East Asia -- with China, Japan, India, Singapore, Thailand, South Korea, Vietnam, and Australia -- in areas ranging from trade to military cooperation to culture.

---

## Chapter 3: Israel Defense Forces [IDF]

---

1. Israel will continue to maintain its full power of deterrence. Israel cannot ignore the threats to its security emanating from the efforts of Iran and other countries to procure arms, and from Syria's determination to prepare for war against Israel.
2. Israel will draw on all its science and technology potential to develop special weapons systems in order to maintain its qualitative edge and prepare the IDF for the battlefield of the next century.
3. A National Security Council will be established for the first time by the prime minister, in accordance with Basic Law: Government.

1. The government will work to restore a sense of security to Israel's citizens.
2. The war on crime and drugs will be redoubled, and the number of Border Police increased, allowing civilian police to deal with matters of law and order.

---

#### Chapter 5: The Jewish People

---

1. Israel must see to it that Jews of the Diaspora do not abandon their people, for whatever reason. The main way to insure this is through Jewish and Hebrew education for Diaspora youth. The aim is that there will not be a Jewish child anywhere in the world who does not receive some form of Jewish education.
2. The government will initiate the formation of an education system for Diaspora Jewry, with the participation of Israel's Education Ministry, the Jewish Agency, the Zionist Federation, and Jewish communities around the world. Israeli teachers will be sent to to teach in Jewish schools, in rotation of several years, just as diplomats are sent to serve in embassies.

---

#### Chapter 6: Aliyah & Absorption

---

1. The government will set a goal of having seven million Jews in Israel within the next decade. The government will prepare the country to absorb Jews, both new immigrants and returning citizens, viewing this not only as a national undertaking but as strengthening Israel economically and culturally.
2. The government will aid new immigrants with housing and employment, while also giving an equal level of assistance to young native Israelis who are entering the job market.
3. Regarding Soviet immigrants, the government will work to have them employed in their professions. The government will implement a master plan which will create 130,000 jobs for engineers, doctors, scientists, and teachers, according to the recommendations of the Branover Committee.
4. Regarding Ethiopian immigrants, the government will work to improve education among the young by desegregating classes and encouraging parental involvement in school, and then will encourage students to pursue college degrees through grants and other assistance. The government will work to improve the housing situation by finally closing caravan sites and absorption centers and giving special mortgages to Ethiopian immigrants.

---

#### Chapter 7: Economy

---

1. The national camp has always espoused a free-market economy. The experience in Israel and the world has proven that economics based on socialism doesn't work. On the other hand, an economy based on free enterprise brings growth and prosperity over time.

last few years there is a growing deficit in the balance of payment, which threatens the stability of the economy.

3. The government will make structural reforms in the Israeli economy, which will include the following steps:

Lower taxes -- income tax will be reduced gradually each year

Inflation will be reduced to a single digit level

Cutting bureaucracy in all possible areas

Reducing the poverty level

Modernizing infrastructure in development towns

Transportation -- improving existing roads, while preparing infrastructure for a local and nationwide rail system

Returning credibility and investment to the stock market

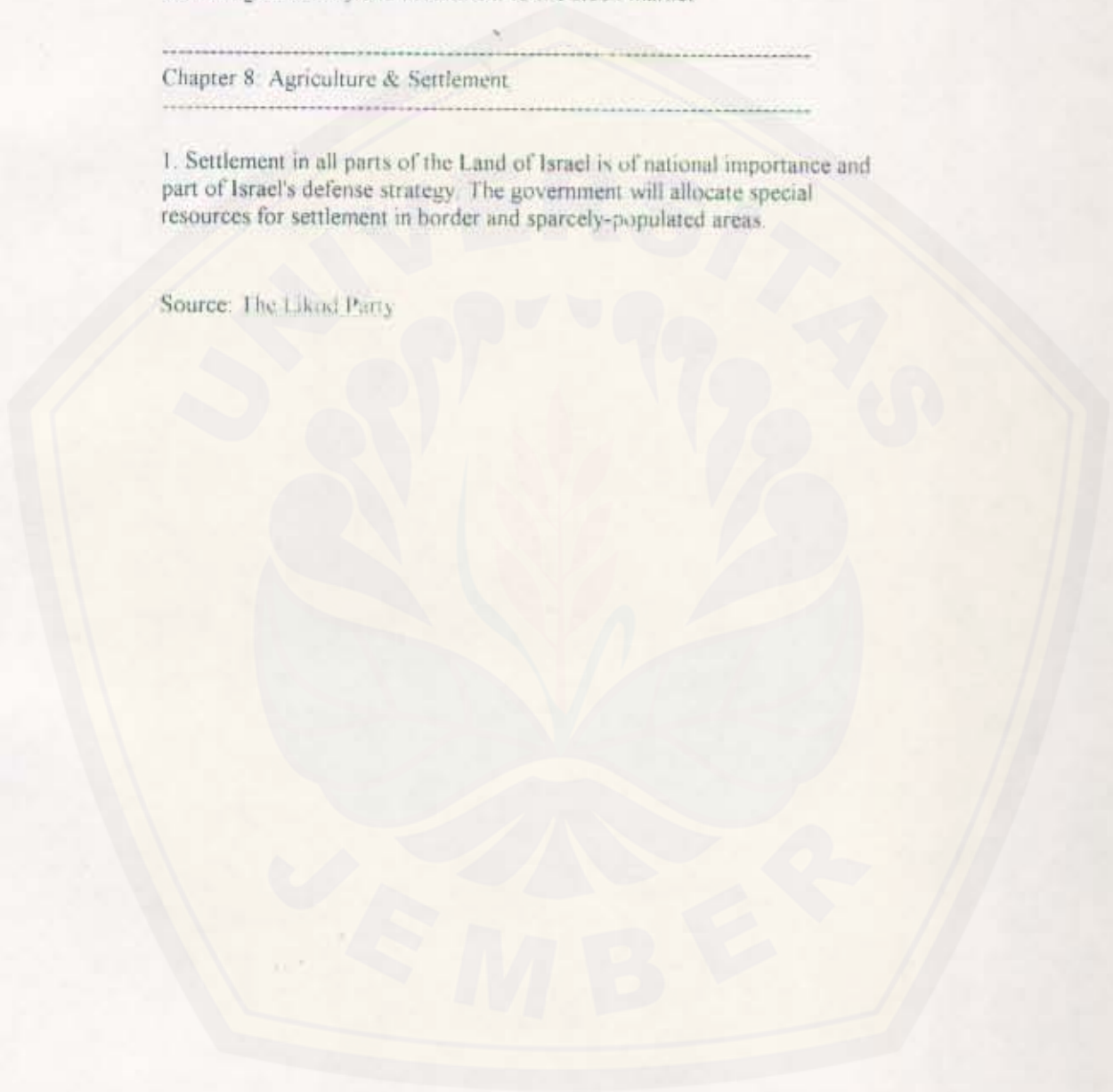
---

#### Chapter 8: Agriculture & Settlement

---

1. Settlement in all parts of the Land of Israel is of national importance and part of Israel's defense strategy. The government will allocate special resources for settlement in border and sparsely-populated areas.

Source: The Likud Party



## Appendix B -- Israel

### Political Parties and Organizations

#### Agudat Israel (Society of Israel)

A clericalist political party of ultra-Orthodox Jews, founded in Poland in 1912 and established in Palestine in the early 1920s. In 1949 it formed part of the United Religious Front (*q.v.*); in 1955 and 1959 it joined Poalei Agudat Israel to form the Torah Religious Front (*q.v.*). Originally anti-Zionist and messianic, in the 1980s this non-Zionist party, together with its Council of Torah Sages, still favored a theocracy and increased state financial support for its religious institutions.

#### Ahdut HaAvoda (Unity of Labor)

The party, founded in 1919 as successor to Poalei Tziyyon (*q.v.*), had three separate existences: from 1919 to 1930, when it merged with HaPoel HaTzair (*q.v.*) to form Mapai (*q.v.*); in 1944 its name was taken over by Siah B (Bet-Faction B), a faction that split from Mapai and formed a new party with HaKibbutz HaMeuhad (United Kibbutz Movement); and the last beginning in 1954 when Ahdut HaAvoda was reconstituted by the HaKibbutz HaMeuhad faction when it broke off from Mapam (*q.v.*). Ahdut HaAvoda was aligned with Mapai from 1965 to 1968 when both were absorbed into the Labor Party.

#### Arab Democratic Party

An Israeli Arab party founded in 1988 by Abdel Wahab Daroushe, a former Labor Party Knesset member.

#### Betar

A Revisionist Zionist youth organization founded in 1923 in Riga, Latvia, under the influence of Jabotinsky; it later formed the nucleus for Herut.

#### Citizens' Rights Movement (CRM)

Founded in 1973 by Shulamit Aloni, a former Labor Party Knesset member, the CRM advocates strengthening civil rights in Israel and greater compromise on Israeli-Palestinian issues.

#### Degel HaTorah (Torah Flag)

Formed in 1988, the clericalist party is a Shas (*q.v.*)-led Ashkenazi spinoff among the ultra-Orthodox community.

#### Democratic Movement for Change (DMC)

Founded in 1976 by Yigal Yadin and several other groups, of which the principal one was Shinui (*q.v.*). It broke up in 1979 when Shinui left over the issue of continued participation in the Likud government.

#### Free Center

A faction that splintered from Herut (*q.v.*) in 1967. From 1967 to 1973, the Free Center was a party in its own right. It became a faction in Likud (*q.v.*) from 1973 to 1977 and joined the Democratic Movement for Change in 1977. Its principal leader was Shmuel Tamir.

Gahal (Acronym for Gush Herut-Liberalim, Freedom-Liberal Bloc; also known as Herut-Liberal Bloc)



A political coalition list created in 1965 by an electoral combination of the Liberal Party (*q.v.*) and Herut (*q.v.*) to compete against the 1965 and 1969 Mapai (*q.v.*)-led electoral alignments. In 1967 on the eve of the outbreak of the Arab-Israeli War, Gahal joined a National Unity Government; in 1973 Gahal became part of the Likud Bloc (*q.v.*).

Gush Emunim (Bloc of the Faithful)

A militant right-wing extremist religio-nationalist settlement movement that seeks to impose Israeli sovereignty on the West Bank.

HaPoel HaMizrahi (Spiritual Center Worker)

Orthodox religious workers' movement founded in Palestine in 1922 by a left-wing faction of Mizrahi (*q.v.*). In 1956 it joined Mizrahi to form the National Religious Party (*q.v.*).

HaPoel HaTzair (The Young Worker)

A Labor Zionist political party founded and active in Palestine from 1905 to 1930.

Herut (Abbreviation for Tnuat HaHerut, or Freedom Movement)

Right-wing political party founded by remnants of the Irgun (see Glossary), following its disbandment in 1948. It was led by former Irgun commander Menachem Begin and is the direct ideological descendant of Revisionist Zionism (*q.v.*). In the 1980s, Herut was the dominant component in the Likud Bloc (*q.v.*).

Laam (For the Nation)

A party established in 1968 by remnants of Rafi (*q.v.*), which allied itself with Gahal. In 1973 it combined with the State List and followers of the Movement for Greater Israel to become a faction in Likud (*q.v.*).

Labor Party

The Labor Party, founded in 1968, resulted from the merger of Mapai (*q.v.*), Ahdut HaAvoda (*q.v.*), and Rafi (*q.v.*). Representation in top Labor Party institutions was based on a proportion of 57.3 percent for Mapai and 21.3 percent for each of the other two. This factional system broke down following the ascension to power in June 1974 of the younger generation triumvirate of Yitzhak Rabin, Shimon Peres, and Yigal Allon, who were less tied to the former factions. Following the 1984 Knesset elections, the Labor Party assumed an independent existence upon the dissolution of the Maarakh (*q.v.*) when it went into the National Unity Government with Likud.

Labor Zionism

Zionist movements and parties committed to the development of a democratic-socialist political economy in Israel.

Liberal Party

The second major component in the Likud Bloc; a middle-class party formed in 1961 from the merger of the Progressives and General Zionists.

Likud or Likud Bloc (Union)

The Likud Bloc was founded in preparation for the 1973 elections when the Free Center (*q.v.*) and Laam (*q.v.*) joined Gahal (*q.v.*). In 1984 Likud formed the National Unity Government with the Labor Party (*q.v.*).

Maarakh (Alignment)

- An electoral and parliamentary alignment on the national and municipal levels between the Labor Party and Mapam, from 1969 to 1984.
- Maki** (Acronym for Miflaga Kommunistit Yisraelit, or Communist Party of Israel)  
The party was founded in 1949. In 1965 it broke into two factions: Maki and Rakah (*q.v.*). Maki continued to have as members primarily Jewish communists. The electoral list of Maki and Rakah, which joined in the 1973 elections, was called Moked (Focus). In 1977 Maki joined with several other groups to create Shelli (acronym for Peace for Israel and Equality for Israel), a party which disbanded before the 1984 elections.
- Mapai** (acronym for Mifleget Poalei Eretz Israel-Israel Workers' Party)  
Mapai resulted from the 1930 merger between the main prestate Labor Zionist parties, Ahdut HaAvoda (*q.v.*) and HaPoel HaTzair (*q.v.*). In 1920 the two parties together had founded the Histadrut. In 1944 a small left-wing kibbutz-based faction seceded from Mapai and reconstituted itself as Ahdut HaAvoda-Poalei Tziyyon (Unity of Labor-Workers of Zion). Nevertheless, Mapai became the dominant party in the Yishuv and later in Israel; after 1968 it was the dominant faction in the Labor Party.
- Mapam** (Acronym for Mifleget Poalim Meuchedet-United Workers' Party)  
Mapam resulted in January 1948 from the merger of two Labor Zionist kibbutz-based parties, HaShomer HaTzair (The Young Watchman, which had been founded in 1913 as a youth movement and became a political party in 1946) and Ahdut HaAvoda-Poalei Tziyyon. The party also contained remnants of the former Poalei Tziyyon (*q.v.*). Mapam split in 1954, with former members of HaShomer HaTzair remaining, while former members of Ahdut HaAvoda-Poalei Tziyyon left to form Ahdut HaAvoda (*q.v.*). The formation of the Labor Party in 1968 caused Mapam to reverse its previous opposition to unity among Labor Zionist parties and to join an electoral alliance (Maarakh--Alignment) with the Labor Party in 1969. There was much criticism within Mapam that, as the junior partner of the Alignment, the party seemed excessively subservient to Labor's status-quo oriented policies, particularly on the issue of the future of the West Bank and the Gaza Strip. Mapam broke away from the Alignment and resumed its independent existence in the fall of 1984, when the Labor Party decided to join Likud (*q.v.*) in forming the National Unity Government.
- Mizrahi** (Spiritual Center)  
Established in 1902 as an Orthodox religious Zionist party. In 1949 Mizrahi became part of the United Religious Front. In 1956 it joined HaPoel HaMizrahi (*q.v.*) to form the National Religious Party (*q.v.*).
- Moledet** (Homeland)  
An extremist right-wing ultranationalist party founded in 1988 by a retired Israel Defense Forces (IDF) general, Rehavam (Gandhi) Zeevi.
- Morasha** (Heritage)  
A religio-nationalist party led by Rabbi Chaim Druckman that broke away from the National Religious Party (*q.v.*) in 1984. In 1986 it was reincorporated into the National Religious Party.

National Religious Party (NRP) (also known as Mafdal--acronym for HaMiflagah HaDatit-Leumit)

The NRP was formed in 1956 with the merger of two Orthodox parties: HaPoel HaMizrahi (*q.v.*) and Mizrahi (*q.v.*). From the founding of the state in 1948 to 1977, the NRP (or its predecessors) was the ally of the Labor Party (or its predecessors) in forming Labor-led coalition governments; in return the NRP was awarded control of the Ministry of Religious Affairs. In 1981 the NRP's electoral support declined from its traditional twelve seats to six as a result of the formation of Tami (*q.v.*) and Tehiya (*q.v.*). In 1984 the NRP suffered a further decline of two seats with the formation of Morasha (*q.v.*) by a former NRP faction.

Peace Now

A movement established after the October 1973 War, advocating territorial compromise over the West Bank and the Gaza Strip in order to achieve peaceful relations with the Palestinian Arabs and the Arab states.

Poalei Tziyyon (Workers of Zion)

A Marxist Labor Zionist party founded in Palestine in 1906; in 1919 it was incorporated into the original Ahdut HaAvoda.

Progressive National Movement (also known as Progressive List for Peace)

The joint Arab-Jewish party was established in 1984 and advocated the establishment of a Palestinian state alongside Israel.

Rafi (Israel Labor List)

The party was created in 1965 when David Ben-Gurion and some of his supporters broke away from Mapai. In 1968 most of the party's activists (except for Ben-Gurion) returned, and together with Mapai and Ahdut HaAvoda, formed the Labor Party.

Rakah (New Communist List)

The communist party created by a faction that broke off in 1965 from Maki (*q.v.*) (Communist Party of Israel). In the 1973 elections Rakah and Maki created a joint electoral list called Moked (Focus). Rakah consisted primarily of Arab communists and participated in the 1988 elections.

Revisionist Zionism

A right-wing Zionist party and movement founded in 1925 by Vladimir Jabotinsky; it demanded a revision of the conciliatory policy by the Zionist Executive toward the British mandatory government.

Shas (Sephardic Torah Guardians)

A clericalist and theocratic party formed in 1984 by former Agudat Israel (*q.v.*) members to represent the interests of the ultra-Orthodox Sephardim.

Shelli (Acronym for Peace for Israel and Equality for Israel)

A party created in 1977 by Maki (*q.v.*) and several other groups. It disbanded before the 1984 elections.

Shinui (Change)

Founded by Amnon Rubenstein in 1973 as a protest movement against the October 1973 War. In 1976, in preparation for the May 1977 elections, Shinui joined with other groups to create the Democratic Movement for Change (DMC), led by Yigal Yadin. In 1979 Shinui broke away from the DMC and

created its own political party. In the 1988 elections its Knesset representation declined from three to two seats.

**Tami (Traditional Movement of Israel)**

Established in 1981 by an Oriental faction within the National Religious Party (*q.v.*) led by former Minister of Religious Affairs Aharon Abuhatzera to represent the interests of Sephardim. In 1988 Tami became a faction in the Likud Bloc (*q.v.*).

**Tehiya (Renaissance)**

A right-wing religio-nationalist group that broke away from the National Religious Party (*q.v.*) in 1981. The party advocates the eventual imposition of Israeli sovereignty over the West Bank, accompanied by the transfer to the Arab countries of its Palestinian Arab inhabitants.

**Torah Religious Front**

Formed by Agudat Israel (*q.v.*) and Poalei Agudat Israel (Workers' Society of Israel) to campaign in the 1955 and 1959 elections. The front excluded the two Mizrahi religious parties, claiming they were insufficiently committed to the concept of a Torah state. The Torah Religious Front was dissolved prior to the 1961 elections.

**United Religious Front**

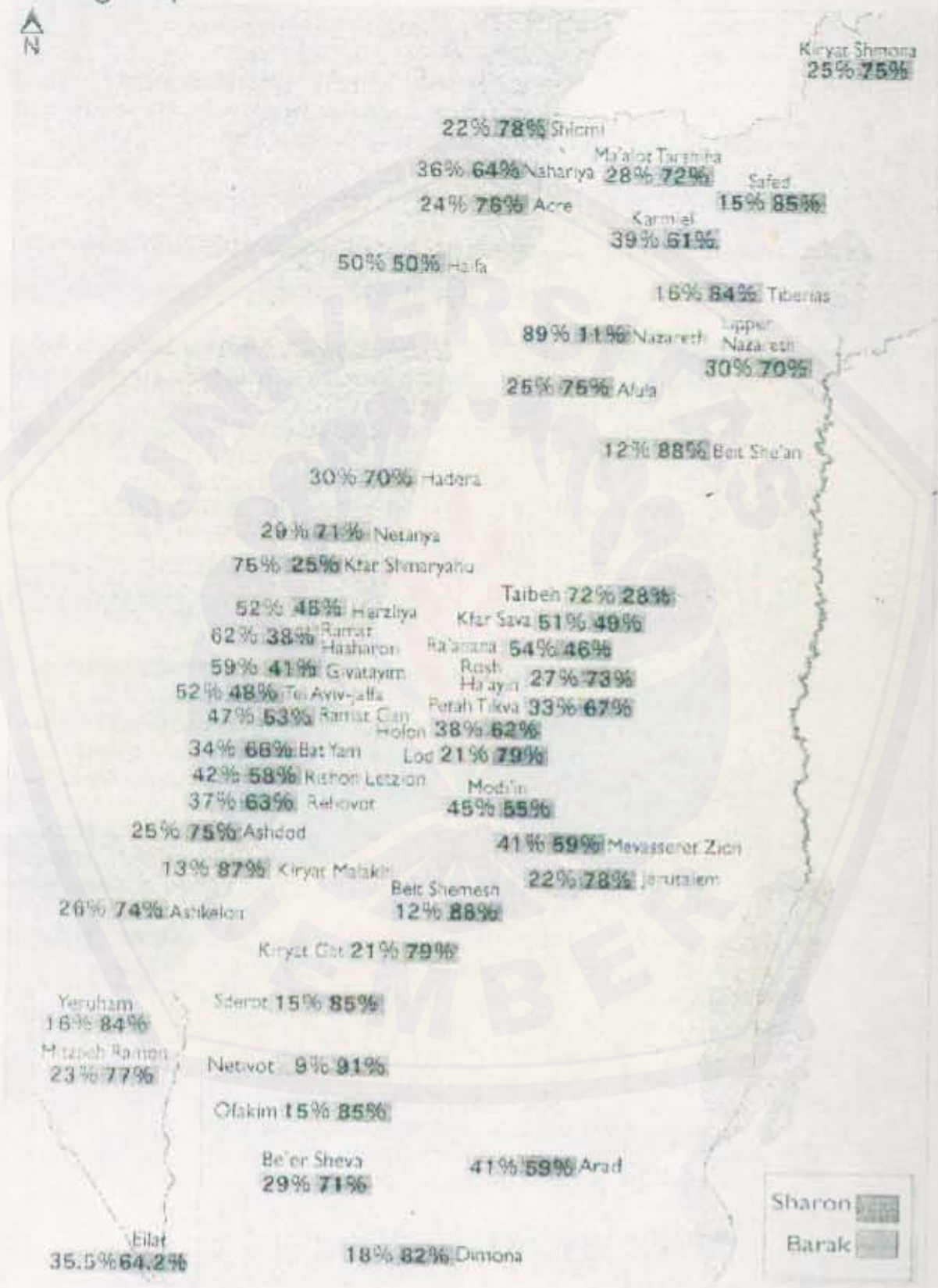
Electoral alliance created in 1949 composed of the four religious parties: Mizrahi (*q.v.*), HaPoel HaMizrahi (*q.v.*), Poalei Agudat Israel (Workers' Society of Israel), and Agudat Israel (*q.v.*). As of 1951 the four parties campaigned separately.

**Yahad (Together)**

An electoral list formed by Ezer Weizman in 1981; in 1984 it joined the Labor Party as a faction.

Lampiran XVIII

Voting map



Sharon   
 Barak



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMBER 68121  
E-mail : lemlit unej @ jember. telkom.net.id

Nomor : 416/J 25.3.1/PL.5/2001

24 Maret 2001

Lampiran : -

Perihal : *Permohonan ijin melaksanakan penelitian*

Kepada : *Yth. Sdr. Kepala  
Perpustakaan Universitas Jember  
di-*  
**J E M B E R .**

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No 1155/J25.12/PL.5/2001 Tanggal 24 Maret 2001, perihal ijin penelitian mahasiswa :

*Nama/NIM : SIGIT WIBISONO / 96-1112  
Fakultas/jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Hub. Internasional  
A l a m a t : Jl. Rambutan III/9 Jember.  
Judul Penelitian : Prospek Perdamaian Israel Palestina Era PM Israel Ariel Sharon.  
Lokasi : Jember  
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan*

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



*n. Ketua  
Sekretaris,*

*R. H. sc. agr. Edik Sullistyanto*  
NIP. 131 792 232

*Embusan Kepada Yth. :*

*Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
Mahasiswa ybs.  
Arsip*



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
 Digital Repository Universitas Jember  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Kalimantan 37 - Kampus Tegal Boto  
 Kotak Pos 198 - Telp: (0331) 338261, 333860, atau 330224 Pes. 307-308  
 Fax. (0331) 338261, E-mail : [lib-uncj@jember.wasantara.net.id](mailto:lib-uncj@jember.wasantara.net.id)  
 Jember 68121

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

NOMOR : 182 / Jkt 5.1 / T43 / 2001

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : AGUSTIN PRIBORO

NIM : 96.1112

Jur/Program : ILMU HUBUNGAN LINGKUNGAN

Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Angkatan : 1996

Terhitung mulai bulan MARET sampai bulan MEI telah

mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan judul sebagai

berikut : "PROSPEK PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA ERA PM ISRAEL  
 ARIEL SHARON"

Tanggal	Tempat			
	R. Sirkulasi	R. Referen	R. OR	R. Skripsi
27, 28 Maret				
30 Maret				v
2, 3, 4 April	v			v
7 April	v			
11, 12 April		v		
16 April	v			
18, 19 April			v	
20-23 April	v			
25 April			v	
27 April		v		
29, 30 April				
1, 2, 5 Mei	v		v	
10-15 Mei			v	
17 Mei				v
19-25 Mei	v			
27-30 Mei		v		

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Juni 2001

A.n Kepala  
 Kasubag TU

Dra. Hj. Budiwati, S.sos  
 NIP. 130.683.181